



KAZEE
Media Analytics is Easy !

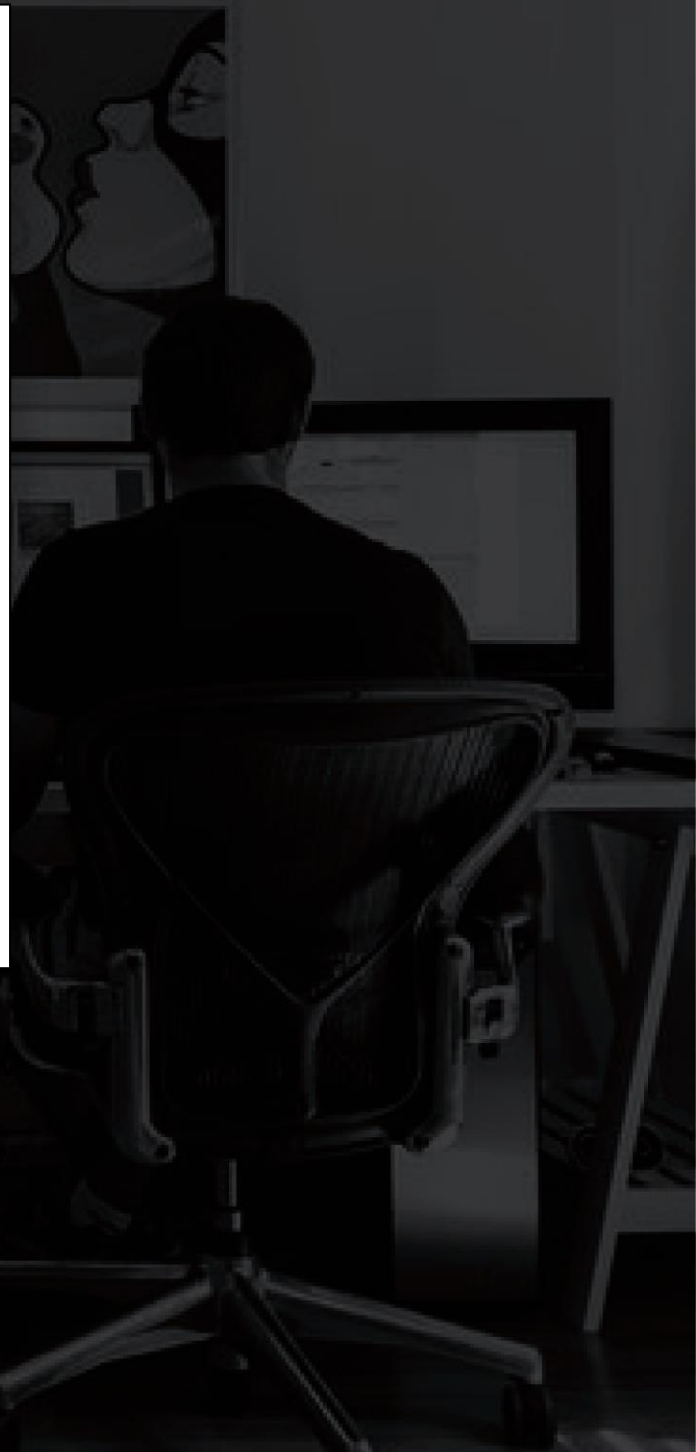
LAPORAN AKHIR

**Pengembangan Master Plan Smart City
Kabupaten Purbalingga**

**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
PURBALINGGA TA.2018**

Oleh :

PT KAZEE DIGITAL INDONESIA



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Smart City adalah strategi untuk memajukan potensi, pelaksanaan pembangunan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat suatu daerah pemerintahan (dalam hal ini kota maupun kabupaten) dengan pendayagunaan data dan teknologi informasi, penyusunan kebijakan yang optimal, dan dukungan SDM di lingkungan pemerintah daerah. Dalam mencapai terwujudnya strategi Smart City ini diperlukan arahan dan kajian sesuai dengan kondisi terkini dari daerah pemerintahan yang bersangkutan, karena pengimplementasian teknologi namun tidak memiliki nilai tepat-guna tidak akan dapat mampu meningkatkan kualitas pemerintahan secara optimal.

Dengan meningkatnya manfaat yang diberikan dan tingkat pendayagunaan dari teknologi informasi yang sudah merasuk di dalam kehidupan sehari-hari baik di tingkat masyarakat, organisasional, maupun pemerintahan, maka adalah sebuah langkah yang tepat apabila Kabupaten Purbalingga hendak mengadopsi strategi Smart City untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Melalui Kajian Pengembangan Masterplan Purbalingga Smart City ini, dilaksanakan survei kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, penilaian peringkat Smart City dari Kabupaten Purbalingga, dan kemudian disusun daftar kebutuhan program untuk diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyongsong Purbalingga Smart City. Sebagai langkah akhir dari dokumen kajian ini, diberikan pentahapan di dalam lima tahun implementasi sebagai bagian dari roadmap Smart City Kabupaten Purbalingga, sesuai dengan prioritas program dan arahan kebijakan dan pembangunan dari Kabupaten Purbalingga.

Tim penyusun kajian ini hendak berterima kasih kepada Ibu Dyah Hayuning Pratiwi sebagai Plt Kabupaten Purbalingga untuk komitmen yang diberikan untuk memajukan Kabupaten Purbalingga, serta kepada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Purbalingga yang telah mengusulkan dilaksanakan program ini dan memberikan pendampingan selama program kajian dilaksanakan. Tidak lupa tim penyusun kajian berterima kasih kepada segenap dukungan yang telah diberikan OPD Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh tim kajian untuk menyusun laporan dan rekomendasi akhir.

Sebagai penutup, tim penyusun kajian berharap hasil kegiatan Kajian Pengembangan Masterplan Purbalingga Smart City ini dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan Kabupaten Purbalingga. Kami menyadari bahwa hasil kajian ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami berharap hasil kajian ini dapat diimplementasikan dengan penyempurnaan yang diperlukan sesuai dengan kondisi terakhir dari perkembangan teknologi dan juga arahan pembangunan Kabupaten Purbalingga.

Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tim Penyusun Kajian

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR TABEL	V
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Jadwal Pelaksanaan.....	4
2. METODOLOGI	6
3. TINJAUAN PUSTAKA	9
3.1. <i>Smart City</i>	9
3.2. Definisi dan Komponen <i>Smart City</i>	11
3.3. Model <i>Smart city</i>	14
3.4. Model Kota Cerdas	16
3.5. Stakeholder <i>Smart city</i>	19
3.6. Tingkat Kematangan	20
3.7. Analisis Prioritas	25
4. TINJAUAN KABUPATEN PURBALINGGA	27
4.1. Kondisi Umum Wilayah.....	27
4.2. Arahkan Strategis Pemerintahan	29
4.3. Visi & Misi	31
4.4. Sasaran Dan Program Kerja	38
4.5. Indikator Kinerja Utama	38
4.5.1. Pendidikan	38
4.5.2. Kesehatan.....	39
4.5.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	39
4.5.4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39
4.5.5. Pembangunan Ekonomi	39
4.5.6. Kepemudaan dan Olah Raga	40

5. PENTAHAPAN LANGKAH MENUJU <i>SMART CITY</i> PURBALINGGA	40
5.1. Tahap Pertama: Visi dan Rencana Kerja	41
5.2. Tahap Kedua: Penguatan SDM dan Kebijakan.....	42
5.3. Tahap Ketiga: Pemantapan Teknologi dan Infrastruktur.....	42
5.4. Tahap Keempat: Penentuan Program Unggulan.....	43
5.5. Tahap Kelima: Perluasan Dampak dan Manfaat.....	43
6. PENGEMBANGAN MASTER PLAN	44
6.1. Strategic Alignment	44
6.1.1. Pemetaan permasalahan, Isu Strategis dan Capaian RPJMD, Komponen Pengembangan <i>Smart City</i>	44
6.1.2. Pemetaan permasalahan, isu strategis dan komponen Smart City	49
6.2. Analisis GAP.....	60
6.2.1. Smart Economy.....	60
6.2.2. Smart Living	63
6.2.3. Smart Mobility	65
6.2.4. Smart Environment	66
6.2.5. Smart Government.....	66
6.2.6. Smart Technology Infrastructure	67
6.2.7. Smart People	67
6.2.8. Smart Governance	68
6.3. Analisis Prioritas	68
6.4. Pengembangan Master Plan.....	73
6.5. Integrasi Sistem Informasi.....	83
7. PENUTUP	86
7.1. Kesimpulan.....	86
7.2. Saran	87
LAMPIRAN A: SURVEI DAN ASSESSMENT	89
Pelaksanaan Survei	89
Hasil Survei	92
Smart Economy.....	94
Smart Living	95

Smart Mobility	97
Smart Environment.....	98
Smart Government	99
Smart Technology	100
Smart People (SDM)	101
Smart Governance	102
Kondisi Eksisting Inovasi dan Pemanfaatan ICT di Pemda Kabupaten Purbalingga	103
Dokumentasi Kegiatan Survei.....	144
LAMPIRAN B: LAPORAN PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION	146
Daftar Acara	146
Peserta Acara.....	146
Paparan Hasil Penyusunan	146
Masukan dan Hasil Diskusi	147
Dokumentasi FGD.....	147
LAMPIRAN C: LAPORAN PAPARAN KEMAJUAN PENYUSUNAN MASTERPLAN	
.....	149
Lokasi Pelaksanaan.....	149
Daftar Acara	149
Peserta Acara.....	149
Paparan Hasil Penyusunan	149
Masukan dan Hasil Diskusi	150
Dokumentasi Paparan	153
LAMPIRAN D: JUMLAH SIM DI KABUPATEN PURBALINGGA	156

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1. Diagram Perkiraan Populasi Penduduk Kota di berbagai Provinsi di Indonesia (Hayu Parasati, 2014).....	1
Gambar 1-2. Karakteristik Solusi Cerdas (SCCIC ITB, 2014).....	2
Gambar 2-1. Metodologi pengembangan Purbalingga <i>Smart City</i>	6
Gambar 3-1. Terminology <i>Smart City</i> (Manvile 2012, Dameri, 2013)	10
Gambar 3-2. Model <i>Smart City</i> (Giffinger, 2007)	14
Gambar 3-3. IBM Smarter City Concept.....	16
Gambar 3-4. Garuda <i>Smart City</i> Model (http://sccic.id/main/research/gscm)	17
Gambar 3-5. Dimensi <i>Smart City</i> City Asia (BSC, 2017)	18
Gambar 3-6. Para pemangku kepentingan <i>Smart City</i>	20
Gambar 3-7.Level Kematangan GSCM.....	21
Gambar 3-8 McFarlan's Grid.....	26
Gambar 5-1. Alur Tahapan Realisasi Smart City.....	40

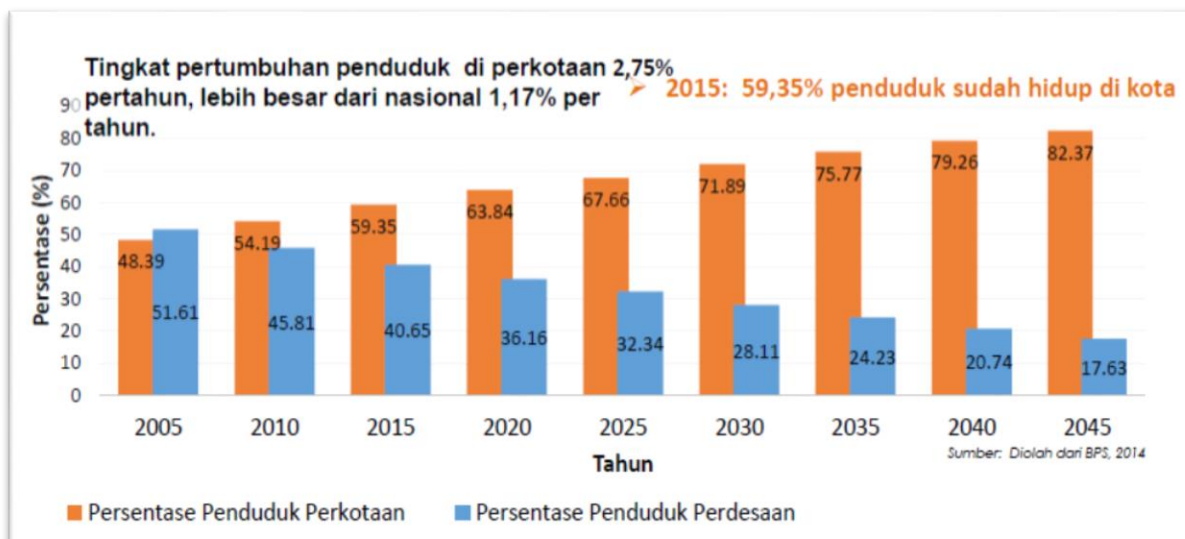
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Uraian kegiatan pengembangan Kabupaten Purbalingga <i>Smart City</i>	5
Tabel 2. Terminologi <i>Smart City</i> (Manville, 2012)	10
Tabel 3. Beberapa definisi <i>Smart City</i>	12
Tabel 4 Matrik Indikator Kematangan GSCM	21
Tabel 5. Pemetaan Visi dan Misi, Tujuan terhadap Sasaran dan Komponen <i>Smart City</i>	50
Tabel 6. Pemetaan Sasaran terhadap Permasalahan dan Isu Strategis	54
Tabel 7. Inisiatif Tahap 1 untuk <i>Smart City</i> Purbalingga	74
Tabel 8. Inisiatif Tahap 2 untuk <i>Smart City</i> Purbalingga	74
Tabel 9. Inisiatif Tahap 3 untuk <i>Smart City</i> Purbalingga	76
Tabel 10. Inisiatif Tahap 4 untuk <i>Smart City</i> Purbalingga	80
Tabel 11. Inisiatif Tahap 5 untuk <i>Smart City</i> Purbalingga	81
Tabel 12. Pentahapan Integrasi Sistem Informasi pada OPD	83
Tabel 13. Daftar OPD yang hadir pada pelaksanaan survei	89
Tabel 14. Daftar Dokumen yang di dapat dari pelaksanaan survei	91

1. Pendahuluan

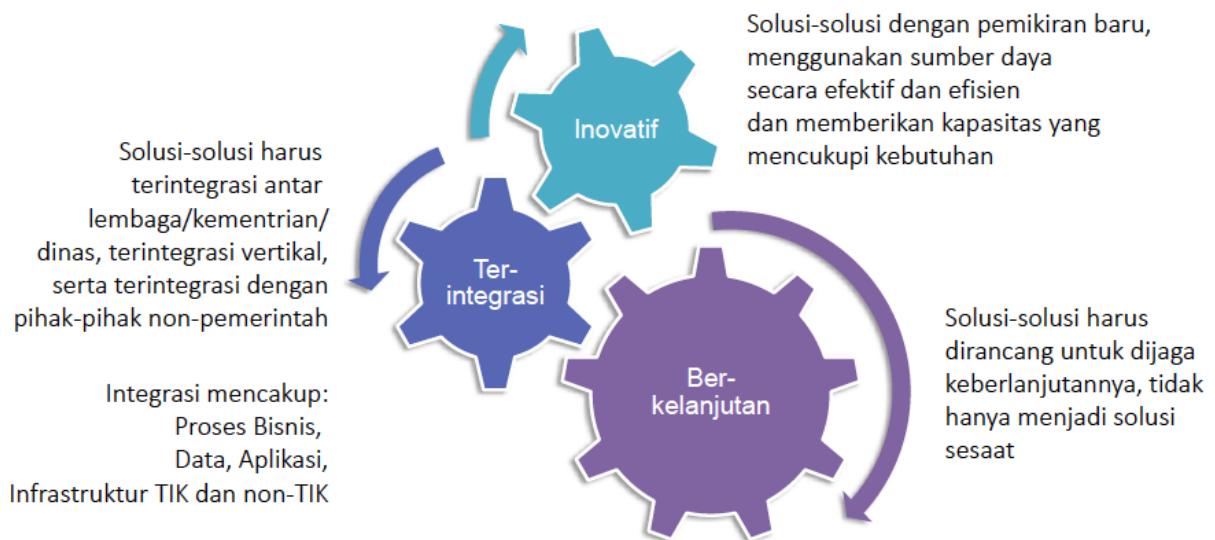
1.1. Latar belakang

Pertambahan penduduk telah menjadi isu seluruh belahan dunia, khususnya untuk daerah perkotaan dan area penyangganya. Jumlah penduduk yang terus meningkat memiliki dampak negatif yang dapat memicu berbagai permasalahan, seperti permasalahan pengangguran, kemiskinan, penurunan kualitas pelayanan publik, berkurangnya ketersediaan lahan pemukiman, kemacetan di jalan raya, membengkaknya tingkat konsumsi energi, penumpukan sampah, peningkatan angka kriminalitas, dan masalah-masalah sosial lainnya. Permasalahan ini jelas berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat yang semakin menurun. Hal serupa terjadi di Indonesia, di mana Gambar 1-1 memperlihatkan bagaimana pertumbuhan penduduk Indonesia terus bertambah. Pemerintah dan stakeholder lainnya dituntut untuk bersikap secara kritis, efektif, dan efisien dalam menyikapi fenomena ini agar permasalahan yang muncul tidak terus meluas. Salah satu konsep yang saat ini sedang berkembang di dunia dalam menangani permasalahan kota adalah konsep *Smart City*.



Gambar 1-1. Diagram Perkiraan Populasi Penduduk Kota di berbagai Provinsi di Indonesia (Hayu Parasati, 2014)

Smart City merupakan kota yang mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk tercapainya kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan dengan dukungan teknologi, tata kelola dan sumber daya manusia yang baik. Tidak hanya dalam mengelola sumber daya, *Smart City* mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi kota serta memaksimalkan potensi untuk memaksimalkan pelayanan terhadap warganya. Melalui solusi cerdas yang memiliki karakter inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan, konsep *Smart City* tidak hanya dapat diterapkan pada area perkotaan namun juga dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan atau potensi di pedesaan (*smart village*), Kabupaten (*Smart City*), hingga tingkat propinsi (*Smart Province*).



Gambar 1-2. Karakteristik Solusi Cerdas (SCCIC ITB, 2014)

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang di utara, Kabupaten Banjarnegara di timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di barat.

Industri, pariwisata dan kuliner menjadi potensi utama dalam pengembangan Kabupaten Purbalingga dalam melakukan pengembangan daerah. Beberapa isu penting yang dihadapi oleh Kabupaten Purbalingga termasuk masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pembangunan manusia, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur, dan isu-isu tersebut menjadi menjadi fokus pemerintah dalam pengembangan Kabupaten Purbalingga saat ini. Isu-isu ini secara signifikan dapat diselesaikan melalui konsep-konsep *Smart City* yang berbasis pembangunan yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Konsep *Smart City* yang bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan kualitas hidup ini juga selaras dengan visi pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu “Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berahlak Mulia”. Selain itu, implementasi Konsep *Smart City* juga sejalan dengan misi pemerintah secara umum diantaranya adalah mewujudkan pemerintahan yang profesional (*good gevernance*, mendorong kehidupan masyarakat yang religius, mengupayakan kebutuhan pokok, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kawasan yang sehat, dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan pemaparan di atas, konsep *Smart City* dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Namun untuk mencapai ini diperlukan persiapan dan acuan yang baik. Langkah awal yang perlu diambil dalam mewujudkan implementasi konsep *Smart City* untuk Kabupaten Purbalingga ini adalah perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga dapat dijadikan sebagai panduan makro dalam penentuan kebijakan dan strategi daerah pada tingkat yang ditetapkan. Setelah itu, strategi tersebut disesuaikan dengan arah pengembangan dan kebijakan perencanaan pada tingkat yang lebih luas. Berdasarkan pemikiran demikian, diperlukan sebuah dokumen perencanaan atau roadmap berupa **“Kajian Pengembangan Masterplan Purbalingga *Smart City*”**.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan masterplan *Smart City* Kabupaten Purbalingga dengan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan *awareness*/ kesadaran mengenai konsep *Smart City* kepada seluruh *stakeholder* Kabupaten Purbalingga
2. Memetakan kondisi eksisting implementasi Purbalingga *Smart City*
3. Identifikasi permasalahan dan keunikan potensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Purbalingga
4. Pengembangan Rencana Induk Pengembangan Purbalingga *Smart City*

1.3. Ruang Lingkup

Secara umum rincian pekerjaan yang dilakukan dalam membangun masterplan *Smart City* Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data sekunder dari instansi atau lembaga terkait yang berhubungan dengan pengembangan Kabupaten Purbalingga *Smart city*.
2. Pengumpulan data primer melalui interview dan FGD. *Interview* dilakukan untuk mendapatkan data kualitatif terkait infrastruktur fisik dan non fisik dalam pengembangan Purbalingga *Smart city*.
3. Identifikasi permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga
4. Menyusun roadmap dan model implementasi Purbalingga *Smart City*

1.4. Jadwal Pelaksanaan

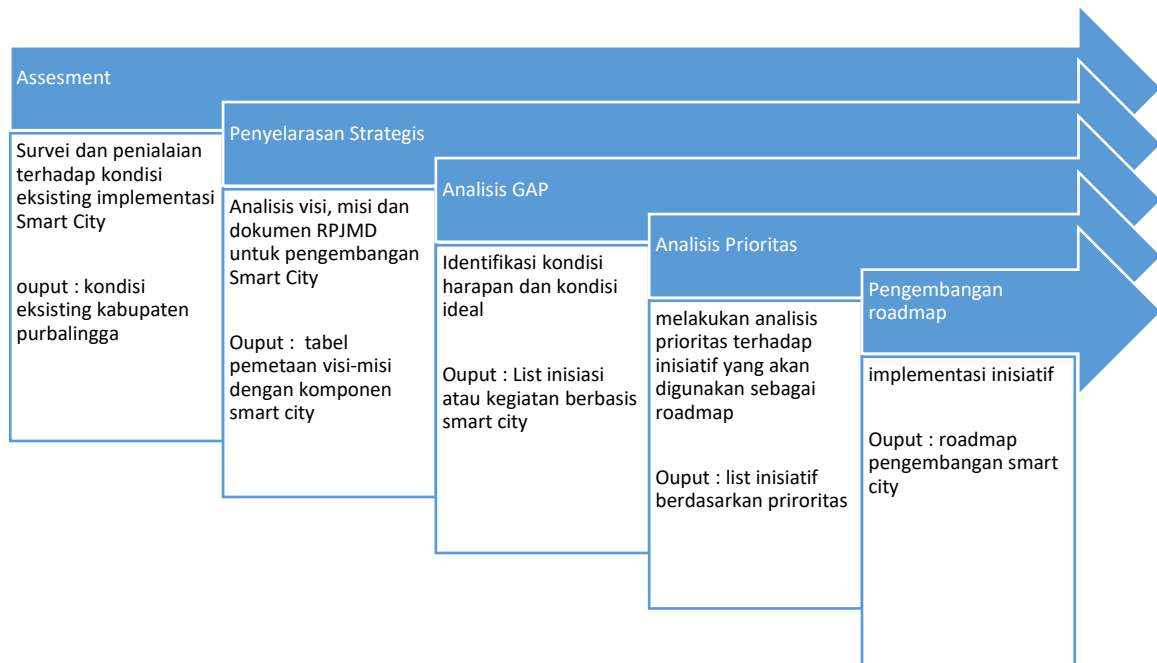
Kegiatan ini akan dilakukan selama 30 hari dengan rincian tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Uraian kegiatan pengembangan Kabupaten Purbalingga *Smart City*

No	Uraian Kegiatan	November - Desember				
		Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Minggu 5
1	Persiapan					
2	FGD, Survei dan Assement kondisi Kabupaten Purbalingga					
3	Strategic alignment untuk menyelaraskan arahan <i>Smart City</i> agar sesuai dengan visi-misi daerah					
4	Analisis Gap					
5	Analisis Portofolio untuk memilih inisiasi utama dalam membangun master plan					
6	Desain roadmap/ masterplan					
7	Sosialisasi dan Pelaporan					

2. Metodologi

Secara umum metode yang dikembangkan untuk pengembangan Purbalingga *Smart City* dapat dilihat pada Gambar 2-1.



Gambar 2-1. Metodologi pengembangan Purbalingga *Smart City*

Adapun beberapa tahapan di dalam metodologi pengembangan Purbalingga *Smart City* ini adalah sebagai berikut:

1. *Assesment* / Penilaian

Tahap awal dalam metodologi ini adalah melakukan *assesment* atau penilaian terhadap kondisi eksiting pelayanan *Smart City* Kabupaten Purbalingga. Penilaian dilakukan berdasarkan model *Smart City* yang dikembangkan oleh Giffinger (2007) dan GSCM (2015). Secara umum akan diidentifikasi level kematangan dan posisi Kabupaten Purbalingga dalam implementasi *Smart City*. *Assesment* ini akan meliputi:

- Identifikasi permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Purbalingga

- b. Identifikasi kondisi tatakelola, teknologi dan infrastruktur serta kondisi sumberdaya manusia Kabupaten Purbalingga
 - c. Identifikasi layanan *Smart City* di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk masing-masing layanan ini akan diidentifikasi secara terpisah sesuai dengan kluster masing-masing,
2. Setelah *assessment* selesai dilakukan maka dapat dilakukan *Strategic Alignment* atau penyelarasan strategi. Penyelarasan strategi ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap visi-misi Kabupaten dan RPJMD pemerintah. Tahapan ini dilakukan agar roadmap yang dihasilkan benar-benar menyeluruh dan mencakup kebutuhan baik dari pimpinan daerah maupun kebutuhan dari masing-masing unit (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintahan. Penyelarasan strategis untuk mengetahui arahan dan tuntutan dari pimpinan Pemda Purbalingga dan juga dapat diperoleh dari Rencana Jangka Panjang Pemda Purbalingga. Apabila Pemda Purbalingga sudah memiliki Sistem Manajemen Kinerja yang berisi ukuran kinerja dan target pencapaian maka dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan *Smart City* untuk mendukung pencapaian target tersebut. Selain itu dilakukan juga penyelarasan fungsional dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing unit (SOPD) di lingkungan Pemda Purbalingga terhadap layanan *Smart City*.

3. Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*)

Melakukan analisis kesenjangan implementasi *Smart City* yang ingin diwujudkan dengan kondisi saat ini, sehingga dihasilkan inisiatif-inisiatif yang perlu dilakukan untuk menutup kesenjangan tersebut.

4. Analisis Prioritas

Analisis Prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan dua parameter yaitu:

- Usaha yang perlu diberikan untuk melakukan sebuah inisiatif

- Manfaat yang akan didapatkan apabila inisiatif tersebut dilakukan dengan kata lain tahapan ini melakukan analisis dampak dan usaha terhadap inisiatif yang akan dikembangkan.

5. Analisis Portofolio

Analisis portofolio dilakukan dengan menelaah masing-masing inisiatif berdasarkan seberapa penting inisiatif tersebut untuk kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Berdasarkan Mc Farland, pembagian dilakukan ke dalam 4 (empat) kelompok yaitu :

- (1) Kelompok operasional utama (*key operational*)
- (2) Kelompok pendukung (*support*)
- (3) Kelompok potensi tinggi (*high potential*)
- (4) Kelompok strategis (*strategic*)

6. Desain Roadmap

Setelah inisiatif-inisiatif berhasil didefinisikan selanjutnya diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan maka tahapan berikutnya adalah penyusunan roadmap (peta jalan) *Smart City* Kabupaten Purbalingga. Sebelum menyusun roadmap ini perlu dilakukan analisis terhadap inisiatif yang telah diurutkan berdasarkan beberapa pertimbangan di bawah ini:

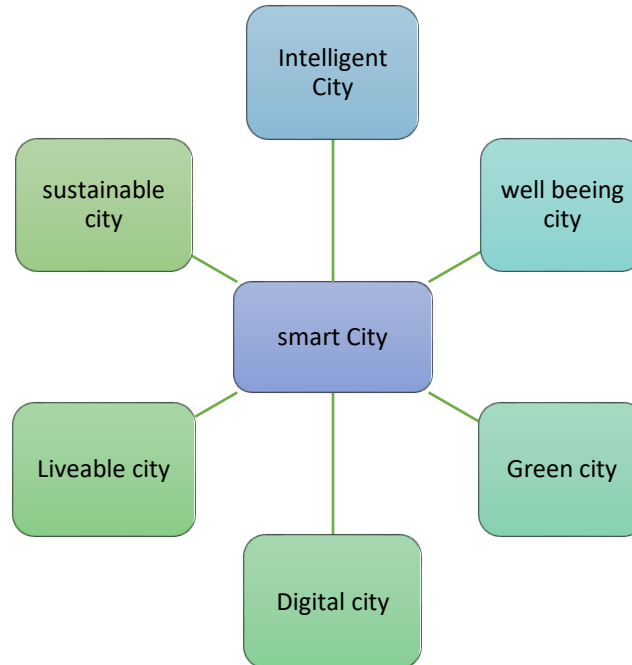
- a. Analisis Presedensi
- b. Analisis Kesiapan
- c. Distribusi dan kesiapan sumber daya

3. Tinjauan Pustaka

3.1. *Smart City*

Smart City merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi semenjak mulai muncul pada tahun 1990-an. Keberadaannya terus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar dalam menghadapi permasalahan kota. Zhu, dkk (2002) mengutip pernyataan Gruber bahwa *Smart City* biasa digunakan untuk merepresentasikan kemampuan sebuah kota dalam menyediakan layanan terhadap individu atau masyarakat untuk bereksplorasi dalam dunia maya dengan kecepatan lingkungan dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan tentang kota tersebut. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang maksimal diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan (Schoorman, 2012).

Dalam perjalanannya *Smart City* memiliki beberapa terminologi. Konsep *Smart City* berkembang dari mulai *cyber city*, *digital city*, *intelligent* dan *Smart City* (Schafer dkk, 2011). Dameri (2013), mengutip Carugliu dan Qi menyampaikan istilah yang berbeda didefinisikan untuk konsep yang hampir sama. *Intelligent city*, *digital city*, *sustainable city*, *techno city*, *well being city*. Konsep-konsep tersebut sama sekali tidak berkontradiksi, didalamnya justru terdapat beberapa aspek yang sama-sama mengarah pada konsep *Smart City*. Istilah-istilah tersebut pada dasarnya sama, hanya yang populer adalah *Smart City* (Manville dkk, 2013).



Gambar 3-1. Terminology *Smart City* (Manvile 2012, Dameri, 2013)

Terminologi di atas merupakan prinsip-prinsip yang berkembang dalam konteks *Smart City*. Lebih detail Tabel 2 memperlihatkan beberapa definisi terkait terminology *Smart City*.

Tabel 2. Terminologi *Smart City* (Manville, 2012)

Intelligent City	Adalah kota yang memiliki kompetensi dalam memproduksi pengetahuan dan menggunakannya untuk membangun <i>capital intelligent</i> untuk mengembangkan kota.
Digital City	Adalah kota yang saling terkoneksi. Menggunakan TIK untuk melakukan pemrosesan data dalam menghasilkan informasi.

Sustainable city	Kota yang menggunakan teknologi untuk mereduksi emmisi CO ² , memproduksi energi yang efisien untuk tercapainya kota yang hijau.
Wellbeing city	Kota yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Membuat kota yang atraktif untuk kehidupan sosial dan bisnis.
Technocity	Kota yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi infrastruktur dan layanan kota dengan berfokus pada ruang terbuka publik, mobilitas dan transportasi publik.
Green City	Kota yang dibangun dengan tidak mengorbankan asetnya, melainkan terus memupuk sumber daya alam, lingkungan, dan kualitas prasarana kota untuk menjawab isu perubahan iklim melalui tindakan mitigasi dan adaptasi.

3.2. Definisi dan Komponen *Smart City*

Secara umum terkait *Smart City*, belum ada benar-benar jelas mendefinisikan *Smart City*. Menurut Schafer (2011) tidak kurang dari 100 definisi tentang *Smart City*. Sebuah kota disebut *smart* ketika aset manusia dan sosial saling berinteraksi dengan infrastruktur dan teknologi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi kota dengan lingkungan yang layak huni. Sementara, Smartcom dikutip oleh Manvrine menyatakan *Smart City* menggabungkan berbagai teknologi untuk menciptakan lingkungan yang ramah, dan memberikan masyarakat dengan hidup yang lebih layak (Manvrine dkk, 2013).

Nada serupa terkait definisi *Smart City* yang masih belum benar-benar terstandarisasi pun dibahas oleh Dameri (2013) dan Manvrine (2013). Secara khusus lebih detail disebutkan bahwa *Smart City* merupakan isu penyelesaian permasalahan dan layanan

kota melalui maksimalisasi TIK menurut Manvrine. Sementara menurut Renata Dameri disebutkan bahwa *Smart City* adalah suatu area geografis, di mana TIK, logistik, produksi energi, pengelolaan kota dan lain sebagainya saling bersinergi dalam memberikan benefit bagi masyarakat. Tabel 3 memperlihatkan beberapa definisi yang digunakan sebagai referensi dalam pengembangan *Smart City*.

Tabel 3. Beberapa definisi *Smart City*

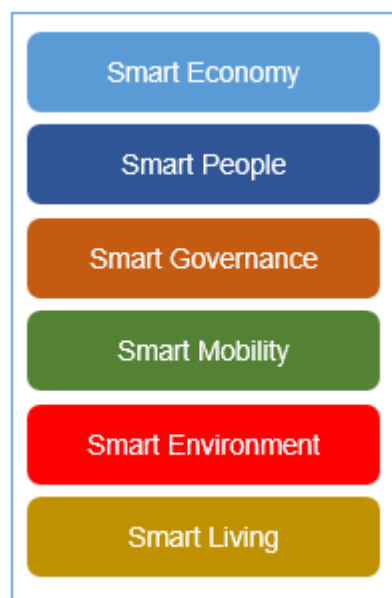
Peneliti	Definisi
Dameri (2012)	<i>Smart City</i> adalah wilayah dengan geografis yang terdefinisi dengan baik, di mana teknologi tinggi seperti TIK, logistik, produksi energi, dan sebagainya, saling berinteraksi untuk menciptakan manfaat bagi warga negara dalam peningkatan kesejahteraan.
Dall'O (2016)	<i>Smart City</i> adalah kota yang dibangun di berbasis pengembangan manusia. Kepandaian sebuah kota mengacu pada kemampuan kota untuk memenuhi kebutuhan warga.
Suhono (2014)	<i>Smart City</i> adalah kota yang dapat mengelola semua sumberdaya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan. Pengelolaan tersebut semata-mata untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota.
Topeta D	Sebuah kota "menggabungkan teknologi TIK dan Web 2.0 dengan perencanaan organisasi, desain dan perencanaan lainnya untuk dematerialisasi dan mempercepat proses birokrasi dan membantu untuk mengidentifikasi sesuatu hal yang baru, dan membuat solusi yang inovatif, agar bisa berkembang dan kelayakan hidup.
Forrester	<i>Smart City</i> merupakan pendalaman pentingnya penggunaan teknologi <i>Smart Computing</i> untuk membuat komponen layanan infrastruktur dan

Peneliti	Definisi
	kota yang meliputi administrasi kota, pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, real estat, transportasi, dan utilitas - lebih cerdas, saling berhubungan, dan efisien".
Mathew	<i>Smart City</i> adalah hasil dari strategi pengetahuan dan strategi kreatif yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sosio-ekonomi, ekologis, logistik dan persaingan kota. <i>Smart City</i> semacam itu didasarkan pada campuran modal manusia yang menjanjikan (misalnya tenaga kerja terampil), modal infrastruktur (misalnya fasilitas komunikasi berteknologi tinggi), dan modal sosial (misalnya hubungan jaringan yang intens dan terbuka) dan modal kewirausahaan.
Carugliu & Nijkamp	<i>Smart City</i> adalah kota yang masyarakatnya mampu mengelola sumber daya dengan efisien, dalam arti "mampu memaksimalkan investasi sumberdaya manusia, transportasi, dan infrastruktur teknologi informasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan hidup".
Cohen Boyed	Sebuah pendekatan yang luas, terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi pengoperasian sebuah kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi daerahnya. Cohen lebih jauh mendefinisikan <i>Smart City</i> dengan pembobotan aspek lingkungan menjadi: <i>Smart City</i> menggunakan TIK secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan - semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan.

3.3. Model *Smart city*

Pengembangan *Smart City* seperti telah disampaikan bagian sebelumnya begitu pesat, baik oleh perusahaan profit, non profit dan kalangan pendidikan. Konsep yang handal dari *Smart City* menurut Van Landegem (2012) adalah terbentuknya *smart Government*, *Smart People*, *Smart Environment*, *Smart Economy*. Sementara Schafer dkk memetakan bahwa parameter *Smart City* terdiri dari 3 hal yaitu inovasi ekonomi, inovasi infra struktur dan tatakelola.

Giffinger (2007), melakukan pemeringkatan *Smart City* melalui konsep yang dikembangkan dengan 6 komponen utama. Sebagai komponen penilaian, di mana masing-masing komponen terdiri dari beberapa indikator. Target utama dari konsep ini adalah menghasilkan kota yang nyaman, memiliki kemudahan akses terhadap berbagai layanan dan memiliki kelayakan untuk ditinggali dari sudut pandang sosial dan lingkungan dengan komponen *smart economy*, *people*, *governance*, *mobility*, *environment* dan *living*.



Gambar 3-2. Model *Smart City* (Giffinger, 2007)

Melalui 6 komponen yang ditampilkan pada Gambar 3-2, Giffinger melakukan pengukuran terhadap kota-kota yang ada di Eropa. Model inipun telah menjadi umum dalam pengembangan *Smart City* Eropa yang berdasar pada pengembangan Eropa

2020. Model ini pun diusung oleh asosiasi IEEE yang menyatakan bahwa sebuah kota pintar mampu menyatukan teknologi, pemerintah, dan masyarakat untuk memungkinkan karakteristik sebagai berikut:

- a) Ekonomi cerdas (*smart economy*)
- b) Mobilitas cerdas (*smart mobility*)
- c) Lingkungan cerdas (*smart environment*)
- d) Orang cerdas (*smart people*)
- e) Hidup cerdas (*smart living*)
- f) Pemerintahan cerdas (*smart governance*)

IBM melalui konsep *smarter solution* mengembangkan sebuah model yang meningkatkan layanan kota melalui penguatan pada sektor manusia, infrastruktur dan perencanaan yang baik. Secara umum masing-masing area ini memiliki *key service area* yang menjadi indikator peningkatan layanan kota. beberapa di antaranya adalah:

- a. *Government and agency administration*
- b. *Urban planning*
- c. *Environment*
- d. *Energy and water*
- e. *Transportation*
- f. *Education*
- g. *Social and health*
- h. *Public safety*

Secara umum ke 8 area layanan ini merupakan bagian dari manusia, infrastruktur dan perencanaan. Gambar 3-3 memperlihatkan keterkaitan seluruh *key service area*.



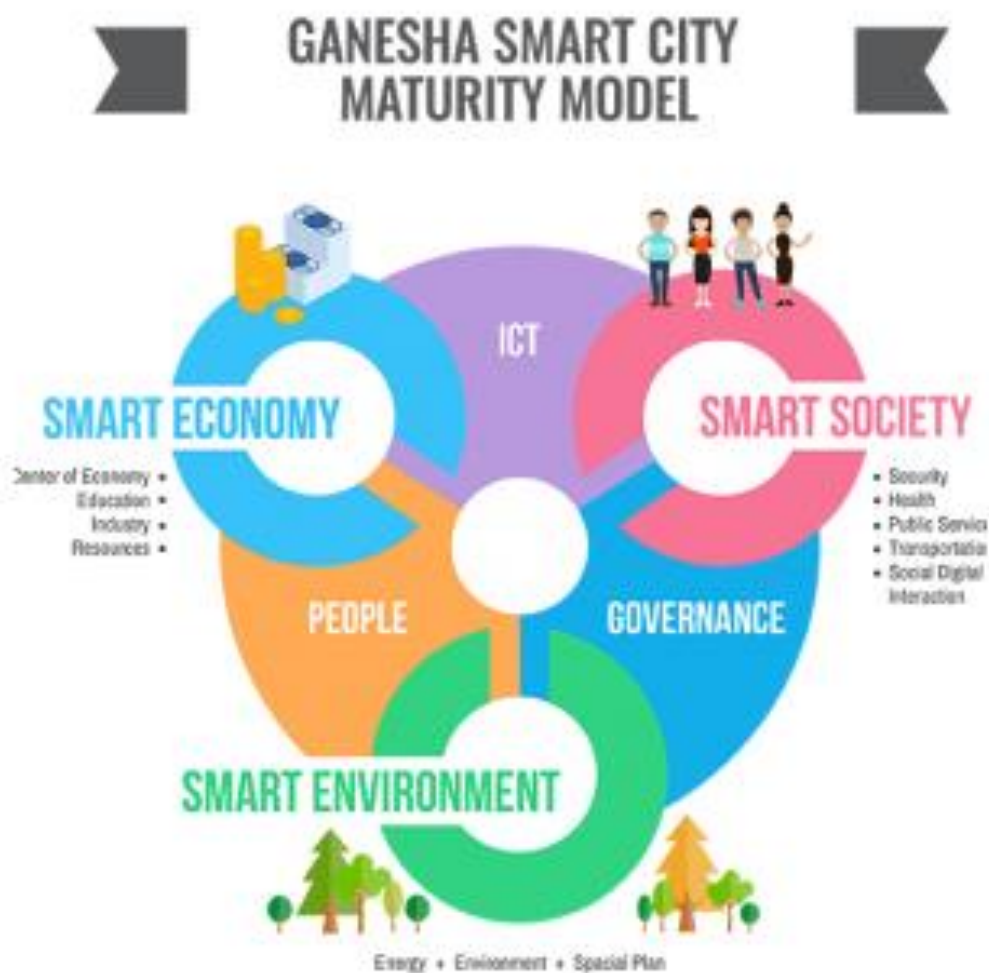
Gambar 3-3. IBM Smarter City Concept

3.4. Model Kota Cerdas

Boyd Cohen lebih menjelaskan terkait pengembangan model dan indikator pengembangan *Smart City*. *Smart City* adalah sebuah pendekatan yang luas, terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi pengoperasian sebuah kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi daerahnya. Cohen lebih jauh mendefinisikan *Smart City* dengan pembobotan aspek lingkungan menjadi: *Smart City* menggunakan TIK secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan - semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan.

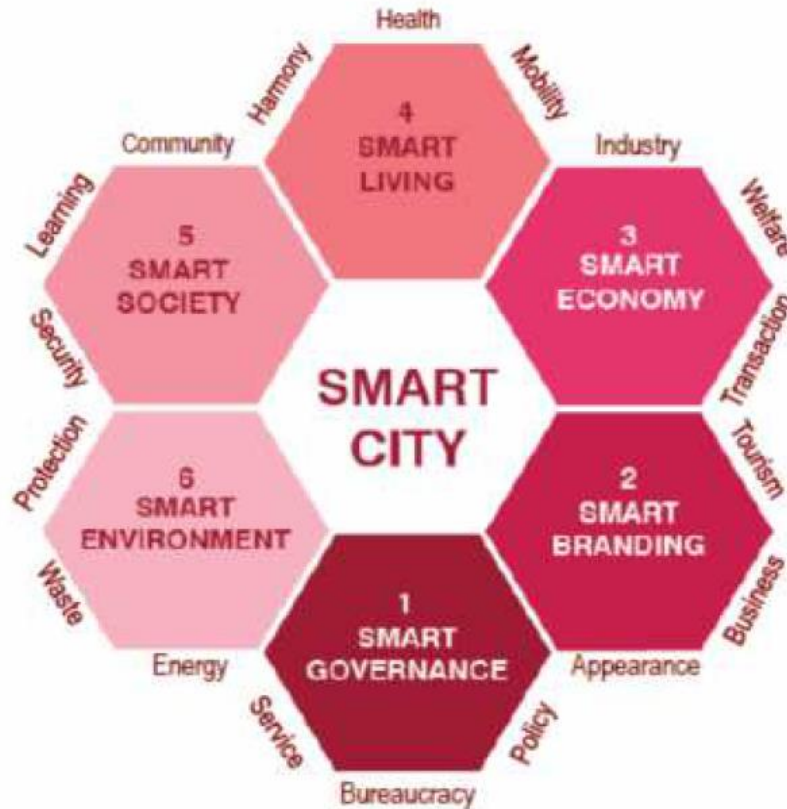
Di Indonesia sendiri beberapa model muncul sebagai acuan pengembangan *Smart City*. Garuda *Smart City* Model (GSCM) dikembangkan oleh ITB pada tahun 2014. *Smart City* dalam konsep GSCM kota cerdas adalah kota yang mampu mengelola sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk terciptanya masyarakat yang aman, nyaman dan

berkelanjutan. Model GSCM mendukung kota melalui penguatan manusia, tata kelola dan teknologi yang menopang 3 komponen utama yaitu Ekonomi, Lingkungan dan sosial. Masing-masing komponen memiliki domain seperti terlihat pada Gambar 3-4.



Gambar 3-4. Garuda *Smart City* Model (<http://sccic.id/main/research/gscm>)

Model berikutnya adalah model yang dikembangkan oleh *City Asia*. Model ini hampir mirip dengan apa yang dikembangkan oleh Uni Eropa dan IEEE. Dengan 6 komponen utama yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society* dan *Smart Environment* seperti ditunjukkan pada Gambar 3-5.



Gambar 3-5. Dimensi *Smart City* City Asia (BSC, 2017)

Model ini dikembangkan berdasarkan 6 dimensi yaitu:

a. *Smart Governance*

Berfokus untuk mewujudkan tatakelola dan pemerintahan yang efektif, efisien dan komunikatif dalam meningkatkan kinerja birokrasi.

b. *Smart Branding*

Berfokus pada branding inovasi dalam memasarkan potensi daerah seperti pariwisata, bisnis, dan wajah kota.

c. *Smart Economy*

Berfokus pada pencapaian ekonomi daerah yang memenuhi tantangan pasar, adaptif terhadap perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. *Smart Living*

Berfokus pada penjaminan kelayakan taraf hidup masyarakat melalui kualitas kesehatan dan mode transportasi.

e. *Smart Society*

Berfokus pada pewujudan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis.

f. *Smart Environment*

Berfokus pada pengelolaan lingkungan yang pintar dan berkelanjutan.

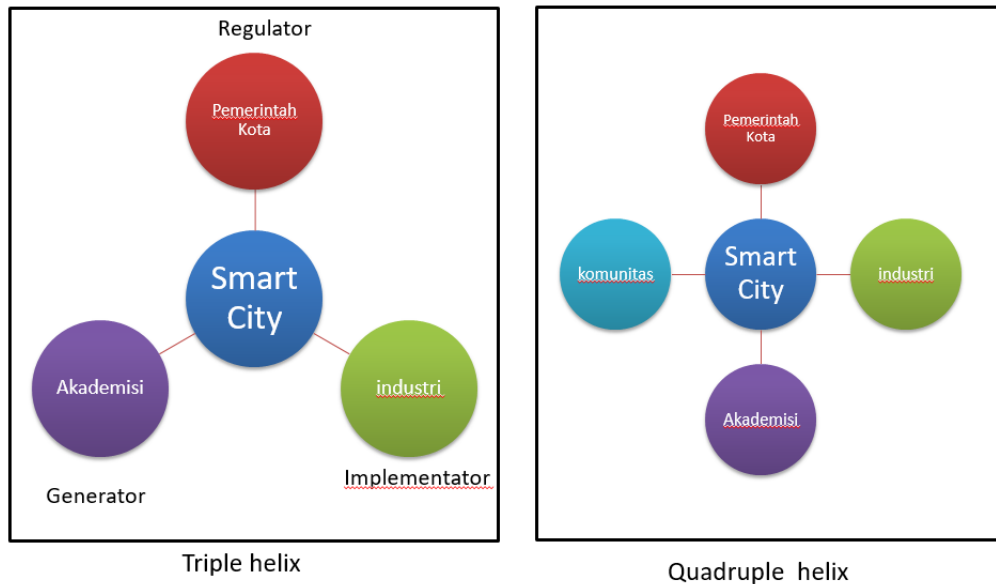
Model-model ini pada umumnya digunakan sebagai acuan pengembangan *Smart City* oleh berbagai kota yang ada diseluruh dunia. Dalam konteks pengembangan *Smart City* Kabupaten Purbalingga akan digunakan konsep yang dikembangkan Uni Eropa dan konsep yang telah dikembangkan oleh ITB.

3.5. Stakeholder *Smart city*

Stakeholder merupakan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan *Smart City*. Secara umum menurut Afonso (2009) stakeholder dapat *triple helix* maupun *quadruple helix* yang terlibat. Gambar 3-6 memperlihatkan keterlibatan stakeholder dalam pengembangan *Smart City*.

Dalam penelitian lain dasar untuk model *Triple Helix* kota cerdas ini ditetapkan oleh Leydesdorff dan Deakin (2011) di koran mereka. Model *Triple Helix* dari kota cerdas memberi kesempatan untuk mempelajari basis pengetahuan masyarakat dalam hal dukungan masyarakat sipil terhadap pengembangan sistem inovasi dan budaya mereka. Dalam skema ini, kota-kota dianggap padat dalam jaringan di antara setidaknya tiga dinamika yang relevan: yaitu, dalam modal intelektual universitas, industri penciptaan kekayaan dan pemerintahan partisipatif sistem demokrasi yang membentuk peraturan hukum. Efek dari interaksi ini pada gilirannya dipahami untuk menghasilkan ruang di mana basis informasi sistem komunikasi dimanfaatkan untuk merancang gagasan kota cerdas dan memanfaatkan peluang perkembangan Internet

di masa depan menawarkan untuk tidak hanya menghasilkan modal intelektual tetapi juga menciptakan kekayaan

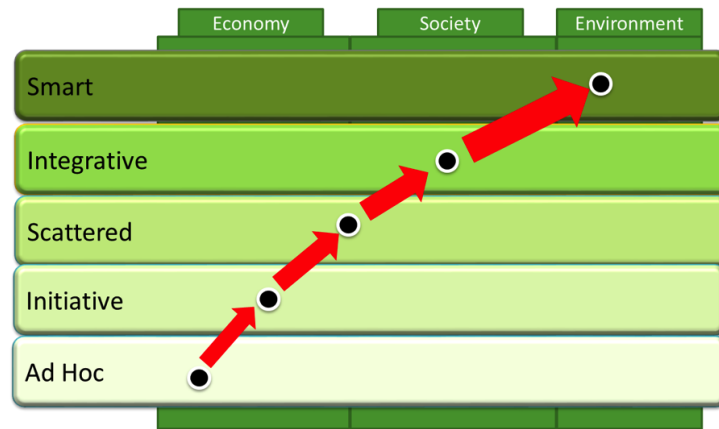


Gambar 3-6. Para pemangku kepentingan *Smart City*

Secara umum peran dari stakeholder *Smart City* dalam konteks *triple helix* maupun *quadruple helix* memiliki peran tersendiri. Dalam konteks stakeholder di atas pengembangan *Smart City* akan melibatkan (1) Pemerintah sebagai penyedia regulasi untuk pengembangan *Smart City*, (2) Akademisi sebagai generator atau konseptor, penggerak mengembangkan riset-riset terkait pengembangan *Smart City*, serta (3) Industri yang dapat secara langsung atau sebagai partner melakukan implementasi inisiasi-inisiasi cerdas yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kota dan memaksimalkan potensi kota. Stakeholder ini dapat terus berkembang dengan keberadaan (4) komunitas yang dapat berperan sebagai generator maupun implementator gerakan *Smart City*.

3.6. Tingkat Kematangan

Sebuah level kematangan dipetakan dalam tingkatan khusus dengan masing-masing mensyaratkan suatu kondisi melalui indikator dalam beberapa tahap. Tingkat kematangan berdasarkan GSCM terdiri dari *ad hoc*, *initiative*, *scattered*, *integrative*, dan *smart*. Lebih jelas terlihat pada gambar 3-7.



Gambar 3-7.Level Kematangan GSCM

Level kematangan dipetakan melalui berdasar masing-masing pemungkin dan masing-masing karakteristik yang diukur. Rincian tingkat kematangan tersebut dapat dipetakan pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4 Matrik Indikator Kematangan GSCM

Tingkat	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart environment</i>
Ad hoc	<p>Pertumbuhan ekonomi sangat rendah</p> <p>Dukungan layanan TIK sebaian besar masih bertumpu pada proses manual</p> <p>Sebagian besar layanan tidak didukung dengan rencana pengembangan</p>	<p>Kehidupan sosialisasi yang tidak layak.</p> <p>Keamanan dan kenyamanan yang tidak dapat ditoleransi.</p> <p>Dukungan layanan TIK sebaian besar masih bertumpu pada proses manual</p>	<p>Lingkungan yang tidak layak huni (<i>intolerable</i>)</p> <p>Dukungan layanan TIK sebagian besar masih bertumpu pada proses manual</p> <p>Sebagian besar layanan tidak didukung dengan</p>

Tingkat	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart environment</i>
	<p>dan pengelolaan yang baik</p> <p>Masyarakat tidak memiliki kemampuan dan akses terhadap TIK</p>	<p>Sebagian besar layanan tidak didukung dengan rencana pengelolaan yang baik</p> <p>Masyarakat tidak memiliki kemampuan dan akses terhadap TIK</p>	<p>rencana pengelolaan yang baik</p> <p>Masyarakat tidak memiliki kemampuan dan akses terhadap TIK</p>
<i>Initiative</i>	<p>Pertumbuhan ekonomi rendah</p> <p>Dukungan TIK sudah mulai diperhitungkan, meskipun secara parsial</p> <p>Mulai terdapat rencana pengelolaan tapi implementasi/penerapan belum maksimal</p> <p>Masyarakat kurang memiliki kemampuan dan akses terhadap TIK</p>	<p>Kehidupan sosial tidak layak.</p> <p>Keamanan dan kenyamanan yang tidak diinginkan.</p> <p>Dukungan TIK sudah mulai diperhitungkan, meskipun secara parsial</p> <p>Mulai terdapat rencana pengelolaan tapi implementasi/penerapan belum maksimal</p> <p>Masyarakat kurang memiliki kemampuan dan akses terhadap TIK</p>	<p>Lingkungan yang tidak layak huni (<i>undesireable</i>)</p> <p>Dukungan TIK sudah mulai diperhitungkan, meskipun secara parsial</p> <p>Mulai terdapat rencana pengelolaan tapi implementasi/penerapan belum maksimal</p> <p>Masyarakat kurang memiliki kemampuan dan akses terhadap TIK</p>

Tingkat	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart environment</i>
Scattered	<p>Pertumbuhan ekonomi sedang</p> <p>Dukungan layanan TIK mulai besar tapi aplikasi dan data masih tersebar</p> <p>Rencana pengelolaan seluruhnya diimplementasikan namun belum didukung operasional yang baik</p> <p>Masyarakat cukup memiliki kemampuan dan akses terhadap TIK</p>	<p>Kehidupan sosial kurang layak. Permasalahan <i>uncomfortable</i></p> <p>Dukungan layanan TIK mulai besar tapi aplikasi dan data masih tersebar</p> <p>Rencana pengelolaan seluruhnya diimplementasikan namun belum didukung operasional yang baik</p> <p>Masyarakat cukup memiliki kemampuan dan akses terhadap TIK</p>	<p>Lingkungan yang kurang layak huni (<i>uncomfortable</i>)</p> <p>Dukungan layanan TIK mulai besar tapi aplikasi dan data masih tersebar</p> <p>Rencana pengelolaan seluruhnya diimplementasikan namun belum didukung operasional yang baik</p> <p>Masyarakat cukup memiliki kemampuan dan akses terhadap TIK</p>
Integrative	<p>Pertumbuhan ekonomi tinggi</p> <p>Dukungan layanan TIK mulai memperlihatkan kolaborasi antar sistem</p> <p>Tatakelola dengan rencana dan pengembangan serta operasional dan pengawasan yang mulai menyeluruh</p>	<p>Kehidupan sosial cukup layak aman dan nyaman , permasalahan <i>tolerable</i></p> <p>Dukungan layanan TIK mulai memperlihatkan kolaborasi antar sistem</p> <p>Tatakelola dengan rencana dan pengembangan serta operasional dan</p>	<p>Lingkungan yang cukup layak huni dengan permasalahan lingkungan <i>tolerable</i></p> <p>Dukungan layanan TIK mulai memperlihatkan kolaborasi antar sistem</p> <p>Tatakelola dengan rencana dan pengembangan serta operasional dan</p>

Tingkat	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart environment</i>
	Masyarakat memiliki kemampuan dan akses yang baik dalam penggunaan TIK	<p>pengawasan yang mulai menyeluruh</p> <p>Masyarakat memiliki kemampuan dan akses yang baik dalam penggunaan TIK</p>	<p>pengawasan yang mulai menyeluruh</p> <p>Masyarakat memiliki kemampuan dan akses yang baik dalam penggunaan TIK</p>
Smart	<p>Pertumbuhan ekonomi sangat tinggi</p> <p>Dukungan layanan, infrastruktur dan tatakelola yang menghasilkan layanan terintegrasi yang diakses secara <i>ubiquotus</i></p> <p>Tatakelola yang baik dengan rencana, pengembangan, operasional dan pengawasan secara menyeluruh</p> <p>Masyarakat memiliki kemampuan dan akses yang sangat baik dalam penggunaan TIK</p>	<p>Kehidupan sosial layak aman dan nyaman , permasalahan <i>acceptable</i></p> <p>Dukungan layanan, infrastruktur dan tatakelola yang menghasilkan layanan terintegrasi yang diakses secara <i>ubiquotus</i></p> <p>Tatakelola yang baik dengan rencana, pengembangan, operasional dan pengawasan secara menyeluruh</p> <p>Masyarakat memiliki kemampuan dan akses</p>	<p>Lingkungan yang cukup layak huni dengan permasalahan lingkungan <i>Acceptable</i></p> <p>Dukungan layanan, infrastruktur dan tatakelola yang menghasilkan layanan terintegrasi yang diakses secara <i>ubiquotus</i></p> <p>Tatakelola yang baik dengan rencana, pengembangan, operasional dan pengawasan secara menyeluruh</p> <p>Masyarakat memiliki kemampuan dan akses</p>

Tingkat	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart environment</i>
		yang sangat baik dalam penggunaan TIK	yang sangat baik dalam penggunaan TIK

3.7. Analisis Prioritas

Analisis prioritas dilakukan untuk memilih inisiatif yang digunakan untuk tercapainya target *Smart City*. Dalam konteks ini metode McFarland merupakan salah satu metode yang banyak digunakan dalam melakukan analisis terhadap suatu sistem operasional suatu organisasi. Konsep ini terdiri dari 4 kuadran yang mendefinisikan tingkat kepentingan suatu strategi dalam organisasi. Kuadran tersebut di antaranya adalah :

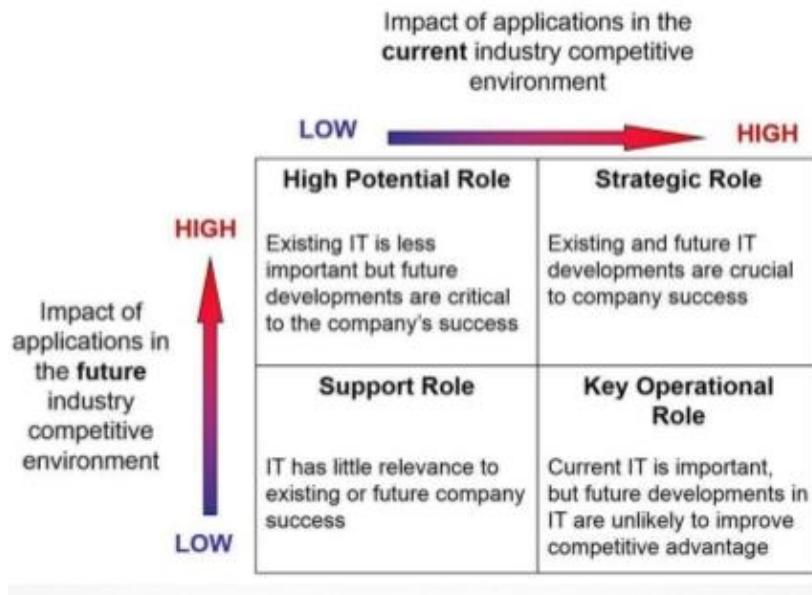
- a. Kuadran 1 merupakan kuadran *Support*.

Pada Kuadran ini setiap inisiatif adalah aktivitas yang mendukung terhadap aktifitas utama pemerintah kota. Keberadaannya saat ini masih belum memberikan pengaruh yang besar. Keberadaan aktifitas ini mendukung kinerja kota namun dengan tidak adanya sistem ini atau gagalnya sistem ini bisnis atau layanan kota masih tetap berjalan.

- b. Kuadran 2 merupakan kuadran *Operational*.

Pada kuadran ini inisiatif yang dikembangkan memberikan kemudahan pada pelayanan kota. Keberadaan layanan sangat memberikan pengaruh pada lancarnya layanan kota.

McFarlan's Grid



Gambar 3-8 McFarlan's Grid

- c. Kuadran 3 merupakan kuadran *High Potential*.

Kuadran ini menunjukkan bahwa inisiatif merupakan *competitive Value* untuk pelayanan kota. Inisiasi ini berpotensi besar dalam kesuksesan dalam melakukan pelayanan di area pelayanan kota. Integrasi sangat dipentingkan untuk kuadran ini

- d. Kuadran 4 merupakan kuadran *Strategic*.

Kuadran ini menempatkan sebagai kuadran yang paling berpengaruh dan merupakan *core* bisnis dari layanan kota. Inisiatif yang muncul sangat membantu dalam menjalankan operasional kota.

4. Tinjauan Kabupaten Purbalingga

4.1. Kondisi Umum Wilayah

Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas 77.764,122 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa, 15 kelurahan, 886 dusun, 1.530 RW, dan 5.058 RT. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Banyumas.

Di Kabupaten Purbalingga terdapat 5 Kawasan rawan bencana alam, meliputi kawasan rawan bencana banjir; kawasan rawan bencana tanah longsor; kawasan rawan bencana kekeringan; kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet; dan kawasan rawan bencana angin topan. Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 12.245 hektar, kawasan rawan bencana tanah longsor memiliki luas kurang lebih 16.510 hektar, kawasan rawan bencana kekeringan memiliki luas kurang lebih 29.044 hektar, kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet seluas kurang lebih 8.015 hekta, dan kawasan rawan bencana angin topan seluas kurang lebih 41.532 hektar.

Penduduk Kabupaten Purbalingga hasil proyeksi BPS tahun 2015 berjumlah 898.376 jiwa yang terdiri dari 443.915 laki-laki dan 454.461 perempuan, atau tumbuh sebesar 0,48 persen dari tahun sebelumnya. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun laju penduduk Kabupaten Purbalingga mengalami perlambatan pertumbuhan dari 1,36 persen pada tahun 2010 turun secara bertahap menjadi 1,14 persen tahun 2011; 1,11 persen tahun 2012; 1,10 persen tahun 2013; 1,06 persen pada tahun 2014 dan 0,48 persen tahun 2015.

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 sebesar 1.150 jiwa/km², tertinggi di Kecamatan Purbalingga sebesar 3.963 jiwa/km², selanjutnya Padamara 2.436 jiwa/km², dan Kecamatan Kalimanah sebesar 2.434 jiwa/km². Sementara itu kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Karangjambu 571 jiwa/km², selanjutnya Kecamatan Karangreja 839 jiwa/km². Sex ratio atau rasio jenis kelamin rasio jenis kelamin Kabupaten Purbalingga tahun 2014 tercatat sebesar 97,65 yang artinya diantara 100 penduduk perempuan terdapat kurang lebih 98 penduduk laki-laki atau dengan kata lain penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi; pada saat ini menggunakan tahun dasar 2010. Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) di mana aktivitas ekonomi dibagi atas 9 sektor lapangan usaha, sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009, yang membagi aktivitas ekonomi menjadi 17 kategori. Capaian PDRB di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2011-2015. Kenaikan tersebut terjadi baik kepada capaian PDRB ADHB dan ADHK atas Dasar Tahun 2010.

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Walaupun demikian kategori Pertanian masih

memegang peranan yang cukup besar di Kabupaten Purbalingga, tercatat hingga 2015 peranannya masih bertengger di 29,80 persen. Peranan terbesar selanjutnya diisi oleh kategori C yaitu Industri Pengolahan yang berada pada kisaran 25,72 persen. Peranan terendah terjadi pada kategori D, Pengadaan Listrik dan Gas tahun 2015 hanya memberikan peran sebesar 0,04 persen.

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran tingkat perubahan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dihitung menggunakan rumusan pertumbuhan PDRB ADHK atas dasar tahun 2010. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga sebesar 5,67 persen kemudian naik menjadi 5,67% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 5,79 persen, namun pada tahun 2013 menurun menjadi 5,61 persen, dan pada tahun 2014 naik lagi menjadi sebesar 5,86 persen, dan tahun 2015 pertumbuhan adalah 5,39 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 berada pada peringkat ke-3 diantara Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga sudah diatas capaian Jawa Tengah sebesar 5,42 persen.

Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa potensi daerah, utamanya dalam bidang perindustrian dan juga wisata. Dalam hal industri, Kabupaten Purbalingga memiliki reputasi sebagai produsen knalpot dan juga bulu mata sintetis kualitas dunia. Dalam bidang pariwisata, Purbalingga memiliki beberapa lokasi wisata yang ternama, yakni air terjun Owabong, taman bunga Kutabawa, Goa Lawa, Kebun Stroberi Pratin, dan Alun-alun Purbalingga.

4.2. Arahana Strategis Pemerintahan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan beberapa permasalahan utama di dalam RPJMD untuk diselesaikan dalam tahun 2016-2021. Adapun beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan: peningkatan rumah layak huni, jamban yang layak, pemenuhan kebutuhan pangan.
2. Pendidikan: peningkatan HLS, RLS, APK, sarana-prasarana pendidikan, kualitas dan ketersediaan SDM tenaga pendidik, pemerataan akses pendidikan.
3. Kesehatan: Peningkatan IPM, UHH, cakupan puskesmas untuk layanan persalinan, akses sanitasi, program desa Open Defecation Free, penanganan AIDS.
4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan, prasarana irigasi, produk hukum terkait penataan bangunan dan lingkungan, pelaksanaan sertifikasi laik fungsi gedung.
5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana wilayah dan prasarana pemukiman, pengurangan kawasan kumuh, akses terhadap sanitasi dan air bersih, penanganan persampahan, dan pemenuhan kebutuhan listrik.
6. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat: Meningkatkan partisipasi politik rakyat, pembangunan karakter dan pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan kesetiakawanan sosial dan semangat patriotisme dan nasionalisme, peningkatan kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara.
7. Sosial: pemerataan kesejahteraan sosial, penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemberdayaan sosial.
8. Tenaga kerja: peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemfasilitasan penempatan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi buruh, penurunan angka pengangguran
9. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: pengarusutamaan gender, kebijakan khusus terkait pemenuhan hak-hak anak, upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Pertanian: Menyediakan lahan yang memadai untuk memperlancar proses pembangunan, pemetakan aset.
11. Lingkungan Hidup: Mengendalikan komponen ekosistem, menjaga daur hidrologi, pengendalian penggunaan lahan.

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Meningkatkan efektivitas fungsi lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan di lingkungan desa.
13. Pengendalian Penduduk dan KB: Meningkatkan kepesertaan KB, mengurangi pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesejahteraan keluarga.
14. Perhubungan: Peningkatan kapasitas prasarana jalan dan kualitas angkutan darat, pengembangan sistem transportasi yang efektif dan efisien, menambah kebutuhan terminal penumpang.
15. Komunikasi dan Informatika: Meningkatkan jumlah website yang dimiliki SKPD, meningkatkan intensitas update informasi, meningkatkan jumlah layanan publik online.
16. Pembangunan Ekonomi: peningkatan PDRB, meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, meningkatkan kepariwisataan, peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat, peningkatan kualitas manajemen koperasi, peningkatan iklim investasi.
17. Kepemudaan dan Olah raga: Peningkatan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olah raga, meningkatkan prestasi di bidang kepemudaan dan olah raga, meningkatkan sosialisasi bahaya narkoba.
18. Kebudayaan: Meningkatkan kebijakan dan program untuk apresiasi seni budaya, meningkatkan intensitas kajian, fasilitasi, pementasan, serta pengiriman duta seni, pelestarian cagar budaya.
19. Perpustakaan: Peningkatan jumlah dan sarana-prasarana untuk perpustakaan.

4.3. Visi & Misi

Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 adalah “PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

- A. Misi 1: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat

Meningkatnya kesadaran politik rakyat sejalan dengan proses demokratisasi sebagai implikasi dari reformasi di segala aspek kehidupan mengakibatkan semakin menguatnya tuntutan masyarakat untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin menuntut terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan Misi ke-1 adalah: Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah.

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-1 meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, unsur penunjang urusan pemerintahan Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan, dan dinas-dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Statistik, Kearsipan, dan Urusan Persandian.

- B. Misi 2: Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.

Salah satu prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah terwujudnya lingkungan sosial yang aman, damai, dan tertib. Di sisi lain meningkatnya kesadaran politik masyarakat di tengah euforia demokrasi pasca reformasi harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengembangkan etika politik sehingga terhindar dari praktek demokrasi yang anarkis dan sebaliknya akan dapat diwujudkan kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat. Sedangkan

pembangunan bidang hukum dan HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan *good and clean governance*.

Perbedaan pemahaman terhadap keragaman agama dan budaya; perbedaan kondisi sosial-ekonomi; masalah kemiskinan dan kepadatan penduduk; berbagai permasalahan sosial lain seperti merebaknya peredaran miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, dan premanisme; serta kecenderungan meningkatnya kriminalitas, merupakan faktor-faktor potensial untuk timbulnya gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Tujuan Misi ke-2 adalah: Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Rasa Aman Dalam Masyarakat, dengan Sasaran : 1. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan perundangan termasuk peraturan daerah dan peraturan bupati 2. Menurunnya resiko bencana. 3. Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-2 meliputi dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Ketenteraman, Ketertian Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

C. Misi 3 : Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan Dan Papan Secara Layak

Salah satu prasyarat penanggulangan kemiskinan adalah dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama. Penanggulangan kemiskinan dipusatkan pada prioritas perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, air bersih, lingkungan hidup, sumber daya alam, rasa aman, dan berpartisipasi dengan memperhitungkan kemajuan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang semakin berkualitas, berakhlak mulia, beretika, serta memiliki jatidiri dan semangat nasionalisme.

Kebijakan dan program baik langsung maupun tidak langsung harus berdampak terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, sehingga kebijakan yang ada dapat mewujudkan pencegahan pewarisan kemiskinan dan advokasi keluarga miskin, pencegahan munculnya keluarga miskin baru, pengentasan keluarga miskin, dan pengembangan lingkungan yang kondusif bagi penanggulangan kemiskinan.

Tujuan Misi ke-3 adalah : 1. Meningkatnya ketahanan pangan, dengan Sasaran meningkatnya Status Pangan Masyarakat. 2. Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni, dengan Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat.

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-3 meliputi dinas yang melaksanakan Urusan Pangan dan sub urusan Perumahan.

D. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

Kualitas manusia dan kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan. Kualitas manusia dapat diukur dari aspek-aspek yang bersifat lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Kualitas manusia yang dicita-citakan di samping diukur dari beberapa hal tersebut, juga diukur dari kepribadian/jatidiri dan kecintaan terhadap kebudayaan dan tanah air serta tertanamnya semangat nasionalisme. Sedangkan kualitas kehidupan manusia diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar serta tersedianya secara memadai berbagai prasarana dan sarana guna terwujudnya kehidupan yang berkualitas.

Tujuan Misi ke-4 adalah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan Sasaran : 1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 3. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. 4. Meningkatnya kesejahteraan keluarga. 5. Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS, korban bencana dan kelompok masyarakat rentan lainnya. 6.

Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 7. Meningkatnya budaya gemar membaca. 8. Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar Budaya (BCG) serta Prestasi Seni. 9. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga.

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-4 meliputi dinas yang melaksanakan Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, serta Urusan Perpustakaan.

- E. Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

Pembangunan ekonomi menduduki posisi yang sangat strategis karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai hasil dari pembangunan ekonomi akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan semakin meningkatkan aktifitasnya dalam bidang ekonomi.

Upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata.

Tujuan Misi ke-5 adalah Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan Sasaran : 1. Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi

masyarakat. 2. Meningkatnya daya saing pariwisata. 3. Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri. 4. Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial. 5. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi Usaha Kecil dan Mikro (KUKM). 6. Meningkatnya produksi dan nilai tambah Sektor Pertanian. 7. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan. 8. Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau.

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-5 meliputi dinas yang melaksanakan Urusan Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Penanaman Modal, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Urusan Transmigrasi.

- F. Misi ke-6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai. Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana yang meliputi prasarana jalan, jembatan, irigasi dan pengairan, perumahan dan permukiman, prasarana persampahan, pemerintahan, perhubungan, serta berbagai prasarana wilayah lainnya.

Tujuan Misi ke-6 adalah : 1. Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman, Produktif dan Berkelanjutan, dengan Sasaran : a. Meningkatnya Akses dan Konektivitas Wilayah. b. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumberdaya Air yang Memadai. c. Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang d. Meningkatnya Bangunan Gedung Laik Fungsi e. Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas jasa konstruksi. 2.

Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman, dengan Sasaran : a. Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman. b. Meningkatnya Akses Aman Air Minum yang Berkelanjutan. c. Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik / RT. d. Meningkatnya Akses Pelayanan Persampahan e. Meningkatnya Layanan Sistem Drainase Perkotaan 3. Terwujudnya Tertib Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah, dengan sasaran Meningkatnya Kepastian Status Dan Pemanfaatan Tanah. 4. Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Orang Dan Barang, dengan sasaran Meningkatnya Manajemen, Kapasitas dan Kualitas Angkutan Jalan dan Udara. 5. Meningkatkan Kualitas dan Keterbukaan Informasi Publik, dengan sasaran Meningkatnya Implementasi e-Government dan Keterbukaan Informasi Publik. 6. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Desa, dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa.

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-6 meliputi dinas yang melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Urusan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Urusan Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

G. Misi ke-7 : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Eksplorasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktifitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti pencemaran air dan udara, timbulnya berbagai penyakit, merosotnya hasil tangkapan ikan sungai, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna khas/langka, munculnya lahan rusak termasuk deforestasi, terjadinya banjir dan tanah longsor, sulitnya mendapatkan air pada musim kemarau, berpindahnya aliran sungai, dan sebagainya.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai salah satu sumberdaya yang potensial juga belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun

mendatang. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Untuk mengantisipasi berbagai hal tersebut di atas dibutuhkan kebijakan besar yang bersifat kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan Misi ke-7 adalah Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati, dengan sasaran Terkendalinya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-7 meliputi dinas yang melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4.4. Sasaran Dan Program Kerja

Sesuai RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021, sebagai ukuran terwujudnya Kabupaten Purbalingga yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlak mulia, pembangunan Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik,
2. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat Purbalingga,
3. Terwujudnya Purbalingga yang aman, damai, dan demokratis berdasarkan hukum,
4. Terwujudnya masyarakat Purbalingga yang bermoral, beretika, berbudaya, dan memiliki jati diri,
5. Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

4.5. Indikator Kinerja Utama

4.5.1. Pendidikan

Indikator kinerja utama pembangunan pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Berdasarkan data tahun 2015, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Purbalingga sebesar 11,78 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 6,85 tahun. Berdasarkan strata pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar di Kabupaten Purbalingga sudah cukup baik yaitu sebesar 109

sedangkan APK SMP/Sederajat sebesar 100, dan APK Sekolah Menengah/Sederajat baru sebesar 52,47.

4.5.2. Kesehatan

Kinerja pembangunan kesehatan menjadi penentu utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator utama untuk menilai kinerja pembangunan manusia. Pada tahun 2015, IPM Kabupaten Purbalingga sebesar 67,02 dan menduduki peringkat ke 26 di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu komponen IPM adalah Usia Harapan Hidup (UHH). Usia Harapan Hidup masyarakat Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 72,80 tahun. Relatif rendahnya UHH Kabupaten Purbalingga antara lain karena beberapa indikator kinerja pembangunan kesehatan masih relatif rendah. Angka morbiditas di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 16,5 persen, Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan sebesar 132 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH), sedangkan Angka Kematian Bayi sebesar 10,12 per 1000 KH.

4.5.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator keberhasilan pengarusutamaan gender antara lain adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2014, IPG Kabupaten Purbalingga sebesar 90,12 (menempati urutan ke 24 di Provinsi Jawa Tengah). Sedangkan IDG Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 sebesar 71,03 (menempati urutan ke 11 di Provinsi Jawa Tengah).

4.5.4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tingkat kemajuan desa mencerminkan efektivitas fungsi lembaga pemerintahan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 0,6394.

4.5.5. Pembangunan Ekonomi

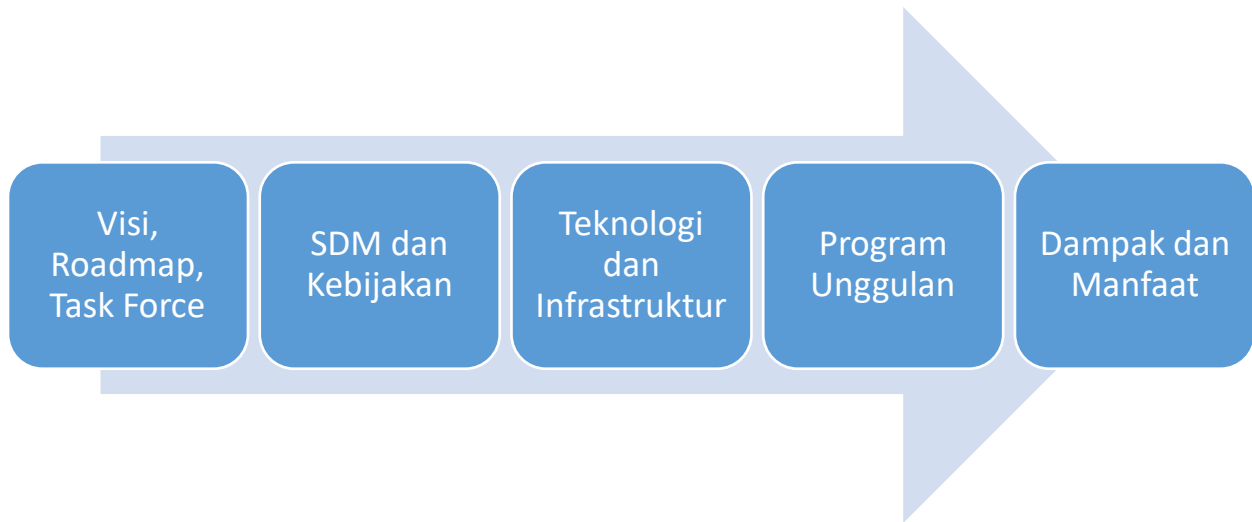
Pada tahun 2014 PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 15,95 juta, masih jauh lebih rendah dibanding PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 27,61 juta, dan PDB per kapita Nasional sebesar Rp. 41, 81 juta.

4.5.6. Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam tahun 2015, fasilitasi kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebanyak 6 (enam) kegiatan, sedangkan fasilitasi kegiatan olahraga sebanyak 26 kegiatan. Adapun prestasi olahraga Kabupaten Purbalingga di tingkat regional sebanyak 6 (enam) kejuaraan dan di tingkat nasional sebanyak 1 (satu) kejuaraan.

5. Pentahapan Langkah Menuju *Smart City* Purbalingga

Berikut ini merupakan tahapan realisasi *Smart City* Kabupaten Purbalingga



Gambar 5-1. Alur Tahapan Realisasi Smart City

Dalam mewujudkan *Smart City* Purbalingga, maka langkah-langkah yang perlu diambil oleh pengambil tindakan di kalangan pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat diturunkan ke dalam lima langkah utama sebagai berikut:

1. Penyusunan visi, misi, rencana, dan strategi perwujudan *Smart City* Purbalingga,
2. Penguatan SDM dan penyusunan kebijakan pendukung,
3. Pemantapan teknologi dan infrastruktur,
4. Penentuan program unggulan,
5. Perluasan dampak dan manfaat.

Meskipun pada dasarnya kelima tahapan tersebut secara logika bersifat sekuensial dan berurutan, namun pada pelaksanaannya keempat tahapan setelah tahapan pertama tersebut dapat dilaksanakan secara paralel, dengan syarat bahwa beberapa langkah pendahulu untuk kesuksesan langkah pada tingkat lanjutannya telah dilaksanakan terlebih dahulu. Langkah pertama yakni penyusunan visi dan rencana kerja merupakan syarat wajib yang harus diselesaikan sebelum menjalankan langkah-langkah selanjutnya, karena pada langkah pertama ini ditetapkan tujuan pelaksanaan konsep *Smart City* dan strategi pencapaiannya. Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing langkah tersebut diberikan melalui sub pembahasan berikut.

5.1. Tahap Pertama: Visi dan Rencana Kerja

Pada tahap pertama ini perlu disusun beberapa dokumen dan tujuan utama yang akan menjadi arahan utama di dalam mewujudkan tercapainya Purbalingga *Smart City*. Adapun beberapa langkah utama yang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum menjalankan strategi pencapaian *Smart City* di Purbalingga adalah:

1. Visi kebijakan *Smart City* untuk daerah, yang mencakup:
 - Tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan konsep *Smart City* untuk Purbalingga, termasuk tingkatan yang diharapkan dari masing-masing aspek *Smart City* untuk Kabupaten Purbalingga.
 - Fokus utama dalam realisasi konsep *Smart City* Purbalingga, di mana ini dapat disesuaikan dengan strategi pembangunan Purbalingga yang tercantum dalam RPJMD, namun difokuskan pada beberapa aspek tertentu yang dapat menjadi ciri khas dan keunggulan Kabupaten Purbalingga.
 - Strategi dan pendekatan, yang memberikan gambaran secara umum tentang bagaimana mencapai tujuan utama dari realisasi Purbalingga *Smart City*.
2. Roadmap *Smart City* Purbalingga, yang mencakup:
 - Penyusunan rencana realisasi visi kebijakan *Smart City* secara mendetail dalam tahap demi tahap, dalam jangka waktu pelaksanaan tertentu.
3. *Smart City* Task Force/ Tim Pelaksana Kerja:

- Tim perencana, pelaksana, dan pengawas implementasi kebijakan *Smart City* sesuai roadmap yang telah ditetapkan.
- Dapat tersusun dari perwakilan OPD dan/atau stakeholder terkait, termasuk akademisi maupun pihak swasta yang dapat berkontribusi dalam pembangunan *Smart City* Purbalingga.

5.2. Tahap Kedua: Penguatan SDM dan Kebijakan

Persiapan SDM untuk *Smart City*, mencakup strategi dan pelaksanaan di dalam:

1. Penguatan mindset, etos kerja, dan penetapan standar pelayanan dalam semua aspek kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. Penyesuaian jumlah SDM, tupoksi, hak dan kewajiban terhadap kebutuhan operasional secara optimal dari Kabupaten Purbalingga *Smart City*.
3. Penguatan keahlian dan keterampilan dalam pelayanan *Smart City*, utamanya bagi SDM yang secara langsung bersentuhan dengan perangkat TIK yang vital di dalam pelayanan masyarakat berorientasi *Smart City*.
4. Persiapan kebijakan untuk *Smart City* dalam bentuk perundangan maupun peraturan daerah untuk menjaga pelaksanaan program *Smart City* agar tetap berada di dalam koridor hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
5. Penetapan roadmap dan prosedur dalam kerangka peraturan pemerintah, dengan demikian program Purbalingga *Smart City* ini sejalan dengan arahan program *Smart City* maupun *Smart City* dari pemerintah pusat.
6. Konsultasi dengan kementerian terkait (Pedesaan, Dalam Negeri, Kominfo) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam pelaksanaan program-program *Smart City* Purbalingga.

5.3. Tahap Ketiga: Pemantapan Teknologi dan Infrastruktur

Dengan posisi teknologi dan infrastruktur yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan konsep *Smart City* Kabupaten Purbalingga, maka pemantapan teknologi dan infrastruktur TIK di Kabupaten Purbalingga perlu untuk dilakukan secara bertahap mulai dari tahun pertama pelaksanaan program *Smart City*. Adapun pengembangan dan implementasinya dapat dilakukan secara bertahap, namun dalam setiap

tahapannya perlu ada suatu layanan baru yang dapat direalisasikan. Adapun beberapa langkah di dalam tahapan ini termasuk:

- Pemerataan teknologi dan perkuatan infrastruktur pendukung untuk mendukung pelayanan secara cepat, tepat, dan terukur. Infrastruktur yang dimaksud termasuk perlengkapan komputer maupun TIK terkait, hingga jaringan komunikasi yang menghubungkan kantor-kantor layanan pemerintah utama di seluruh Kabupaten Purbalingga.
- Implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan masyarakat untuk mencapai visi *Smart City* sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, utamanya dalam meningkatkan ketepatan dan kecepatan di dalam pelayanan.

5.4. Tahap Keempat: Penentuan Program Unggulan

Dalam tahapan ini, Kabupaten Purbalingga yang telah didukung oleh infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum masing-masing SKPD dapat menentukan satu atau beberapa program unggulan yang sejalan dengan potensi kedaerahan. Adanya program unggulan ini dapat menjadi *pilot project* atau *success story* yang dapat membuka pintu gerbang bagi program-program khusus berwawasan *Smart City* lainnya di Kabupaten Purbalingga. Adapun beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- Menentukan program utama untuk ditingkatkan dan disempurnakan, sesuai dengan visi, potensi, dan keistimewaan daerah.
- Optimasi dan peningkatan dukungan dari teknologi dan infastruktur *Smart City* yang telah disempurnakan dari tahapan-tahapan sebelumnya untuk mewujudkan program unggulan.

5.5. Tahap Kelima: Perluasan Dampak dan Manfaat

Tahap kelima dilaksanakan apabila Kabupaten Purbalingga telah memiliki satu atau beberapa program unggulan yang berjalan dengan baik dan dianggap sukses. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk berkontribusi kepada masyarakat Indonesia yang lebih

luas dengan mendukung meluasnya program-program berorientasi *Smart City* di Indonesia. Adapun beberapa langkah yang dapat diwujudkan dalam tahapan ini adalah:

1. Memberikan inspirasi dan motivasi kepada daerah lain yang berkembang dengan konsep *Smart City*.
2. Berbagi kiat/ *success story* untuk implementasi *Smart City*.
3. Membagikan program unggulan untuk direplikasikan di daerah lain utamanya yang memiliki potensi atau karakteristik yang serupa dengan Kabupaten Purbalingga.
4. Membangun cluster *Smart City* dengan daerah-daerah sekeliling untuk memperkuat keistimewaan/ potensi daerah.

6. Pengembangan Master Plan

6.1. Strategic Alignment

Tahapan ini merupakan proses penyelarasan antara permasalahan, potensi dan rencana pengembangan *Smart City* Kabupaten Purbalingga.

6.1.1. Pemetaan permasalahan, Isu Strategis dan Capaian RPJMD, Komponen Pengembangan *Smart City*

Berikut ini merupakan pemetaan permasalahan, isu strategis dan capaian RPJMD serta komponen-komponen dalam pengembangan *Smart City*.

- a. Isu strategis Kabupaten Purbalingga berdasar RPJMD

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Purbalingga dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kemiskinan
 - a. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Purbalingga sebesar 176.040 atau 19,75 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga.
 - b. Sebagian menempati rumah yang tidak layak huni sebanyak 27.533 rumah
 - c. Tingkat konsumsi pangan masyarakat masih di bawah standar pola pangan harapan sebesar 87,90.
2. Pendidikan

- a. Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 11,78 tahun sedangkan rata-rata lama sekolah sebesar 6,85 tahun
 - b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar sebesar 109, sedangkan APK SMP/ sederajat sebesar 100, dan APK SMA/ sederajat 52,47.
 - c. Dibutuhkan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan baik dari sisi kapasitas maupun kualitasnya antara lain berupa ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang guru, kamar mandi dan WC, meubelair, alat peraga dan sebagainya.
 - d. Pemerataan akses layanan pendidikan khususnya bagi keluarga miskin
3. Kesehatan
- a. Usia harapan hidup (UHH) sebesar 72,80 tahun
 - b. Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan sebesar 132 per 100.000, (cukup tinggi), sedangkan angka kematian bayi sebesar 10,12 per 1000 KH
 - c. Puskesmas banyak yang belum terakreditasi, rumah sakit belum terakreditasi
 - d. Relatif rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana sanitasi
 - e. budaya buang air besar di tempat terbuka
 - f. Prevalensi HIV-AIDS cukup tinggi
4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan
 - b. perlu peningkatan prasarana irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian
 - c. perlu adanya produk hukum terkait penataan bangunan dan lingkungan serta peningkatan pelaksanaan sertifikasi laik fungsi gedung
5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana wilayah dan prasarana permukiman.
 - b. Masyarakat belum memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih.
 - c. Penanganan persampahan belum optimal
 - d. Sebagian masyarakat belum menikmati fasilitas listrik
6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu
 - b. Penurunan kesetiakawanan sosial
 - c. Penurunan semangat gotong royong
 - d. Penurunan kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara
7. Sosial
- a. Bantuan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih terbatas.
8. Tenaga Kerja
- a. Pengurangan angka pengangguran
 - b. Peningkatan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja
9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Peningkatan pengarusutamaan gender
 - b. Peningkatan IPG dan IDG
 - c. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Pertanian
- a. Pembebasan lahan
 - b. Pemetaan aset tanah sehingga belum bersertifikat
11. Lingkungan Hidup
- a. Pengurangan tanah kering/tegalan
 - b. Pengurangan sawah
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM)
13. Pengendalian Penduduk dan KB
- a. Pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi
 - b. Peningkatan kepesertaan KB aktif
 - c. Peningkatan jumlah keluarga sejahtera
14. Perhubungan
- a. Peningkatan kapasitas dan kualitas angkutan darat
 - b. Pengembangan sistem transportasi yang efektif dan efisien
 - c. Peningkatan jumlah terminal
15. Komunikasi dan Informatika

- a. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi

16. Pembangunan Ekonomi

- a. Pendapatan perkapita masyarakat relatif rendah
- b. peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat yang meliputi sektor pertanian dalam arti luas, industri rakyat, dan sebagainya
- c. peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana perdagangan terutama melalui revitalisasi pasar-pasar tradisional
- d. pengembangan kehidupan berkoperasi dan peningkatan kualitas manajemen koperasi
- e. peningkatan iklim investasi

17. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Fasilitas kegiatan kepemudaan dan olahraga masih perlu untuk ditingkatkan
- b. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba

18. Kebudayaan

- a. peningkatan apresiasi terhadap seni budaya khususnya yang bersifat tradisional.
- b. Intensitas kegiatan kajian, fasilitasi, pementasan serta pengiriman duta seni maupun pembinaan organisasi dan kelompok kesenian ditingkatkan
- c. kekayaan warisan sejarah berupa benda-benda cagar budaya yang sangat banyak di Kabupaten Purbalingga perlu terus dipelihara

19. Perpustakaan

- a. Budaya membaca masih rendah

Berikut ini merupakan isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD untuk diselesaikan selama 5 tahun kedepan.

1. Kemiskinan

- a. Pengurangan angka kemiskinan
- b. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

2. Pembangunan Manusia

- a. Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) dengan upaya peningkatan tarap kesehatan
- b. Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS)
- c. Peningkatan rata-rata Lama Sekolah (RLS)
- d. Peningkatan kemampuan daya beli dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan meningkatkan pendapatan.
- e. Peningkatan apresiasi terhadap seni budaya daerah dalam memperkuat karakter dan jati diri bangsa

3. Pembangunan Ekonomi

- a. Pengembangan serta peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian, perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri kecil dan industri rumah tangga serta koperasi
- b. Pengembangan potensi kepariwisataan Kabupaten Purbalingga terutama potensi alam untuk didayagunakan secara optimal

4. Infrastruktur

- a. Pengembangan pangkalan TNI Angkatan Udara Wirasabaya menjadi Bandar Udara
- b. Peningkatan kapasitas dan kualitas bendung dan saluran irigasi
- c. Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana perkotaan serta penataan kawasan perkotaan
- d. Optimalisasi pengelolaan sampah

5. Wawasan Kebangsaan dan Kehidupan beragama

- a. Peningkatan semangat nasionalisme dan patriotisme
- b. Upaya pengembangan dan penanaman nilai-nilai moral yang positif
- c. Dorongan untuk hidup beragama dengan lebih baik

6. Lingkungan Hidup

- a. Mitigasi/pengurangan emisi gas rumah kaca disektor transportasi, peningkatan tutupan lahan, pertanian rendah emisi, dan pengelolaan limbah.
 - b. Pencegahan dan pengendalian kerusakan fungsi lingkungan hidup serta rehabilitasi terhadap lingkungan yang telah mengalami kerusakan
7. Tata kelola Pemerintahan
- a. Peningkatan aparatur pemerintah daerah yang profesional
 - b. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah

6.1.2. Pemetaan permasalahan, isu strategis dan komponen Smart City

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang didasarkan pada RPJMD, maka dapat dipetakan terhadap komponen *Smart City* sebagai berikut:

Tabel 5. Pemetaan Visi dan Misi, Tujuan terhadap Sasaran dan Komponen *Smart City*

Misi	Tujuan	Sasaran	Komponen <i>Smart city</i>
1	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah	Smart Government
2	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Rasa Aman Dalam Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan perundangan termasuk peraturan daerah dan peraturan bupati	Smart Living
		Menurunnya resiko bencana	
		Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan	
3	Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatnya Status Pangan Masyarakat	Smart Living
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat.	
4	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	
		Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga	
		Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS, korban bencana dan kelompok masyarakat rentan lainnya	

Misi	Tujuan	Sasaran	Komponen <i>Smart city</i>
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak Meningkatnya budaya gemar membaca Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar Budaya (BCG) serta Prestasi Seni Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga.	
5	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat,	Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Meningkatnya daya saing pariwisata Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi Usaha Kecil dan Mikro (KUKM) Meningkatnya produksi dan nilai tambah Sektor Pertanian Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan	Smart Economy

Misi	Tujuan	Sasaran	Komponen <i>Smart city</i>
		Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau.	
6	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman, Produktif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Akses dan Konektivitas Wilayah	Smart Mobility
		Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumberdaya Air yang Memadai.	Smart Environment
		Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		Meningkatnya Bangunan Gedung Laik Fungsi	
		Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas jasa konstruksi	
7	Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	
		Meningkatnya Akses Aman Air Minum yang Berkelanjutan	
		Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik / RT	
		Meningkatnya Akses Pelayanan Persampahan	
		Meningkatnya Layanan Sistem Drainase Perkotaan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Komponen <i>Smart city</i>
	Terwujudnya Tertib Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya Kepastian Status Dan Pemanfaatan Tanah	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Orang Dan Barang	Meningkatnya Manajemen, Kapasitas dan Kualitas Angkutan Jalan dan Udara	Smart Mobility
	Meningkatkan Kualitas dan Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Implementasi e-Government dan Keterbukaan Informasi Publik	Smart Government
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Desa	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa.	Smart Govenrment
	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati	Terkendalnya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.	Smart Environment

Tabel 6. Pemetaan Sasaran terhadap Permasalahan dan Isu Strategis

Komponen <i>Smart city</i>	Sasaran	Tujuan	Permasalahan dan Isu Strategis
Smart Economy	Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat,	Pembangunan Ekonomi, Kemiskinan, Ketenaga kerjaan
Smart Economy	Meningkatnya daya saing pariwisata	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat,	
Smart Economy	Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat,	
Smart Economy	Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat,	
Smart Economy	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi Usaha Kecil dan Mikro (KUKM)	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat,	
Smart Economy	Meningkatnya produksi dan nilai tambah Sektor Pertanian	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat,	

Komponen <i>Smart city</i>	Sasaran	Tujuan	Permasalahan dan Isu Strategis
Smart Economy	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat,	
Smart Economy	Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat,	
Smart Environment	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumberdaya Air yang Memadai.	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman, Produktif dan Berkelanjutan	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Perumahan dan /kawasan
Smart Environment	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman, Produktif dan Berkelanjutan	
Smart Environment	Meningkatnya Bangunan Gedung Laik Fungsi	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan	

Komponen <i>Smart city</i>	Sasaran	Tujuan	Permasalahan dan Isu Strategis
		Ruang yang Aman, Produktif dan Berkelanjutan	
Smart Environment	Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas jasa konstruksi	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman, Produktif dan Berkelanjutan	
Smart Environment	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman	
Smart Environment	Meningkatnya Akses Aman Air Minum yang Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman	
Smart Environment	Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik / RT. d. Meningkatkan Akses Pelayanan Persampahan	Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman	
Smart Environment	Meningkatnya Layanan Sistem Drainase Perkotaan	Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman	
Smart Environment	Meningkatnya Kepastian Status Dan Pemanfaatan Tanah	Terwujudnya Tertib Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah	

Komponen <i>Smart city</i>	Sasaran	Tujuan	Permasalahan dan Isu Strategis
Smart Environment	Terkendalinya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati	
Smart Govenrment	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Desa	Peningkatan pelayanan publik, keterbukaan informasi publik
Smart Government	Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	
Smart Government	Meningkatnya implementasi e-Government dan Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatkan Kualitas dan Keterbukaan Informasi Publik	
Smart Living	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan perundangan termasuk peraturan daerah dan peraturan bupati	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Rasa Aman Dalam Masyarakat	Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, perumahan dan pemukiman,
Smart Living	Menurunnya resiko bencana	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Rasa Aman Dalam Masyarakat	ketentraman dan ketertiban umum, Perpustakaan

Komponen <i>Smart city</i>	Sasaran	Tujuan	Permasalahan dan Isu Strategis
Smart Living	Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Rasa Aman Dalam Masyarakat	
Smart Living	Sasaran meningkatnya Status Pangan Masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan	
Smart Living	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat.	Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni	
Smart Living	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
Smart Living	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
Smart Living	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
Smart Living	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
Smart Living	Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS, korban bencana dan kelompok masyarakat rentan lainnya	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	

Komponen <i>Smart city</i>	Sasaran	Tujuan	Permasalahan dan Isu Strategis
Smart Living	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
Smart Living	Meningkatnya budaya gemar membaca	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
Smart Living	Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar Budaya (BCG) serta Prestasi Seni	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
Smart Living	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
Smart Mobility	Meningkatnya Akses dan Konektivitas Wilayah	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman, Produktif dan Berkelanjutan	Perhubungan
Smart Mobility	Meningkatnya Manajemen, Kapasitas dan Kualitas Angkutan Jalan dan Udara	Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Orang Dan Barang	

6.2. Analisis GAP

Analisis GAP dilakukan untuk mengetahui kekosongan atau jarak untuk memenuhi kondisi ideal *Smart City*. GAP ini akan diisi oleh inisiatif –inisiatif yang diperlukan oleh pemerintah Kabupaten untuk tercapainya Kabupaten yang cerdas sesuai dengan arahan pemerintah dan pengembangan *Smart City*. GAP tersebut akan dicapai dengan mengidentifikasi komponen *Smart City* yang sudah diidentifikasi sebelumnya.

6.2.1. Smart Economy

Smart Economy dalam konteks pengembangan Kabupaten Purbalingga akan terwujud jika kebutuhan pokok masyarakat terjamin, peningkatan dan pemerataan ekonomi melalui perluasan lapangan kerja, investasi di pusat kegiatan industri dan pariwisata, serta pengelolaan sumberdaya daerah yang dimiliki.

6.2.1.1. Pusat ekonomi

Pusat ekonomi dalam konsep ini adalah pasar yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi, penanaman modal, ketenagakerjaan, pertanian dan perhutanan serta sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten. Kondisi ideal dari pusat ekonomi ini seluruh kegiatan dapat dimonitor dan dipantau keberadaannya. Permasalahan yang muncul dari kondisi pusat ekonomi adalah akses, fasilitas dan pemantauan terhadap pusat ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. GAP yang muncul berdasarkan kebutuhan kondisi ideal dapat dipenuhi dengan melakukan beberapa inisiasi sebagai berikut :

1. Kajian pembangunan dan pengembangan pasar beserta kebutuhan fasilitas di beberapa titik sesuai dengan area.
2. Pemantauan kondisi pasar melalui sistem informasi pengelolaan pasar yang digunakan untuk memantau dan harga yang bersumber dari pasar tradisional maupun modern.
3. Implementasi e-commerce untuk membantu meningkatkan pendapatan
4. Sistem Pengelola PAD yang dilakukan untuk melakukan proses penarikan dan pencatatan retribusi dari pasar dan pusat bisnis lainnya (e-retribusi)
5. Aplikasi pelaporan sistem keuangan daerah untuk informasi eksekutif.

6. Sistem informasi potensi daerah. Sistem ini dikembangkan secara online untuk menarik para investor terkait sumberdaya yang dapat menjadi potensi daerah untuk dikembangkan
7. Pengembangan database dan pemantauan penduduk miskin
8. Program pengembangan rumah layak huni untuk penduduk miskin sehingga tepat sasaran. Berintegrasi dengan sistem pencatatan dan pemantauan warga miskin
9. Sistem pencatatan dan pemantauan warga miskin
10. Sistem pemantauan ketenagakerjaan. Sistem yang dibuat untuk melakukan identifikasi lapangan kerja, pencari kerja serta distribusi para pencari kerja.

6.2.1.2. Industri

Permasalahan utama dalam industri adalah sumberdaya manusia, keilmuan dan teknologi, perijinan, pengelolaan dan permodalan yang masih sukar untuk diakses oleh masyarakat khususnya untuk UKM. Idealnya area industri ini dapat diidentifikasi dan diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi, akses dan fasilitas perijinan untuk mendirikan usaha. Berdasarkan permasalahan yang muncul di samping inisiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, beberapa inisiasi berikut dapat dikembangkan :

1. Penguatan SDM sebagai pelaku industri melalui pelatihan sesuai bidang industri yang dijalani (logam, makanan, dan lain sebagainya)
2. Sistem informasi penyediaan modal sebagai sistem yang melakukan pencatatan dan informasi ketersediaan modal untuk pengelolaan industri khususnya industri kecil
3. Identifikasi dan digitalisasi pemetaan data pelaku industri dan area industri untuk memudahkan konsumen mendapatkan hasil produksi.
4. Sistem perijinan online berbasis satu pintu untuk kemudahan dalam mendirikan industri khususnya industri kecil (IUMK)
5. Pengembangan area industri dan area pemasaran khusus yang digunakan untuk memasarkan produk daerah.
6. Pengembangan sistem pemasaran online terpadu yang digunakan produsen dalam rangka memasarkan produk.
7. Program promosi rutin yang dikelola pemerintah untuk seluruh industri

8. E-commerce untuk industri

6.2.1.3. Pariwisata

Permasalahan yang muncul dari pariwisata adalah akses dan infrastruktur terhadap potensi wisata yang dimiliki dan dikelola oleh para pemangku kepentingan area wisata. Kondisi ideal dari kondisi pariwisata daerah adalah peningkatan kunjungan wisatawan. Hal ini dapat dilakukan jika akses dan fasilitas ke area wisata bisa disediakan oleh seluruh stakeholder. Beberapa inisiasi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi wisata Kabupaten Purbalingga di antaranya adalah :

1. Identifikasi dan digitalisasi potensi wisata Kabupaten Purbalingga (e-tourism berbasis SIG). Sistem ini dikembangkan untuk menginventarisir dan memperkenalkan potensi wisata yang dimiliki daerah untuk selanjutnya dipromosikan
2. Trip planner Kabupaten Purbalingga sebagai pelengkap sistem sebelumnya.
3. Pembangunan fasilitas di area wisata (hotel, toilet umum, papan penunjuk jalan, free wifi, dan sebagainya)
4. Penyediaan infrastruktur ke area wisata (jalan, transportasi umum untuk mempermudah akses menuju area wisata)
5. Pengkajian dan pengembangan desa wisata
6. Pengembangan konten digital Kabupaten Purbalingga untuk promosi media sosial, media masa elektronik dan konvensional serta disertai aktivasi media sosial.

6.2.1.4. Sumberdaya

Pengelolaan dan identifikasi sumberdaya menjadi permasalahan. Pertanian, kehutanan, budaya dan partisipasi pemuda yang masih menjadi potensi yang harus terus digali. Beberapa inisiasi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi sumberdaya di antaranya adalah :

1. Identifikasi dan digitalisasi potensi sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah baik pertanian, perikanan, peternakan, sumberdaya alam maupun budaya.

2. Sistem informasi pertanian, peternakan dan perikanan untuk memantau produksi dan distribusi hasil.
3. Sistem informasi ketersediaan dan pengawasan stok pertanian
4. Rencana induk distribusi pangan untuk menjaga kecukupan pangan daerah
5. Aplikasi penyuluhan berisikan bibit, musim, hama dan lain sebagainya.
6. Penguatan SDM berbasis daring
7. Penambahan kualitas dan kuantitas SDM untuk hasil pertanian
8. Pengembangan website pertanian dan peternakan
9. Desa mandiri benih

6.2.2. Smart Living

Smart Living memiliki tujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan kemudahan kepada warga untuk mendapatkan berbagai fasilitas layanan daerah seperti keamanan, pendidikan, kesehatan dan pengelolaan yang baik terhadap PMKS.

6.2.2.1. Keamanan dan Bencana

Keamanan dan bencana merupakan salah satu komponen penting dalam konteks smart living. Kondisi ideal yang diharapkan adalah keamanan dalam melakukan aktifitas sehari-hari baik dari kejahatan maupun bencana. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai inisiasi yang dapat dilakukan pemerintah dan stakeholder lain.

1. Sosialisasi dan inisiasi keamanan lingkungan berbasis masyarakat
2. Panic Button untuk keamanan berbasis aplikasi per area
3. *Emergency call center* yang merupakan layanan 24 jam berbasis Telpon/Aplikasi untuk merespon berbagai kejadian seperti kejahatan dan kebencanaan
4. EWS (*early warning system*) berbasis sensor untuk mendeteksi permasalahan keamanan semenjak dini
5. Penambahan personil khususnya untuk mitigasi bencana
6. Sistem pencatatan dan pemantauan PMKS secara digital (sistem dapat berintegrasi dengan sistem penduduk miskin)

6.2.2.2. Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan warga menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup, menurunkan kemiskinan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ideal yang diharapkan adalah seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah. Kualitas layanan, jumlah guru kelas dan fasilitas pembelajaran menjadi parameter peningkatan kualitas pendidikan. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pengembangan kualitas pendidikan diantaranya adalah :

1. Penambahan jumlah guru agar sesuai dengan rasio siswa dan jumlah kelas atau rombongan belajar
2. Peningkatan angka partisipasi sekolah menjadi 12 tahun
3. Peningkatan kualitas guru melalui program pelatihan dengan target sertifikasi guru
4. Peningkatan kualitas sekolah melalui akreditasi
5. Digitalisasi data pokok sekolah (siswa, guru, mata pelajaran dan pembelajaran)
6. Sistem pemantauan fasilitas sekolah
7. Pengembangan manajemen konten pendidikan untuk pemerataan materi disetiap sekolah (berbasis online)
8. Legalisasi untuk GTT melalui SK Bupati
9. Pengembangan PPDB online
10. Inisiasi UNBK dan pelaporan online

6.2.2.3. Kesehatan

Ketersediaan layanan kesehatan yang memadai adalah objektif kesehatan dalam konsep smart living. Kemudahan dan akses yang cukup untuk mendapatkan layanan dokter dan rumah sakit, kondisi kesehatan masyarakat dan penyebaran penyakit yang berhasil ditekan menjadi beberapa faktor yang menjadi parameter. Inisiasi yang diperlukan untuk memenuhi GAP yang muncul di antaranya, melalui berbagai inisiasi berikut :

1. Penambahan tenaga kesehatan khususnya dokter dan perawat
2. Integrasi data kesehatan dengan layanan kependudukan lain (KTP dan BPJS)
3. Info kesehatan berbasis online sebagai lahan sosialisasi pentingnya kesehatan lingkungan, minimalisir penyakit menular dan lain sebagainya

4. Sistem informasi terintegrasi untuk kesehatan (rumah sakit, puskesmas, poli dan dinas kesehatan)
5. Sistem interaksi online. Sistem online untuk komunikasi dokter, pasien dan stakeholder lain untuk kemudahan dan menjembatani keterbatasan dokter.
6. Sistem pengawasan ibu, bayi dan anak. Sistem ini melakukan pencatatan terhadap ibu hamil dan bayi yang dilahirkan untuk mengendalikan tingkat kematian ibu hamil dan bayi yang baru dilahirkan.

6.2.3. Smart Mobility

Smart Mobility pada dasarnya merupakan layanan yang memungkinkan agar warga memiliki kemudahan dalam melakukan pergerakan di daerah, kemudahan dalam bertransportasi dari satu titik ke titik yang lain. Tidak hanya untuk warga tapi juga untuk pendatang. Kesenjangan yang muncul untuk memenuhi kondisi ideal ini diantaranya adalah :

1. Pengembangan *Traveler Information System*. Aplikasi digunakan sebagai informasi transportasi Kabupaten Purbalingga
2. Sistem pemantauan jalan jembatan untuk pendataan dan monitoring jalan serta jembatan yang dimiliki Pemerintah Daerah
3. *Emergency management system* yang dikembangkan untuk manajemen kecelakaan di jalan raya
4. Sistem monitoring kelayakan kendaraan
5. Sistem perijinan trayek terintegrasi dengan kelayakan kendaraan
6. Kajian untuk penerapan ATCS dan ATMS untuk melakukan pengawasan terhadap permasalahan transportasi.
7. Penguatan dan penambahan ahli bidang transportasi darat dan ahli keselamatan
8. Penguatan *low enforcement* untuk penegak hukum di jalan raya
9. Penguatan fasilitas untuk keamanan dan kenyamanan kendaraan umum
10. Pengembangan *smart parking* untuk implementasi di pasar dan beberapa kantor dinas.
11. Sistem informasi manajemen asset OPD

6.2.4. Smart Environment

Lingkungan yang layak huni, bebas dari polusi dan sesuai dengan rencana tata ruang dan penghematan energi merupakan objektif dari smart environment, permasalahan lingkungan relatif minim terjadi di Kabupaten Purbalingga. Untuk meminimalisir resiko beberapa inisiasi dapat dilakukan di antaranya adalah:

1. Inisiasi pemasangan sensor untuk polusi
2. Sistem Pengelolaan dan pengangkutan sampah berbasis aplikasi
3. Inisiasi pengembangan TPS berbasis 3R
4. Sosialisasi penghematan energi
5. Pengembangan GRID untuk pengelolaan dan *control energy*
6. Implementasi *smart lighting* untuk jalan utama
7. Sistem pemantauan dan pengendalian pembangunan
8. Sistem perijinan online
9. Sistem pengawasan tata ruang untuk memastikan kesesuaian peruntukan suatu wilayah berbasis SIG (database pemafaatan tanah, sebaran RLTH, kawan kumuh, limbah, dll)
10. Sistem monitoring bina marga, sumberdaya air, cipta dan karya.
11. Pemantauan dan pengendalian ruang terbuka hijau sebesar 30%

6.2.5. Smart Government

Layanan yang cepat dan akurat menjadi objektif dari smart government. Setiap layanan memiliki informasi yang jelas terkait domain layanan yang disediakan oleh pemerintah. Beberapa area yang menjadi pelayanan public di antaranya adalah kependudukan dan perijinan.

1. Validasi dan digitalisasi data sebagai Inisiasi awal program *one data / Single sign on* (SSO) dan integrasi data kependudukan dengan OPD lain (kesehatan, pendidikan, pertanahan)
2. Sistem informasi online pelayanan public beserta call centre. Layanan ini merupakan aplikasi berbasis onlie yang memberikan seluruh informasi layanan (kependudukan, kesehatan, perijinan, dan lain sebagainya) beserta layanan informasi yang dapat diakses 24 jam

3. Sosialisasi rutin dan terukur terkait layanan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
4. Sistem pelaporan berbasis web atau android yang langsung melakukan pelaporan hardcopy ke Bupati
5. Sistem permohonan layanan kependudukan
6. Pengembangan sistem administrasi desa (desa Digital)
7. Sistem informasi 1 pintu untuk mempermudah pelayanan dan perijinan
8. Sistem informasi integrasi SKPD dan desa
9. E-office untuk komunikasi dan filling antar OPD dan Kecamatan
10. Penguatan aparatur desa melalui pendidikan formal/non formal
11. Pelatihan daring untuk aparatur
12. Aplikasi kepegawaian yang terintegrasi
13. Penguatan infrastruktur untuk pelayanan publik
14. Penambahan SDM untuk pelayanan

6.2.6. Smart Technology Infrastructure

Teknologi khususnya teknologi informasi dan infrastruktur merupakan enabler yang menjadi pengungkit untuk terbentuknya konsep *Smart City*. Secara umum untuk Kabupaten Purbalingga masih dikatakan minim. Oleh karena itu beberapa inisiasi yang dapat dimaksimalkan untuk memperbaiki infrastruktur TI di antaranya adalah :

1. Pengembangan Data center terpadu
2. Integrasi data eksisting yang dimiliki oleh OPD
3. Optimasi jangkauan LAN dan WAN mencakup seluruh OPD
4. Pengembangan Operation Room dan Platform *Smart City* untuk integrasi data dan layanan
5. Penyediaan Wifi di ruang publik

6.2.7. Smart People

Kualitas dan kuantitas menjadi parameter dari tercapainya smart people. Jumlah yang memadai dalam mengelola kota dengan kemampuan yang baik dalam menangani permasalahan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh kota. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM :

1. Kajian pemetaan kebutuhan SDM untuk pengembangan daerah khususnya berbasis *Smart City*

2. Penambahan jumlah personil untuk tiap OPD
 - Armada Kecamatan
 - Team ahli desa dan TIK desa
 - SDM Global desa
3. Penguatan kapasitas SDM OPD melalui pendidikan formal atau non formal
4. Penguatan kemampuan personil khususnya pengelola TIK (*troubleshooting*)
5. Pelatihan berbasis Daring untuk OPD
6. Program perubahan mindset masyarakat

6.2.8. Smart Governance

Tatakelola atau governance merupakan bagian yang penting dalam pengembangan *Smart City*. Dalam tahapan ini Kabupaten Purbalingga masih melakukan proses inisiasi. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan inisiasi berikut

1. Pembentukan organisasi *Smart City*
 - Dewan *Smart City* Sebagai Pengawas
 - Tim pelaksana *Smart City*
2. Pengembangan kebijakan, prosedur dan standar pengembangan *Smart City*
3. Penguatan kapasitas SDM
4. Penguatan keterlibatan stakeholder *Smart City*

6.3. Analisis Prioritas

Berdasarkan analisis kesenjangan, inisiasi yang dapat dikembangkan sebagai pilihan utama akan dianalisis dengan menggunakan McFarlan Grid atau lebih dikenal dengan analisis prioritas. Melalui analisis prioritas ini setiap inisiasi akan diberi label berikut:

- a. *STRATEGIC* (S). Label *Strategic* berarti inisiasi ini sangat penting untuk dilakukan karena terkait layanan yang sangat diperlukan saat ini juga untuk disiapkan oleh pemerintah.
- b. *KEY OPERATIONAL* (K). Label *Key operational* ini memandang inisiasi penting untuk dilakukan tapi tidak urgen. Akan sangat dibutuhkan di masa yang akan datang.

- c. *HIGH POTENTIAL* (H)/ Label *High potential* diberikan kepada inisiasi yang penting namun masih jauh untuk dilaksanakan
- d. *SUPPORT* (U). Label *Support* ini diberikan kepada inisiasi yang bersifat tidak terlalu penting untuk layanan tapi cukup membantu jika dilakukan.

Label-label di atas akan diberikan kepada inisiasi dari beberapa kluster yang ada pada tabel dibawah. Tabel ini merupakan inisiasi yang muncul dari analisis GAP.

1. Tabel inisiasi *Smart Economy*

No	Inisiasi	Prioritas
1	Kajian pembangunan dan pengembangan pasar beserta kebutuhan fasilitas di beberapa titik sesuai dengan area.	K
2	Pemantauan kondisi pasar melalui sistem informasi pengelolaan pasar yang digunakan untuk memantau dan harga yang bersumber dari pasar tradisional maupun modern.	S
3	Implementasi e-commerce untuk membantu meningkatkan pendapatan	K
4	Sistem Pengelola PAD yang dilakukan untuk melakukan proses penarikan dan pencatatan retribusi dari pasar dan pusat bisnis lainnya (e-retribusi)	S
5	Aplikasi pelaporan sistem keuangan daerah untuk informasi eksekutif.	S
6	Sistem informasi potensi daerah. Sistem ini dikembangkan secara online untuk menarik para investor terkait sumberdaya yang dapat menjadi potensi daerah untuk dikembangkan	S
7	Pengembangan database dan pemantauan penduduk miskin	K
8	Program pengembangan rumah layak huni untuk penduduk miskin sehingga tepat sasaran. Berintegrasi dengan sistem pencatatan dan pemantauan warga miskin	S
9	Sistem pencatatan dan pemantauan warga miskin	K
10	Sistem pemantauan Ketenagakerjaan. Sistem yang dibuat untuk melakukan identifikasi lapangan kerja, pencari kerja serta distribusi para pencari kerja.	S
11	Penguatan SDM sebagai pelaku industri melalui pelatihan sesuai bidang industri yang dijalani (logam , makanan , dan lain sebagainya)	S
12	Sistem informasi penyediaan modal sebagai sistem yang melakukan pencatatan dan informasi ketersediaan modal untuk pengelolaan industri khususnya industri kecil	S
13	Identifikasi dan digitalisasi pemetaan data pelaku industri dan area industri untuk memudahkan konsumen mendapatkan hasil produksi.	K
14	Sistem perijinan online berbasis satu pintu untuk kemudahan dalam mendirikan industri khususnya industri kecil (IUMK)	S
15	Pengembangan area industri dan area pemasaran khusus yang digunakan untuk memasarkan produk daerah.	H
16	Pengembangan sistem pemasaran online terpadu yang digunakan produsen dalam rangka memasarkan produk.	S

No	Inisiasi	Prioritas
17	Program promosi rutin yang dikelola pemerintah untuk seluruh industri	S
18	E-commerce untuk industri	S
19	Identifikasi dan digitalisasi potensi wisata Kabupaten Purbalingga (e-tourism berbasis SIG). Sistem ini dikembangkan untuk menginventarisir dan memperkenalkan potensi wisata yang dimiliki daerah untuk selanjutnya dipromosikan	S
20	Trip planer Kabupaten purbalingga sebagai pelengkap sistem sebelumnya.	U
21	Pembangunan fasilitas diarea wisata (hotel , toilet umum, papan penunjuk jalan, free wifi, dan sebagainya)	K
22	Penyediaan infrastruktur ke area wisata (jalan, transportasi umum untuk mempermudah akses menuju area wisata)	K
23	Pengkajian dan pengembangan desa wisata	S
24	Pengembangan konten digital Kabupaten purbalingga untuk promosi media sosial, media masa elektronik dan konvensional serta di sertai aktivasi medsos.	S
25	Identifikasi dan digitalisasi potensi sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah baik pertanian, perikanan, peternakan, sumberdaya alam maupun budaya.	S
26	Sistem informasi pertanian, peternakan dan perikanan untuk memantau produksi dan distribusi hasil.	S
27	Sistem informasi ketersediaan dan pengawasan stok pertanian	K
28	Rencana induk distribusi pangan untuk menjaga kecukupan pangan daerah	U
29	Aplikasi penyuluhan berisikan bibit, musim, hama dan lain sebagainya.	K
30	Penguatan SDM berbasis daring	S
31	Penambahan kualitas dan kuantitas SDM untuk hasil pertanian	S
32	Pengembangan website pertanian dan peternakan	S
33	Desa mandiri benih	S

2. Tabel Inisiasi Smart Living

No	Inisiasi	Prioritas
1	Sosialisasi dan inisiasi keamanan lingkungan berbasis masyarakat	S
2	Panic Button untuk keamanan berbasis aplikasi per area	K
3	Emergency call center yang merupakan layanan 24 jam berbasis Telpon/Apps untuk merespon berbagai kejadian seperti kejahatan dan bencana	S
4	EWS (<i>early warning system</i>) berbasis sensor untuk mendeteksi permasalahan keamanan semenjak dini	S
5	Penambahan personil khususnya untuk mitigasi bencana	S
6	Sistem pencatatan dan pemantauan PMKS secara digital (sistem dapat berintegrasi dengan sistem penduduk miskin)	K
7	Penambahan jumlah guru agar sesuai dengan rasio siswa dan jumlah kelas atau rombongan belajar	S
8	Peningkatan angka partisipasi sekolah menjadi 12 tahun	S
9	Peningkatan kualitas guru melalui program pelatihan dengan target sertifikasi guru	S
10	Peningkatan kualitas sekolah melalui akreditasi	S

No	Inisiasi	Prioritas
11	Digitalisasi data pokok sekolah (siswa, guru, mata pelajaran dan pembelajaran)	S
12	Sistem pemantauan fasilitas sekolah	H
13	Pengembangan manajemen konten pendidikan untuk pemerataan materi disetiap sekolah (berbasis online)	K
14	Legalisasi untuk GTT melalui SK Bupati	S
15	Pengembangan PPDB online	S
16	Inisiasi UNBK dan pelaporan online	S
17	Penambahan tenaga kesehatan khususnya dokter dan perawat	S
18	Integrasi data kesehatan dengan layanan kependudukan lain (KTP dan BPJS)	H
19	Info kesehatan berbasis online sebagai lahan sosialisasi pentingnya kesehatan lingkungan, minimalisir penyakit menular dan lain sebagainya	S
20	Sistem informasi terintegrasi untuk kesehatan (rumah sakit, puskesmas, poliklinik dan dinas kesehatan)	S
21	Sistem interaksi online. Sistem online untuk komunikasi dokter, pasien dan stakeholder lain untuk kemudahan dan menjembatani keterbatasan dokter.	K
22	Sistem pengawasan ibu, bayi dan anak. Sistem ini melakukan pencatatan terhadap ibu hamil dan bayi yang dilahirkan untuk mengendalikan tingkat kematian ibu hamil dan bayi yang baru dilahirkan.	S

3. Tabel Inisiasi Smart Mobility

No	Inisiasi	Prioritas
1	Pengembangan <i>Traveler Information System</i> . Aplikasi digunakan sebagai informasi transportasi Kabupaten Purbalingga	H
2	Sistem pemantauan jalan jembatan untuk pendataan dan monitoring jalan serta jembatan yang dimiliki pemerintah daerah	H
3	Emergency management system yang dikembangkan untuk manajemen kecelakaan di jalan raya	S
4	Sistem monitoring kelayakan kendaraan	H
5	Sistem perijinan trayek terintegrasi dengan kelayakan kendaraan	S
6	Kajian untuk penerapan ATCS dan ATMS untuk melakukan pengawasan terhadap permasalahan transportasi.	U
7	Penguatan dan penambahan ahli bidang transportasi darat dan ahli keselamatan	S
8	Penguatan low enforcement untuk penegak hukum di jalan raya	K
9	Penguatan fasilitas untuk keamanan dan kenyamanan kendaraan umum	K
10	Pengembangan smart parking untuk implementasi di pasar dan beberapa kantor dinas.	S
11	Sistem informasi manajemen asset OPD	S

4. Tabel Inisiasi Smart Environment

No	Inisiasi	Prioritas
1	Inisiasi pemasangan sensor untuk polusi	H
2	Sistem Pengelolaan dan pengangkutan sampah berbasis aplikasi	H
3	Inisiasi pengembangan TPS berbasis 3R	K
4	Sosialisasi penghematan energi	S
5	Pengembangan GRID untuk pengelolaan dan control energy	H
6	Implementasi smart lighting untuk jalan utama	U
7	Sistem pemantauan dan pengendalian pembangunan	S
8	Sistem perijinan online	S
9	Sistem pengawasan tata ruang untuk memastikan kesesuaian peruntukan suatu wilayah berbasis SIG (database pemafaatan tanah, sebaran RLTH, kawan kumuh, limbah, dll)	S
10	Sistem monitoring bina marga, sumberdaya air, cipta dan karya.	H
11	Pemantauan dan pengendalian ruang terbuka hijau sebesar 30%	S

5. Tabel Inisiasi Smart Government

No	Inisiasi	Prioritas
1	Validasi dan digitalisasi data sebagai Inisiasi awal program one data /Single sign on (SSO) dan integrasi data kependudukan dengan OPD lain (kesehatan, pendidikan, pertanian)	S
2	Sistem informasi online pelayanan publik beserta call centre. Layanan ini merupakan aplikasi berbasis online yang memberikan seluruh informasi layanan (kependudukan, kesehatan, perijinan , dan lain sebagainya) beserta layanan informasi yang dapat diakses 24 jam	S
3	Sosialisasi rutin dan terukur terkait layanan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.	S
4	Sistem pelaporan berbasis web atau android yang langsung melakukan pelaporan hardcopy ke Bupati	S
5	Sistem permohonan layanan kependudukan	H
6	Pengembangan sistem administrasi desa (desa Digital)	H
7	Sistem informasi 1 pintu untuk mempermudah pelayanan dan perijinan	S
8	Sistem informasi integrasi SKPD dan desa	H
9	E – office untuk komunikasi dan filing antar OPD dan Kecamatan	S
10	Penguatan aparatur desa melalui pendidikan formal/non formal	S
11	Pelatihan daring untuk aparatur	S
12	Aplikasi kepegawain yang terintegrasi	S
13	Penguatan infrastruktur untuk pelayanan publik	S
14	Penambahan SDM untuk pelayanan	S

6. Tabel Inisiasi Smart People

No	Inisiasi	Prioritas
1	Kajian pemetaan kebutuhan sdm untuk pengembangan daerah khususnya berbasis Smart City	S
2	Penambahan jumlah personil untuk tiap OPD	S
	Armada Kecamatan	S
	Team ahli desa dan TIK desa	S
3	Penguatan kapasitas SDM OPD melalui pendidikan formal atau non formal	S
4	Penguatan kemampuan personil khususnya pengelola TIK (troubleshooting)	S
5	Pelatihan berbasis Daring untuk OPD	S
6	Program perubahan mindset masyarakat	S

7. Tabel Inisiasi Smart Technolgy

No	Inisiasi	Prioritas
1	Pengembangan Data center terpadu	S
2	Integrasi data eksisting yang dimiliki oleh OPD	S
3	Optimasi jangkauan LAN dan WAN mencakup seluruh OPD	S
4	Pengembangan Operation Room dan Platform <i>Smart City</i> untuk integrasi data dan layanan	S
5	Penyediaan Wifi di ruang publik	S

8. Tabel Inisiasi Smart Governance

No	Inisiasi	Prioritas
1	Pembentukan organisasi Smart City	S
	a. Dewan <i>Smart City</i> Sebagai Pengawas	S
	b. Tim pelaksana Smart City	S
2	Pengembangan kebijakan, prosedur dan standar pengembangan Smart City	S
3	Penguatan kapasitas SDM	S
4	Penguatan keterlibatan stakeholder Smart City	S

6.4. Pengembangan Master Plan

Berdasarkan hasil analisis prioritas serta pentahapan, maka rencana aksi atau inisiasi menuju *Smart City* secara dapat direalisasikan sesuai masing-masing tahapan sesuai dengan tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Inisiatif Tahap 1 untuk *Smart City* Purbalingga

No	Inisiatif Tahap 1: Visi dan Rencana Kerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kajian pemetaan kebutuhan SDM untuk pengembangan daerah khususnya berbasis Smart City	X				
2	Pembentukan organisasi Smart City	X				
	a. Dewan <i>Smart City</i> Sebagai Pengawas	X				
	b. Tim pelaksana Smart City	X				
3	Legalisasi untuk Dewan <i>Smart City</i> <i>Smart City</i> melalui SK Bupati	X				
4	Pengembangan kebijakan, prosedur dan standar pengembangan Smart City	X				
5	Penguatan keterlibatan stakeholder Smart City	X				

Tabel 8. Inisiatif Tahap 2 untuk *Smart City* Purbalingga

No	Inisiatif Tahap 2: Penguatan SDM dan Kebijakan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Penguatan SDM berbasis daring	x	x	x	x	x
2	Penguatan kapasitas SDM	x	x	x	x	x
3	Penambahan jumlah personil untuk tiap OPD: armada kecamatan	x	X			

No	Inisiatif Tahap 2: Penguatan SDM dan Kebijakan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
4	Penambahan jumlah personil untuk tiap OPD: team ahli desa dan TIK desa	X	X			
5	Penguatan SDM melalui program magang	X	X	X	X	X
6	Penambahan kualitas dan kuantitas SDM untuk hasil pertanian			X		
7	Penguatan SDM sebagai pelaku industri melalui pelatihan sesuai bidang industri yang dijalani (pariwisata, kerajinan, logam, makanan, dan lain sebagainya)	X	X	X	X	X
8	Rencana induk distribusi pangan untuk menjaga kecukupan pangan daerah	X				
9	Sosialisasi dan inisiasi keamanan lingkungan berbasis masyarakat		X			
10	Penguatan kemampuan personil khususnya pengelolaan TIK (troubleshooting)	X				
11	Penambahan personil khususnya untuk mitigasi bencana		X			
12	Penambahan jumlah guru agar sesuai dengan rasio siswa dan jumlah kelas atau rombongan belajar	X	X	X	X	X
13	Peningkatan angka partisipasi sekolah menjadi 12 tahun	X	X	X	X	X
14	Peningkatan kualitas guru melalui program pelatihan dengan target sertifikasi guru	X	X	X	X	X
15	Peningkatan tenaga kesehatan khususnya dokter dan perawat	X	X	X	X	X
16	Penguatan dan penambahan ahli bidang transportasi darat dan ahli keselamatan				X	
17	Penguatan law enforcement untuk penegakan hukum di jalan raya			X		
18	Kajian untuk penerapan ATCS dan ATMS untuk melakukan pengawasan terhadap permasalahan transportasi.					X

No	Inisiatif Tahap 2: Penguatan SDM dan Kebijakan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
19	Penguatan kapasitas SDM OPD melalui pendidikan formal atau nonformal	X				
20	Penguatan aparatur desa melalui pendidikan formal atau nonformal		X			
21	Penambahan SDM untuk pelayanan publik	X				

Tabel 9. Inisiatif Tahap 3 untuk *Smart City* Purbalingga

No	Inisiatif Tahap 3: Pemantapan Teknologi dan Infrastruktur	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengembangan platform integrasi sistem informasi cerdas		X			
2	Penambahan dan penguatan infrastruktur jaringan listrik untuk mengatasi permasalahan server yang mati	X				
3	Pendataan status aplikasi dan server secara terpusat dan komprehensif	X				
4	Data center terpadu antara dinkominfo Kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat		X	X		
5	Kajian migrasi server	X				
6	Command center untuk koordinasi dan visualisasi data dan informasi, membantu pengambilan keputusan dengan cepat dan akurat		X	X		
7	Aplikasi pelaporan sistem keuangan daerah untuk informasi eksekutif		X			

No	Inisiatif Tahap 3: Pemantapan Teknologi dan Infrastruktur	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
8	Optimasi jangkauan LAN dan WAN mencakup seluruh OPD dengan menggunakan fiber optik	X	X			
9	Sistem informasi potensi daerah. Sistem ini dikembangkan secara online untuk menarik para investor terkait sumberdaya yang dapat menjadi potensi daerah untuk dikembangkan			X		
10	Pengembangan database dan pemantauan penduduk miskin			X		
11	Sistem pemantauan ketenagakerjaan. Sistem yang dibuat untuk melakukan identifikasi lapangan kerja, pencari kerja serta distribusi para pencari kerja.		X			
12	Sistem informasi penyediaan modal sebagai sistem yang melakukan pencatatan dan informasi ketersediaan modal untuk pengelolaan industri khususnya industri kecil			X		
13	Validasi dan digitalisasi data sebagai Inisiasi awal program one data /Single sign on (SSO) dan integrasi data kependudukan dengan opd lain (kesehatan, pendidikan, pertanian)	X				
14	Identifikasi dan digitalisasi pemetaan data pelaku industri dan area industri untuk memudahkan konsumen mendapatkan hasil produksi.		X			
15	Sistem informasi online pelayanan public beserta call centre. Layanan ini merupakan aplikasi berbasis onlie yang memberikan seluruh informasi layanan (kependudukan, kesehatan, perijinan , dan lain sebagainya) beserta layanan informasi yang dapat diakses 24 jam				X	
16	Sistem perijinan online berbasis satu pintu untuk kemudahan dalam mendirikan industri khususnya industri kecil (IUMK)		X			
17	Identifikasi dan digitalisasi potensi sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah baik pertanian, perikanan, peternakan, sumberdaya alam maupun budaya.		X			
18	Identifikasi dan digitalisasi potensi wisata Kabupaten Purbalingga (e-tourism berbasis SIG). Sistem ini dikembangkan untuk menginventarisir dan memperkenalkan potensi wisata yang di miliki daerah untuk selanjutnya dipromosikan		X			
19	Pembangunan fasilitas di area wisata (hotel, toilet umum, papan penunjuk jalan, free wifi, dsb)	X	X			

No	Inisiatif Tahap 3: Pemantapan Teknologi dan Infrastruktur	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
20	Penyediaan infrastruktur ke area wisata (jalan, transportasi umum untuk mempermudah akses menuju area wisata)	X				
21	Sistem informasi pertanian, peternakan dan perikanan untuk memantau produksi dan distribusi hasil.		X			
22	Sistem informasi ketersediaan dan pengawasan stok pertanian		X			
23	Sistem pencatatan dan pemantauan PMKS secara digital (sistem dapat berintegrasi dengan sistem penduduk miskin)			X		
24	Digitalisasi data pokok sekolah (siswa, guru, mata pelajaran dan pembelajaran)		X			
25	Sistem pemantauan fasilitas sekolah		X			
26	Pengembangan PPDB online	X				
27	Inisiasi UNBK dan pelaporan online	X				
28	Integrasi data kesehatan dengan layanan kependudukan lain (KTP dan BPJS)			X	X	X
29	Sistem informasi terintegrasi untuk kesehatan (rumah sakit, puskesmas, poli dan dinas kesehatan)			X	X	
30	Sistem pengawasan ibu, bayi dan anak. Sistem ini melakukan pencatatan terhadap ibu hamil dan bayi yang dilahirkan untuk mengendalikan tingkat kematian ibu hamil dan bayi yang baru dilahirkan.			X		
31	Sistem pemantauan jalan jembatan untuk pendataan dan monitoring jalan serta jembatan yang dimiliki pemerintah daerah			X		
32	Sistem monitoring kelayakan kendaraan		X			

No	Inisiatif Tahap 3: Pemantapan Teknologi dan Infrastruktur	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
33	Sistem perijinan trayek terintegrasi dengan kelayakan kendaraan		X			
34	Penguatan fasilitas untuk keamanan dan kenyamanan kendaraan umum		X			
35	Sistem informasi manajemen asset OPD	X				
36	Sistem permohonan layanan kependudukan	X				
37	Sistem pelaporan berbasis web atau android yang langsung melakukan pelaporan hardcopy ke Bupati	X				
38	Pengembangan sistem administrasi desa (desa Digital)	X				
39	Sistem informasi 1 pintu untuk mempermudah pelayanan dan perijinan		X			
40	Sistem informasi integrasi SKPD dan desa	X				
41	E-office untuk komunikasi dan filing antar opd dan kecamatan	X				
42	Aplikasi kepegawaian yang terintegrasi		X			
43	Penguatan infrastruktur untuk pelayanan publik	X	X			
44	Pengembangan Data center terpadu	X				
45	Penyediaan Wifi di ruang publik	X	X	X		

Tabel 10. Inisiatif Tahap 4 untuk *Smart City* Purbalingga

No	Inisiatif Tahap 4: Penentuan Program Unggulan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kajian pembangunan dan pengembangan pasar beserta kebutuhan fasilitas di beberapa titik sesuai dengan area.			X		
2	Pemantauan kondisi pasar melalui sistem informasi pengelolaan pasar yang digunakan untuk memantau dan harga yang bersumber dari pasar traditional maupun modern.			X		
3	Sistem Pengelola PAD yang dilakukan untuk melakukan proses penarikan dan pencatatan retribusi dari pasar dan pusat bisnis lainnya (e-retribusi)			X		
4	Pengembangan sistem pemasaran online terpadu yang digunakan produsen dalam rangka memasarkan produk.			X		
5	E-commerce untuk memajukan UMKM dan industri kecil				X	
6	Trip planner Kabupaten Purbalingga sebagai pelengkap sistem sebelumnya.					X
7	Peningkatan kualitas sekolah melalui akreditasi	X	X	X	X	X
8	Pengkajian dan pengembangan desa wisata	X				
9	Pengembangan konten digital Kabupaten Purbalingga untuk promosi media sosial, media masa elektronik dan konvensional serta di sertai aktivasi medsos.	X				
10	Pengembangan website pertanian dan peternakan		X			
11	Panic Button untuk keamanan berbasis aplikasi / area					X
12	Emergency call center yang merupakan layanan 24 jam berbasis Telepon/Aplikasi untuk merespon berbagai kejadian seperti kejahatan dan bencana					X

No	Inisiatif Tahap 4: Penentuan Program Unggulan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
13	Emergency management system yang dikembangkan untuk manajemen kecelakaan di jalan raya					X
14	EWS (<i>early warning system</i>) berbasis sensor untuk mendeteksi permasalahan keamanan semenjak dini					X
15	Pengembangan manajemen konten pendidikan untuk pemerataan materi disetiap sekolah (berbasis online)			X		
16	Pegembangan Traveler Information System. Aplikasi digunakan sebagai informasi transportasi Kabupaten purbalingga					X
17	Pengembangan smart parking untuk implementasi di pasar dan beberapa kantor dinas.				X	

Tabel 11. Inisiatif Tahap 5 untuk *Smart City* Purbalingga

No	Inisiatif Tahap 5: Perluasan Dampak dan Manfaat	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengembangan area industri dan area pemasaran khusus yang digunakan untuk memasarkan produk daerah.				X	
2	Program pengembangan rumah layak huni untuk penduduk miskin sehingga tepat sasaran, terintegrasi dengan sistem pencatatan dan pemantauan warga miskin				X	
3	Program promosi rutin yang dikelola pemerintah untuk seluruh industri				X	
4	Aplikasi penyuluhan berisikan bibit, musim, hama dan lain sebagainya.			X		
5	Info kesehatan berbasis online sebagai lahan sosialisasi pentingnya kesehatan lingkungan, minimalisir penyakit menular dan lain sebagainya			X		

No	Inisiatif Tahap 5: Perluasan Dampak dan Manfaat	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
6	Sistem interaksi online. Sistem online untuk komunikasi dokter, pasien dan stakeholder lain untuk kemudahan dan menjembatani keterbatasan dokter.				X	
7	Sosialisasi rutin dan terukur kepada masyarakat terkait layanan dan kebijakan berorientasi <i>Smart City</i> yang dimiliki oleh pemerintah daerah.	X	X	X	X	X

6.5. Integrasi Sistem Informasi

Sesuai dengan kesiapan sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka dapat diusulkan pentahapan dalam integrasi sistem informasi ke dalam sebuah platform terintegrasi seperti pada Tabel 12 sebagai berikut.

Tabel 12. Pentahapan Integrasi Sistem Informasi pada OPD

OPD Kabupaten Purbalingga	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Kominfo					
Dinas Dukcapil					
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Dinas Kesehatan					
Badan Kepegawaian Daerah					
Badan Keuangan Daerah					
RSUD					
Inspektorat					
DPMPTSP					
Dinas Perindag					
Kecamatan dan Kelurahan					
Desa					
Dinas Arpus					

Adapun pertimbangan dari pentahapan integrasi dari masing-masing sistem informasi yang dimiliki oleh OPD tersebut adalah sebagai berikut:

Integrasi Dinas Kominfo dilaksanakan pada tahun pertama sebagai Dinas yang memiliki tupoksi pengembangan sistem informasi pemerintah daerah,

dan sebagai pengelola maupun penanggung jawab dari keberlangsungan sistem informasi terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Integrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan dilaksanakan pada tahun pertama karena kedua dinas ini yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, dan memiliki penilaian kritikal dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat seperti IPM dan APL, dengan demikian perkembangannya perlu dipantau secara langsung melalui dashboard *Smart City* yang terpusat.

Integrasi Dinas Kependudukan dan Layanan Sipil dilaksanakan pada tahun pertama karena data kependudukan dan NIK merupakan data kunci yang aksesnya diperlukan oleh semua OPD lain dalam mewujudkan *Smart City* Kabupaten Purbalingga.

Integrasi Badan Kepegawaian Daerah dilaksanakan dalam dua tahap: integrasi sistem informasi yang sifatnya tidak rahasia seperti absen pegawai pada tahun pertama, dan integrasi sistem informasi yang sifatnya rahasia dan telah terotorisasi seperti sistem penggajian pada tahun kedua.

Integrasi Badan Keuangan Daerah dilaksanakan pada tahun kedua dengan catatan keamanan sistem informasi dan jaringan telah dikaji keamanannya pada tahun pertama. Pada tahun pertama, Badan Keuangan Daerah perlu mempersiapkan basis data yang akan diintegrasikan kepada sistem informasi terintegrasi dengan memperhatikan kepentingan dan keamanan data keuangan yang dikelola Badan Keuangan Daerah.

Integrasi RSUD dilaksanakan pada tahun ketiga, dengan asumsi tahun pertama dan kedua dilaksanakan kajian untuk mempertimbangkan data dan informasi apa saja yang diintegrasikan, kemudian dengan

mempertimbangkan aspek keamanan data pasien dan rekam medis. Integrasi data RSUD dilaksanakan dengan sasaran layanan kesehatan gawat darurat dan jarak jauh terintegrasi di masa depan.

Integrasi DPMPTSP dan Dinas Perindag yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan kepada masyarakat dari sisi perekonomian dan usaha dilaksanakan pada tahun ketiga, dengan catatan pengintegrasian data kependudukan dari Disdukcapil telah berjalan dengan baik, dan data dari Dinas Keuangan yang relevan telah terintegrasi, dengan demikian analisis data dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Integrasi inspektorat dilaksanakan pada tahun keempat, dengan harapan kinerja OPD lain yang telah terintegrasi kepada sistem informasi *Smart City* Kabupaten Purbalingga dapat terpantau lebih baik untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sistem informasi pemantauan kinerja *Smart City* perlu diusulkan dan diimplementasikan.

Integrasi Kantor-kantor Kecamatan dan desa dilaksanakan secara bertahap dalam tahun ketiga dan keempat, dengan mempertimbangkan ketersediaan jaringan FO menuju masing-masing kantor dan jarak masing-masing kantor menuju Pusat Kabupaten. Tujuan utama integrasi sistem Kelurahan dan Kecamatan ini adalah untuk menyederhanakan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat utamanya yang berada jauh dari Pusat Kabupaten.

Integrasi Kantor Desa dilaksanakan secara bertahap pada tahun keempat dan kelima. Merupakan pendalaman dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang mendapat prioritas utama adalah desa-desa dengan program unggulan, utamanya yang mendayagunakan Teknologi Informasi sebagai andalan.

7. Penutup

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan Tujuan dari pengembangan masterplan Smart City, hasil kajian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

1. Peningkatan Awareness/ kesadaran terhadap implementasi *Smart City* dilakukan melalui FGD yang memaparkan definisi, konsep dan rencana pengembangan *Smart City* di Kabupaten purbalingga dengan melibatkan berbagai stakeholder yang terlibat untuk pengembangan *Smart City*.
2. Berdasarkan hasil penilaian implementasi *Smart City* saat ini Kabupaten Purbalingga berada pada level 3 (scattered) dengan nilai 48. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga memiliki *awareness* dalam pengembangan *Smart City*.
3. Permasalahan yang umum terjadi di Kabupaten Pubalingga di antaranya adalah permasalahan sumberdaya manusia yang hampir terjadi di setiap OPD, Infrastruktur dan teknologi informasi, dan potensi daerah yang masih belum dikelola dengan optimal.
4. Rencana induk pengembangan *Smart City* dipetakan ke dalam 5 tahap implementasi yang dilakukan dalam proses 5 tahun.
 - a. Tahap pertama implementasi akan melakukan penguatan visi dan misi Purbalingga *Smart City* melalui penyelarasan konsep *Smart City* dan RPJMD pemerintah Kabupaten Purbalingga, penguatan SDM, penetapan dan pembentukan organisasi *Smart City*, pengembangan prosedur dan keterlibatan stakeholder *Smart City* yang dilakukan ditahun pertama.
 - b. Tahap kedua memulai implementasi dengan penguatan lebih detail terhadap SDM pelaksana implementasi *Smart City* melalui

penambahan personil, penguatan kapasitas dan kemampuan SDM. tahap penguatan SDM ini terus dilakukan setiap tahun, hal ini dilakukan karena kondisi dan kebijakan penempatan SDM serta kondisi perkembangan teknologi yang terus berubah.

- c. Tahap 3 dilakukan dengan melakukan penguatan teknologi dan infrastruktur khususnya berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Berbagai inisiasi dikembangkan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Tahap 4 dilakukan dengan menentukan program unggulan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk layanan untuk mengelola permasalahan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- e. Tahap 5 Melakukan sosialisasi dan implementasi terhadap inisiasi yang dimiliki sehingga inisiasi yang dimiliki dapat memberikan manfaat yang jelas bagi pemerintah maupun masyarakat yang terlibat.

7.2. Saran

- 1. Dokumen ini dikembangkan sebagai arahan dalam pengembangan *Smart City Smart City* Kabupaten Purbalingga. Keberadaan dan implementasinya dapat direview setiap tahun atau dua tahun sekali untuk *feasibility* setiap inisiasi yang dilakukan.
- 2. Agar keberadaan masterplan ini dapat digunakan secara maksimal, diperlukan dukungan atau legalitas formal masterplan ini, hal ini dapat dilakukan dengan membuat Peraturan Bupati (Perbup) sambil menunggu dapat disusunnya Peraturan Daerah (Perda) terkait pelaksanaan Smart City.
- 3. Berjalannya implementasi *Smart City* akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat terutama level pimpinan di

Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu sangat diperlukan keterlibatan dari level pemerintah, akademisi, industri, masyarakat dan komunitas.

Lampiran A: Survei dan Assessment

Pelaksanaan Survei

Survei ini dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting Kabupaten Purbalingga, permasalahan utama, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Purbalingga. Materi survei yang dilakukan mencakup beberapa hal di antaranya adalah:

1. Permasalahan utama yang muncul di Kabupaten Purbalingga dan permasalahan khusus di masing-masing OPD
2. Solusi atau inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi permasalahan yang muncul
3. Potensi yang dimiliki Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Kondisi Tatakelola, Teknologi dan Sumberdaya manusia sebagai enabler pengembangan Smart City.

Pada kegiatan survey yang dilakukan, OPD yang berhasil dikumpulkan selama 2 hari pelaksanaan survei berjumlah 38 OPD di antaranya adalah:

Tabel 13. Daftar OPD yang hadir pada pelaksanaan survei

NO	Nama OPD
1	DINKOMINFO (Dinas Komunikasi dan Informatika)
2	BAPPELITBANGDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
3	DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
4	DINKES (Dinas Kesehatan)
5	DINKOPUKM (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah)
6	DINPERMASDES (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

7	DINDIKBUD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
8	DINHUB (Dinas Perhubungan)
9	DLH (Dinas Lingkungan Hidup)
10	DINPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
11	DINSOSDALDUKKBP3A (Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
12	DINPORAPAR (Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata)
13	DINPENDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)
14	BAKEUDA (Badan Keuangan Daerah)
15	BKPPD (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian Daerah)
16	DINARSPUS (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)
17	BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
18	DINRUMKIN (Dinas Perumahan dan Pemukiman)
19	DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
20	DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)
21	DINNAKER (Dinas Tenaga Kerja)
22	DINPERTAN (Dinas Pertanian)
23	KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa dan Politik)
24	SATPOL PP
25	Setda Bagian Umum
26	Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat
27	Setda Bagian Administrasi Pembangunan
28	Setda Bagian Hukum
29	Setda Bagian Humas
30	Setda Bagian Ortala
31	Setda Bagian Pemerintahan
32	Setda Bagian Pengadaan

33	Setda Bagian Perekonomian
34	Kec. Purbalingga
35	Kec. Bobotsari
36	RSUD Purbalingga
37	RSKBD Panti Nugroho
38	Inspektorat Daerah

Dari hasil survei tersebut berhasil dikumpulkan beberapa dokumen di antaranya:

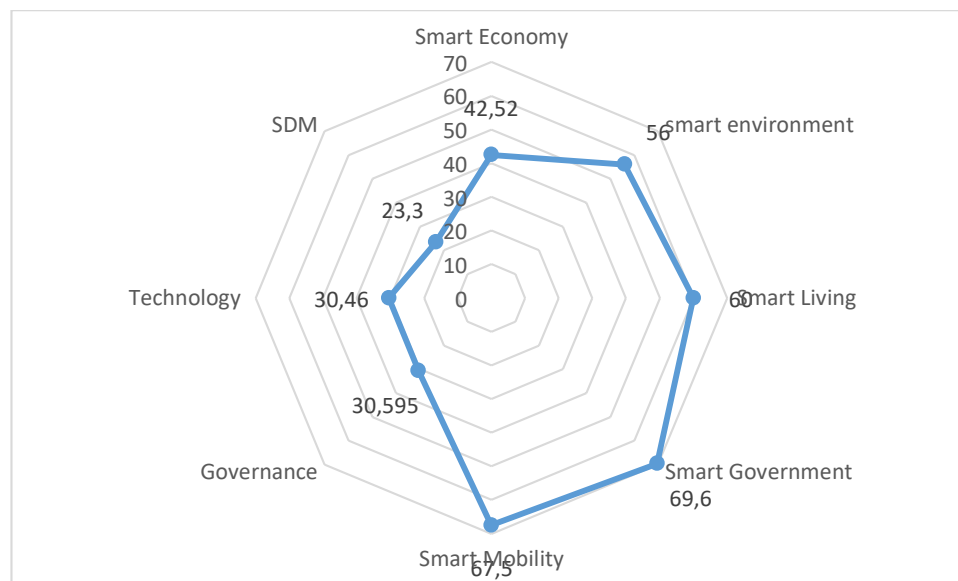
Tabel 14. Daftar Dokumen yang di dapat dari pelaksanaan survei

NO	Nama Dokumen
1	RPJMD Kabupaten Purbalingga
2	Kabupaten Purbalingga dalam Angka
3	Daftar Aplikasi Kab. Purbalingga
4	Masterplan e-Government
5	Data Tenaga Kesehatan & Fasilitas Kesehatan 2018
6	Data Rumah Sakit Purbalingga 2018
7	Capaian SPM Perbup 43 Tahun 2018.SMT 1
8	LAMPIRAN JUKNIS PROFIL KES 2017 PURBALINGGA
9	Daftar nama website desa
10	daftar nama website OPD
11	LKJIP Kab. Purbalingga 2017
12	PERANCANGAN BLUE PRINT APLIKASI - ke Pemda Purbalingga

13	Perubahan Perencanaan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018
14	Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2019 Kabupaten Purbalingga
15	Dokumen Purbalingga menuju <i>Smart City</i>
16	RKPD 2017
17	RPJPD 2005-2025

Hasil Survei

Berdasarkan hasil survei Kabupaten Purbalingga memiliki nilai 48, dalam konteks *Smart City* biasa disebut Scattered. Gambar L- 1. Hasil assesment Implementasi *Smart City* Kabupaten Purbalingga memperlihatkan gambaran capaian tiap komponen *Smart City*.



Gambar L- 1. Hasil assesment Implementasi *Smart City* Kabupaten Purbalingga

Dari hasil penilaian yang dilakukan secara umum posisi Kabupaten Purbalingga berada pada tahap *scattered* dengan nilai 48. Hal ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Purbalingga mulai mencoba menerapkan konsep *Smart City* secara parsial di tiap bidang. Berdasarkan hasil pengamatan implementasi mengarah pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan layanan dan kualitas hidup warga. Nilai *scattered* yang didapat dari hasil *assessment* berasal dari beberapa komponen *Smart City* yang dipetakan. Layanan pemerintah memberikan kontribusi paling tinggi dengan nilai 69,6. Sementara nilai terendah berada pada kualitas SDM yang hanya mencapai 23,3. lebih detail terkait nilai ini akan dibahas selanjutnya.

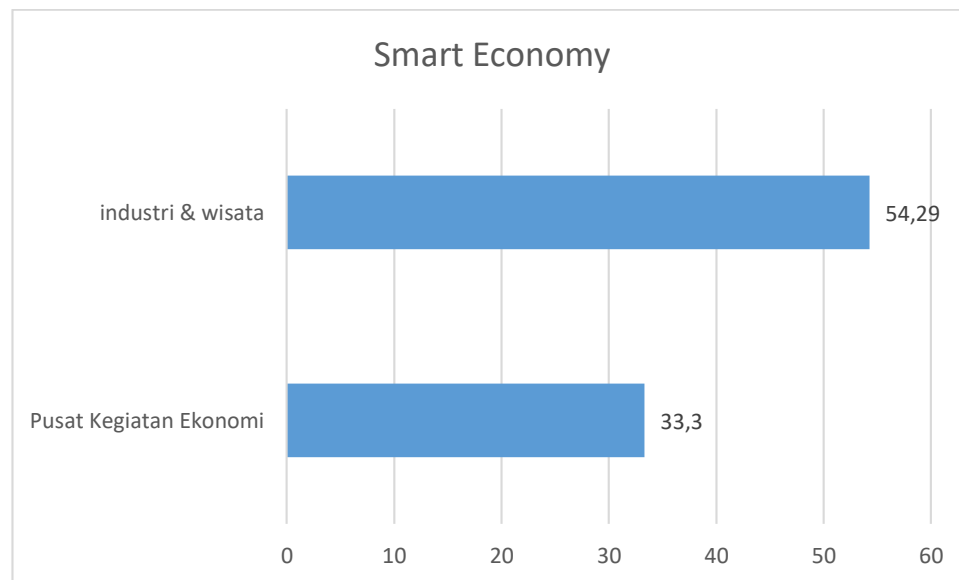
Permasalahan umum yang terjadi dari hasil survei OPD adalah minimnya SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hampir di setiap OPD dan kecamatan seperti BAKUDA, PUPR Dinas Pendidikan, BKKPD dan lain sebagainya. Permasalahan lain yang mencul dan menjadi isu adalah kesiapan infrastruktur dan akses ke daerah-daerah terpencil khususnya akses untuk menggunakan teknologi informasi. Di samping permasalahan pemerintah Kabupaten memiliki beberapa potensi yang layak untuk dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Keberadaan home industri yang terus meningkat seperti industri knalpot, makanan, kuliner dan lain sebagainya. Keberadaan sumber daya yang siap digunakan seperti hutan, pertanian dan wisata yang dapat diolah untuk meningkatkan kualitas hidup warga.

Berdasarkan hasil survei juga dapat diidentifikasi beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk melayani masyarakat. Inovasi-inovasi ini dilakukan diberbagai bidang seperti pelayanan publik seperti layanan keliling untuk masyarakat yang dilakukan

DPTMSP, penguatan fasilitas pendidikan yang dilakukan dinas pendidikan, inisiasi pengembangan desa wisata, pelaporan online yang berbasis desentralisasi untuk desa, dan inisiasi lain yang dikembangkan oleh masing-masing OPD. Detail terkait hasil survei dipetakan pada bagian berikut sesuai dengan arahan pengembangan komponen Smart City.

Smart Economy

Smart Economy secara umum memperlihatkan kondisi umum warga dan layanan yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Hasil penilaian *smart economy* secara umum adalah 43,795. Nilai ini memperlihatkan bahwa implementasi *Smart City* berada di tahap awal scattered yang dipengaruhi tingkat kemiskinan yang cukup tinggi yaitu mencapai 18,80% dan jumlah pengangguran yang mencapai 5%.



Gambar L- 2. Hasil nilai smart economy

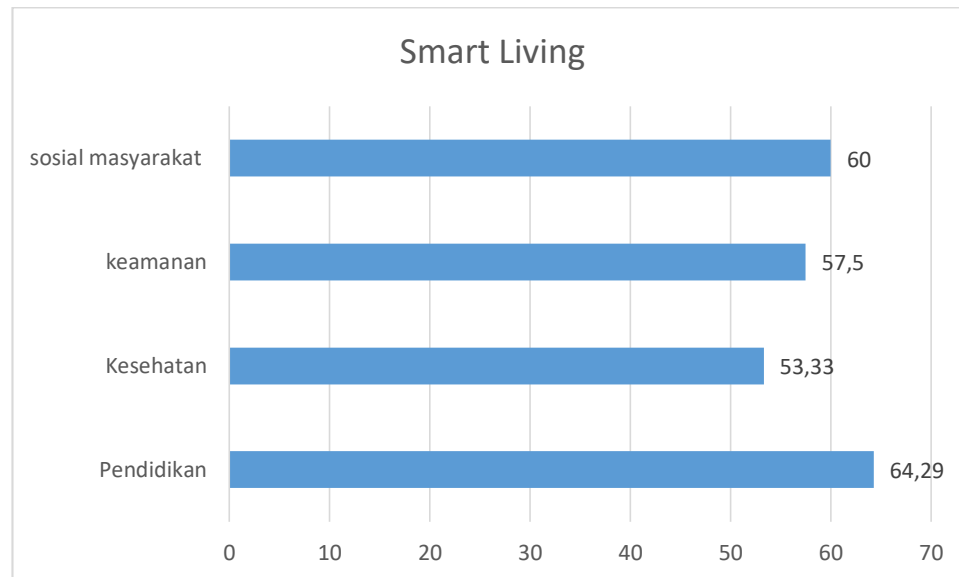
Sektor lain yang berpengaruh adalah industri dan pariwisata (54,29) yang masih belum dikelola secara maksimal. Meskipun mengalami peningkatan

yang cukup signifikan untuk industri pengolahan (26,85) namun laju industri masih relatif cukup kecil yaitu 2,95%. Sementara area wisata masih belum dikelola dengan maksimal khususnya untuk fasilitas dan kemudahan akses terhadap area wisata.

Permasalahan yang muncul dalam pengembangan daerah muncul dari SDM dan infrastruktur. Secara umum potensi yang dimiliki untuk meningkatkan ekonomi seperti pariwisata dan industri cukup baik namun minimnya pengelolaan, infrastruktur, teknologi dan SDM menjadikan potensi ini tidak dikelola dengan maksimal. Area wisata seperti masjid Cheng ho, Industri pengolahan dan industri wisata knalpot.

Smart Living

Smart Living secara umum memperlihatkan kondisi kualitas hidup dan kemudahan yang didapatkan warga dari kota. Kemudahan untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan dan berbagai kemudahan lain yang disediakan pemerintah kota. Berdasarkan hasil survei kondisi *smart living* Kabupaten Purbalingga memiliki nilai 60 atau berada pada level integrative. Nilai ini diberikan dari kontribusi komponen pendidikan (64,29), Kesehatan (53,3), Keamanan (57,5) dan Sosial Kemasyarakatan (60).



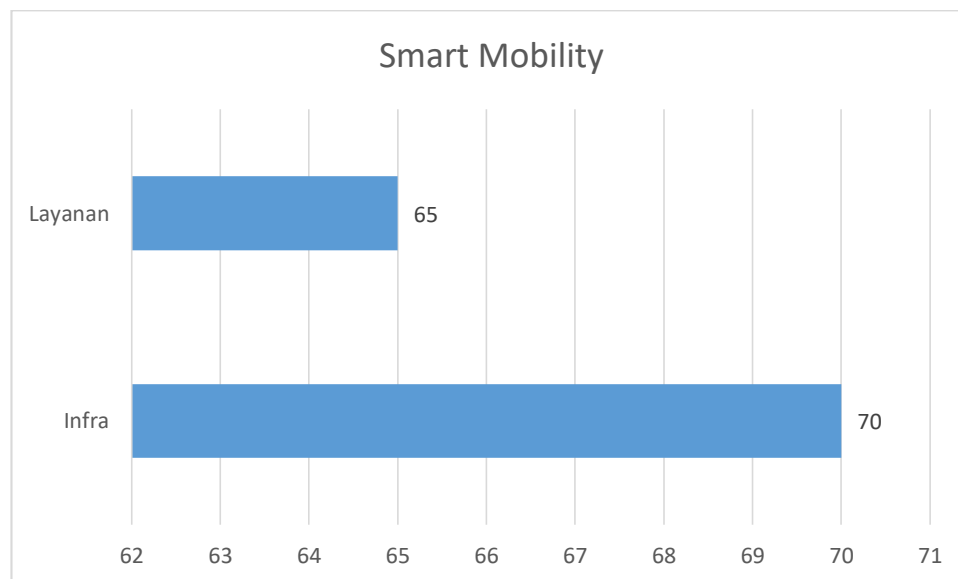
Gambar L- 3. Hasil nilai smart living

Hasil survei menunjukkan pada dasarnya kualitas hidup Kabupaten Purbalingga tidak terlalu tinggi cukup baik untuk ditinggali. Hal ini dikarenakan beberapa fasilitas cukup memadai meskipun belum maksimal. Sektor pendidikan sebagai contoh, dengan nilai 64,29 secara umum sudah cukup baik namun fasilitas sekolah dan jumlah sekolah masih dirasakan kurang memadai termasuk jumlah guru serta jumlah pendidikan tinggi yang hanya ada 1 buah.

Masalah lain yang muncul adalah bidang kesehatan, meskipun sudah memiliki beberapa rumah sakit dan puskesmas namun keberadaan SDM bidang kesehatan sangat meragukan. Jumlah dokter dan tenaga keperawatan masih dirasakan kurang untuk melayani warga. Hal demikian terjadi untuk masalah keamanan yang memiliki personil yang relatif sedikit. Namun hal ini sedikit terbantu karena minimnya kejahatan yang terjadi di Kabupaten Purbalingga ini.

Smart Mobility

Smart Mobility memiliki target untuk memenuhi kebutuhan warga dalam melakukan pergerakan sehari-hari. Secara umum tidak ada masalah krusial terkait mobilitas warga. Kabupaten Purbalingga tidak dihadapkan dengan permasalahan transportasi seperti kemacetan. Hanya saja masih diperlukan inisiasi penggunaan kendaraan umum untuk memudahkan pergerakan khususnya pendatang. Jalan-jalan yang dimiliki pemerintah juga relatif cukup baik dengan tingkat kerusakan dibawah 20%. Secara umum nilai smart mobility Kabupaten Purbalingga memiliki nilai 70. Nilai ini dihasilkan dari kondisi infrastruktur dan pengelolaan jalan yang cukup baik dan minimnya permasalahan yang terjadi.

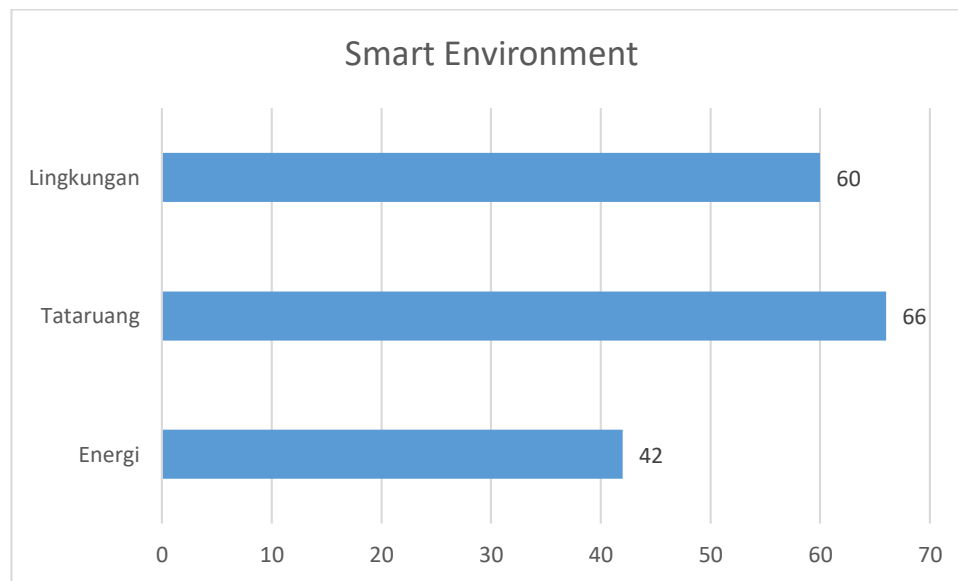


Gambar L- 4. Hasil nilai smart mobility

Minimnya permasalahan transportasi seperti kemacetan, menyebabkan kemudahan untuk melakukan pergerakan di Kabupaten Purbalingga lebih mudah. Permasalahan yang terjadi adalah proses perawatan dan pengawasan terhadap jalan dan jembatan yang dimiliki oleh pemerintah.

Smart Environment

Serupa dengan *smart mobility* permasalahan lingkungan di Kabupaten Purbalingga relatif sangat kecil, minimnya pencemaran lingkungan baik air maupun udara masih dalam kondisi normal. Hasil *assesment* menunjukkan bahwa kondisi lingkungan Kabupaten Purbalingga adalah 56. Seluruh lingkungan masih dipantau secara rutin sehingga permasalahan lingkungan khususnya pencemaran masih belum berada diambang batas. Permasalahan muncul hanya pada pengelolaan sampah. Masih diperlukan pengelolaan serta infrastruktur sampah seperti TPS yang merata dan cukup. Secara umum nilai kondisi lingkungan adalah 60.



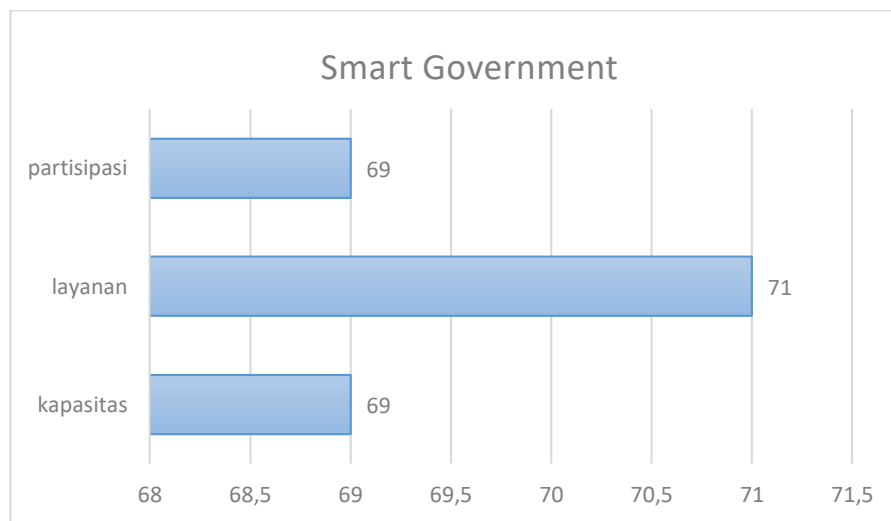
Gambar L- 5. Hasil nilai smart environment

Berbicara terkait lingkungan akan terkait dengan pengelolaan energi. Saat ini energi tidak terbarukan masih menjadi sumberdaya utama. Belum ada inisiasi dalam melakukan penghematan atau subsitusi sumber energi untuk menjaga keberlanjutan energi. Nilai yang didapat dari komponen ini hanya berkisar 42.

Terkait tata ruang, Kabupaten Purbalingga memiliki kondisi yang cukup baik. Pembangunan sudah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan RTRW pemerintah. Permasalahan utama dari komponen ini adalah keberadaan ruang terbuka hijau yang relatif masih sangat kecil yaitu 3.8%.

Smart Government

Smart Government memiliki target untuk mempermudah pemerintah dalam memberikan layanan terhadap masyarakat. Layanan ini mencakup berbagai bidang seperti catatan sipil, kependudukan, perijinan, pajak dan lain sebagainya. Dengan adanya standar SPBE layanan pemerintah sudah cukup baik meskipun belum maksimal. Hasil *assessment* memperlihatkan nilai 69,6. Hal ini dipengaruhi dari tersedianya berbagai informasi layanan Kabupaten meskipun masih berbasis kertas. Layanan umum berbasis TIK sudah mulai muncul namun hanya di beberapa OPD seperti pelaporan online dan sistem informasi pelayanan publik.



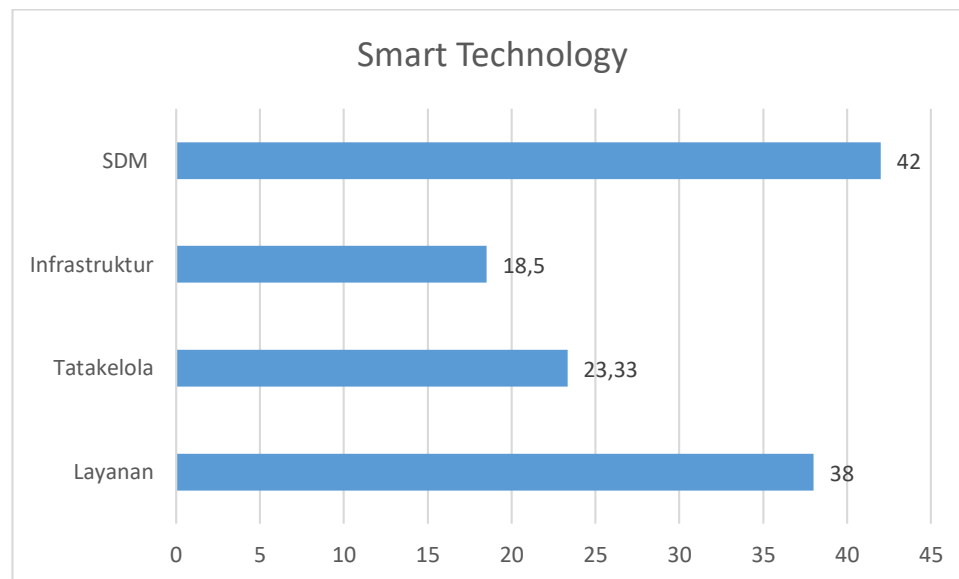
Gambar L- 6. Hasil nilai smart government

Permasalahan yang paling menonjol dari *smart government* adalah keberadaan SDM dan infrastruktur yang masih belum memadai. Di mana TIK

meskipun sudah digunakan tapi belum maksimal untuk melingkupi seluruh Kabupaten hingga ke level desa.

Smart Technology

Smart Technology adalah komponen yang sekaligus bertindak sebagai enabler atau penguat dalam pengembangan *Smart City*. Secara umum hasil *assessment* memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi di Kabupaten Purbalingga masih belum maksimal dengan nilai 30,45.



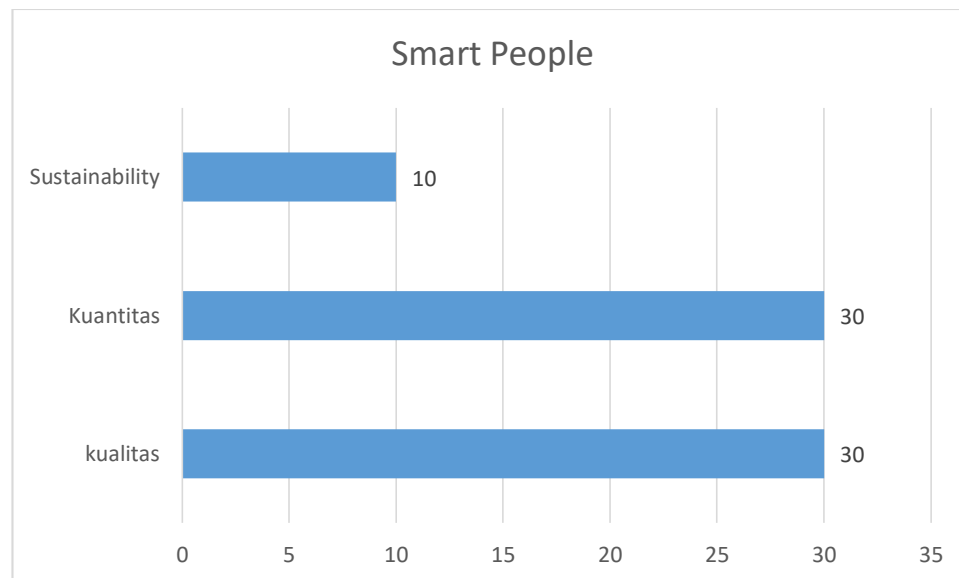
Gambar L- 7. Hasil nilai smart technology

Hasil penilaian menunjukan bahwa penggunaan TIK terus dilakukan, hanya saja permasalahan muncul pada masalah pembiayaan, infrastruktur dan SDM. Saat ini persentase OPD yang terkoneksi dengan Jaringan TIK tidak melebihi 40%. Demikian pula layanan berbasis online yang masih kurang dari 40%. Permasalahan lain adalah tatakelola TIK dan SDM yang masih minim baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Belum adanya organisasi

khusus TIK di tiap OPD menjadi permasalahan jika terjadi permasalahan terkait layanan TIK.

Smart People (SDM)

SDM merupakan faktor yang paling penting dalam pengembangan *Smart City*. Dalam hal ini menurut hasil assemen kondisi SDM Kabupaten Purbalingga masih sangat kurang (23,3). SDM yang memahami konsep *Smart City* atau enabler *Smart City* seperti TIK masih sangat minim baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

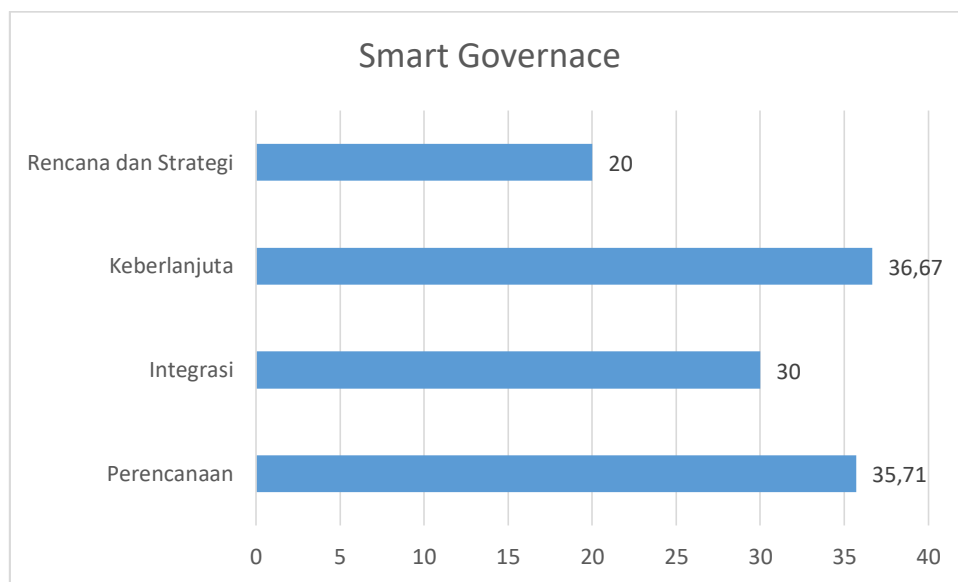


Gambar L- 8. Hasil nilai smart people

Dari segi kuantitas untuk permasalahan TIK sederhana OPD harus melakukan *outsourcing* karena keterbatasan individu. Terkait *Smart City* saat ini belum ada personil yang secara khusus memahami konsep dan implementasi *Smart City*. Untuk peningkatan kualitas pelatihan ataupun pengiriman personil dilakukan namun belum menyelesaikan permasalahan terkait minimnya SDM.

Smart Governance

Tatakelola memberikan peran yang sangat penting dalam implementasi *Smart City*. Dengan nilai yang relatif masih kecil (30,59) Kabupaten Purbalingga secara garis besar masih memulai dalam mengembangkan *Smart City*. Dari segi perencanaan Kabupaten Purbalingga belum memiliki rencana yang terarah melalui panduan yang jelas.



Gambar L- 9. Hasil nilai smart governance

Belum ada organisasi khusus baik untuk mengawasi maupun melaksanakan program-program kerja *Smart City*. Sama halnya dengan keberlanjutan strategi. Hal ini dikarenakan Kabupaten Purbalingga masih dalam tahap awal dalam pengembangan *Smart City*.

Kondisi Eksisting Inovasi dan Pemanfaatan ICT di Pemda Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak OPD yang menghadapi masalah dan memecahkan masalah melalui inovasi baik konvensional maupun berbasis TIK.

Lebih detail dari hasil survei dapat diidentifikasi dari tabel berikut:

1	BAKEUDA	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Software belum terintegrasi • SDM Personil kurang • SDM komputer kurang • Komputer sering rusak • Tidak ada proses transfer ilmu • Gedung kurang memadai • Update ilmu sangat jarang • Keamanan masih ada kasus kehilangan barang 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • 83 (5 honorer) SDM mumpuni dari sisi Pendidikan, kualifikasi baik • Internet • Server Sendiri 		
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Software dan aplikasi yang terintegrasi • Gedung dan infrastruktur • SDM 		
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Lembur sangat sering • Tambal sulam computer 		

Inovasi berbasis IT	<p>Inovasi yang sudah dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIM ASET • SIMPADA (Pajak Daerah) • SISMIOP • SIMDA Keuangan • SIM GAJI
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi yang menyediakan data yang terintegrasi • Ingin mengembangkan data satu sumber. • Tim humas • Membutuhkan pemimpin yang tahu inisiatif dan prioritas. • Sistem informasi eksekutif • Reward punishment yang jelas.

2	BKPPD	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan aplikasi kepegawaian yang mengupdate data semua opd masih banyak yang tidak melakukan up date, tetapi sudah di ingatkan karena keterbatasan tenaga ahli atau IT support pada semua opd yang tidak memiliki tenaga IT support sehingga lambat. • Ada beberapa tidak mempunyai jaringan infrastructure karena terdapat beberapa daerah yang sulit di akses. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran terbatas sehingga dukungan untuk inovasi terhambat.
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Data pegawai yang akurat up to date secara keseluruhan • E-file yang lengkap • Pelayanan kepegawaian online • SIPENAKU (sistem penatausahaan keuangan) aktual
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • SK kenaikan pangkat keluar dari aplikasi tersebut jadi mewajibkan semua OPD menggunakan aplikasi yang sudah berjalan. • Pengelola kepegawaian update data kepegawaian secara aktif, dan berkelanjutan.
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya aplikasi & kepegawaian yang lengkap • Diterbitkannya perbup tentang penggunaan dan kewajiban penggunaan e-kepegawaian
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi kepegawaian bisa diakses oleh semua pengelola kepegawaian di semua OPD
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan pembuatan surat IUMK tanpa pemohon datang ke kantor kecamatan, kemudian setelah surat selesai permohonan akan di beri kabar. • Pengiriman surat dari kecamatan ke desa menggunakan email • KGB online • Pensiun online

3	BPBD	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Minim armada. Misalkan dalam kasus kekeringan air konsumsi dalam satu hari terdapat 3 desa sedangkan armada tidak memadai untuk mencakup 1 desa 3x dan armada yang tersedia terdapat 3 armada. • Minim tenaga dalop 23, administrasi 14 orang. Tenaga analisis bencana, resiko bencana untuk prediksi bencana sebelum kejadian. 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga dalop (pengendalian operasional) terdaftar khusus. Namun tidak menutup kemungkinan tambahan dari Lembaga lain atau relawan. 		
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah armada dan tenaga • Memaksimalkan yang ada. 		
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bronjong karet, penahan longsor di seluruh Kabupaten • Pelatihan untuk peningkatan 		
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • Pantauan cuaca dan kecepatan angin • Ews tapi masih manual belum di digital, • pendeteksi gerakan tanah longsor 		
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Ews digital terkoneksi dengan smartphone. 		

4	DIMPERMADES	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem jalan seperti halnya laporan dana desa SDM tidak memadai walaupun jalan secara sistem terutama untuk di desa. • Profile desa kelurahan untuk menjadi beban, karena harus mendata tapi kekurangan tenaga ahli 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas pokok pemberdayaan desa. Pekerjaan besar tenaga kurang menangani 224 desa dengan beberapa program DDADD (administrasi desa), secara TIK memakai sistem dari Kemendagri dan provinsi Jawa Tengah 82 desa memiliki website selebihnya belum. Team ahli dari desa sangat kurang memadai. Dinas tipe B karena bersamaan dengan sistem 		
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Penunjukan 2019 masing - masing desa harus bisa mengangkat 1 tenaga IT dan menitikberatkan ke laporan keuangan. 		
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Diklatbim ada ruang pelayanan khusus rumah creative desa . • Dan terdapat WA group antar perangkat kades 		
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • Mayoritas sudah tersedia dari otoritas pemerintah di antara SID, SIMDA, SIMBANGDA, SIMRA, simpelaporan. 		

Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> Masing - masing OPD mempunyai tolak ukur kinerja, status kemajuan desa di ukur dari prodeskel Kemendagri.
-----------	---

5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> Belum memiliki arsiparis dan Pustakawan (tenaga ahli kearsipan) Belum memiliki depot arsip yang representative Kurangnya ASN tenaga teknis kearsipan dan perpustakaan Keterbatasan anggaran Gedung perpustakaan yang sudah tidak representative. 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat naskah sumber yang cukup tentang perusahaan potensial (Perusahaan rambut, davos dll) berupa Paper & digital. Terdapat Arsip statis dari tahun 1880 s/d sekarang (penyelamatan arsip) Adanya digitalisasi arsip sekolah dan arsip kependudukan Adanya preservasi arsip sekolah dan arsip kependudukan 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya 4 piloting desa tertib arsip (Beji Kec. Bojongsari, Toyareja & Jatisaba Kec. Purbalingga, Penaruban Kec. Bukateja. • Koleksi bahan pustaka berupa buku fisik dan beberapa bisa diakses secara online • Koleksi bahan pustaka berwujud buku digital dan E-pusda Purbalingga • Warnet gratis dan wifi untuk pemustaka • Perpustakaan binaan dan replikasi (perpustakaan desa)
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan enaga arsiparis dan pustakawan • Usul pembangunan Depot Arsip • Pengajuan anggaran untuk mengatasi keterbatasan Anggaran
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan tenaga teknis kearsipan dan tenaga perpustakaan diatas dengan adanya THL (Tenaga Harian Lepas) dan SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Daerah), suatu aplikasi pengelolaan arsip yang telah dikembangkan menjadi E-aring (Elektronik-Arsip Purbalingga). • Inovasi untuk mempermudah layanan kepada masyarakat dengan layanan antar buku kepada pemustaka • Inovasi layanan berbasis NIK
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • Sidomas (sistem Dokumentasi Masyarakat) : suatu aplikasi layanan penyimpanan dokumentasi masyarakat (KTP, KK, Ijazah, dll) berbasis Website

	<p>dan android khusus bagi warga masyarakat yang memiliki NIK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Silapar Buku (sistem layanan pesan antar buku) sistem layanan kepada pemustaka yang berada diluar Kecamatan Purbalingga dan berusia di atas 25 tahun
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • E-aring berbasis android • Usulan pembangunan depot arsip • Usulan tenaga Arsiparis dan Pustakawan • POCADI : Pojok Baca Digital • Layanan Berbasis NIK dengan menggunakan E-KTP Reader.

6	Dinas Pendidikan	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem mendokumentasikan arsip masih jelek, reporting dll • Recording sistem data masih jelek. (permintaan data terus menerus). • Penempatan personil tidak sesuai tempatnya • Banyak guru yang tidak bisa naik pangkat dari Gol III/C ke III/D karena tidak memenuhi angka kredit dari karya ilmiah • Kekurangan guru (ideal rasio 1 rombel 1 guru).. 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • SDM berkualitas • Sarana dan prasarana yang memadai 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan mempunyai akses yang sangat strategis bagi peningkatan kualitas pemkab
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan sistem pelaporan • Penyimpanan arsip • Pemenuhan guru • Peningkatan mutu guru
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • E-Planning pendataan SDM yang valid • Pemberian SK Bupati untuk GTT
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • PPDB Online, UNBK, Sistem Zonasi, absen online, dan raport • Database siswa melanjutkan dari SD – SMP • Database siswa tidak sekolah • Scan hasil ujian berbasis komputer
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pelaporan yang cepat, tepat dan akurat baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah tentang keuangan, progress, pekerjaan, lapor bulanan, monitoring dsb • Penyajian data yang terintegrasi mulai dari Paud Non Formal / Paud Formal, SD, SMP, dan Dikmas. • PPDB Online, UNBK • E-Planning Sarpras • SIMDA tata kelola keuangan BOS, PPDB online jenjang SMP

7	Dinas Pertanian	21 November 2018	
----------	------------------------	-----------------------------	--

Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Penolakan bantuan (bibit pisang) • Pengangkatan honorer didahulukan yang muda • Banyak kasus kehilangan tractor
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • SDM memadai • Program unggulan <ul style="list-style-type: none"> - Gula kristal - Kambing kejopo - Nanas - Program industri - Duku kalikajar
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurus SDM dahulu.
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemupukan pake drone (demo) • Live stock village (stok peternakan) • Rubuha (Rumah burung hantu) • Program petani muda
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • Website
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi penyuluhan (bibit per musim, hama, koneksi pihak ke 3) • Desa mandiri benih.

8	Dindukcapil	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Data penduduk ada tapi orangnya tidak ada. Memiliki NIK tapi belum tercatat di KTP, sehingga 		

	<p>juga dapat terjadi data penduduk yang tidak konsisten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SDM di total tenaga honorer 70 ODP 25 PNS, kekurangan peralatan infrastruktur untuk menunjang sistem administrasi kependudukan. Tidak adanya tenaga untuk pencatatan bagi orang yang disabilitas bed-to-bed jemput bola perekaman dan pelayanan fungsi lainnya. • Belum masuknya ke arah online dalam hal pencatatan misal integrasi RSU dengan dindukcapil dalam hal kelahiran bayi. • Dibatasi undang-undang namun tidak mengurangi data secara fisik.
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • OPD pelayanan yang langsung terhadap masyarakat, SDM untuk bisa melaksanakan fungsi dari lahir sampai meninggal <ul style="list-style-type: none"> - akta - kartu identitas anak - 17 KTP KK data tunggal - menikah untuk non muslim - kematian • Melayani pemilu, datang dan pergi masyarakat pindah. Warga negara asing yang teridentifikasi.
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan pemilu karena mendekati tahun politik pendekatan verifikasi data, jemput bola perekaman ke sekolah bagi pemilih umum yang dini.

	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan infrastruktur untuk arsip data agar lebih mudah dalam melayani masyarakat misal pembuatan kk
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • MoU dengan desa, mengenai perubahan data secara pelaporan desentralisasi kepada 65 desa, secara online namun terkendala dengan SDM yang terdapat di desa.
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • Perpindahan data penduduk, perubahan status untuk mengarah kepada data statistik IPM, dan telah berjalan MoU dengan 65 desa. Dan akan dilakukan inovasi untuk perekaman data dengan motor agar bisa terjangkau
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan secara digital, sementara SMS gateway seperti surat keterangan yang belum ada blanko. • Infrastruktur server, developer aplikasi.

9	Dinperindag	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya sertifikat pegawai untuk operator metrologi legal. 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar tradisional yang nyaman dan representatif • Punya UPT pengembangan industri logam • Dana dari kementerian relatif cukup besar 		
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Metrologi legal • Gedung 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Timbangan elektronik
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan SKPTTU (Tera/ tera ulang)
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • SIMHP (SIM Harga Pasar)
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • ERET (E-retribusi) • Parkir Online (Mengontrol lama parkir) • Tracking Surat antar OPD (Minimal satu OPD).

10	Dinperumkin	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitas dan kualitas SDM masih kurang • Penguasaan teknologi dan implementasi program belum optimal • Sulit memberikan pemahaman ke masyarakat • Pendataan masih manual 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur berupa Gedung, komputer, dan internet sudah memadai • Mempunyai program unggulan seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Pemugaran RLTH - Desa terang - Rusunawa - Kotaku 		
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Software dan aplikasi yang terintegrasi • SDM • Pemetaan rencana aksi 		

Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat database penataan dan pemanfaatan tanah, sebaran RLTH, Kawasan kumuh, fasilitas PSU, akses air bersih, sistem limbah domestik
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • Database penataan pertanahan dengan menggunakan sistem informasi tanah berbasis web dan android
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan database penataan pertanahan dengan data dukcapil dan perbankan

11	Dinporapar	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya media promosi digital • Terlalu mengikuti trend • Pelatihan yang kurang untuk swadaya • SDM pemerintahan yang tidak memadai • Akseibilitas yang kurang • Amenitas yang tidak memadai masih, belum memiliki hotel berbintang baru 350 kamar seKabupaten • Keterbatasan SDM: 1 orang memegang 2 bidang begitupun dengan mengelola website dan administrasi jadi tidak fokus dalam menjalankan tupoksinya 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Akseibilitas • Amenitas • Attraction • Family trip 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Masjid Cheng Ho • Destinasi wisata industri knalpot • Memiliki pokdarwis kelompok sadar wisata yang mayoritas pemuda
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan objek wisata • Pembinaan desa wisata • Pengembangan industri usaha pariwisata
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan desa wisata • Pengembangan wisata industri knalpot • Industri gerabah kerajinan tangan • Pengembangan batik canting
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • Website, Instagram tidak aktif, facebook tidak aktif
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi pariwisata base position • Tourism information centre untuk mewadahi agent trip

12	Dinraker	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak orang yang tidak tahu tentang pengaduan lowongan • Hak cuti tidak dibayar • Orang hamil yang seharusnya cuti tidak dibayar • Konflik di dalam • Terlalu administratif 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan publik untuk karir 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Cari kerja, yang sedang bekerja, dan sampai yang purna kerja. • Cari kerja: Kompeten dan tidak kompeten (UPTD PLK dan RULE dari seksi kepelatihan (untuk pasar kerja dan mandiri)) ditempatkan di satu lowongan kerja, sedangkan setelah bekerja bisa di tempatkan oleh industrial • Sedang bekerja: Hak lembur, upah, cuti. UMK diberikan pada tahun pertama saja, konflik antar pekerja • Purna kerja berhenti bekerja
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan terobosan dalam hal aplikasi • Untuk kepelatihan informasi • Bantuan hukum • Membuat Perda wajib lowongan pekerjaan berdasarkan Perpres, agar menjadi mediasi bagi para pencari kerja sesuai data yang dimiliki oleh dinas tenaga kerja agar tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk mencari lowongan kerja.
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat sistem informasi yang dapat melayani masyarakat yang terintegrasi ke pusat, sehingga tahu hak dan kewajiban orang yang bekerja serta pengembangan skill masyarakat Purbalingga.
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan aplikasi android • Simulasi simulasi tentang ketenagakerjaan

	<ul style="list-style-type: none"> • Simulasi perhitungan pensiun, pesangon, lembur, struktur dan skala upah, uang pisah dan penggantian hak. • Dinamai : SIKAPBANGGA (sistem informasi ketenagakerjaan Purbalingga)
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem informasi untuk mendukung lapangan pekerjaan, mensosialisasi apps mobile yang akan dikembangkan

13	Dinhub	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah kendaraan sulit memperpanjang izin trayek yang dimiliki. Ijin trayek dibuat satu tahun sekali, namun keadaan di lapangan termasuk kurangnya kesadaran hukum untuk melakukan perpanjangan dengan alasan sepi penumpang dan banyak yang menggunakan kendaraan pribadi. Upaya koordinasi dengan Organda supaya sadar hukum sekali-sekali di koordinasi dengan lintas. SIM mempercepat pelayanan proses, mengeluarkan izin trayek tidak sekedar mengeluarkan izin sembarangan karena harus ada kelayakan • Minta tenaga ahli hukum, tenaga akuntansi, dan transportasi darat dari sisi kecelakaan yang paling utama. Serta membutuhkan tenaga ahli keselamatan jalan. Sudah ada sistem manajemen pada Januari 		

Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan parkir • Pelayanan Sistem informasi PKB • Pelayanan Retribusi terminal type C (dalam kota) • Pelayanan Izin trayek
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan diklat antar daerah untuk memberikan wawasan terhadap keselamatan jalan sesuai teknis (muatan dan ketebalan jalan).
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun subterminal di terminal terminal strategis. • Dikelola langsung oleh dishub melalui organda.
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • Sim-PKB (sistem informasi pengujian kendaraan bermotor) • Sim-Ijin trayek • Simcard Parkir (e-vallet parking)
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Sim PKB • SIM Parkir

14	DLH	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan data di sektor lain (OPD) minim • Perencanaan belum terpadu • Masih muncul ego bidang. • Pengolahan sampah masih konvensional ditimbun di TPA • Sistem masih rumit dalam pengaplikasiannya 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • SDM secara kualifikasi ok • Basis data dan inventaris yang mulai di tata. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen persampahan yang baik
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan integrasi data dan berbagi data antar sektor • Pengelolaan sampah dengan bantuan teknologi • Adanya survei kolektif data pendukung yang berada di sektor/ dinas lain
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti yang ada
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • Website • Aplikasi yang menginduk ke pusat
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya arsip / lemari digital yang bisa diakses dan di input oleh pihak-pihak yang berkepentingan • Perlunya raw data spasial (saat ini masih terpisah) • Perlu aplikasi manajemen sampah • Early warning system pencemaran air dan udara

15	DPTMSP	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan langsung online (hal baru) OSS (Online Single Submission) • Pemahaman masyarakat masih terbatas (lebih banyak usaha kecil) • Sistem terpusat di negara (jadi aturan tergantung masalah). Jadi kalau ada permasalahan tidak bisa berjalan • Penanaman modal masih belum terbuka (belum tersistem sehingga belum terakses) 		

	<ul style="list-style-type: none"> Stakeholder masih belum faham aturan baru mengenai OSS
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> SDM usia muda dan produktif Minimal mengenal komputer Sarana cukup memadai (komputer, internet dll)
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan online Di pelayanan perijinan online agar dipahami oleh semua masyarakat (sosialisasi)
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> Layanan sekaligus pembelajaran mobil keliling (jemput bola)
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> Website Layanan perizinan online
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> Kiosk Informasi (tentang perizinan) (touch screen mandiri)

16	DPUPR	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> Banyak aset yang belum teraudit terutama aset irigasi belum update, aset jalan divendorkan ke pihak ke tiga periode selama 5 tahun. Updating infrastruktur yang terlambat karena Gedung, jalan, dan jembatan tidak bisa termonitor setiap hari jadi jika terjadi kerusakan bisa dilaporkan oleh masyarakat. 		

	<ul style="list-style-type: none"> Operasional internal masih kurang, internet, kendaraan roda 2 yang berfungsi untuk di survei ke daerah dari laporan.
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> SDM terbatas dengan tenaga 110, tenaga berbasis teknis 25 yang struktural. Kemampuan 1 tenaga kerja dapat membidangi 10 kegiatan kerja. Mengeluarkan pelayaranan non perizinan tata ruang di luar pemukiman rekomendasi perijinan ke DPMPTSP. Data base aplikasi mengenai seluruh utilitas tata ruang Maintenans, permasalahan yang di SK kan Oleh Bupati
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> Updating data base ke softcopy, dan monitoring. Pelaporan progress yang sedang berjalan untuk memberikan info kepada dinas dinas lain untuk pelaporan
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> pengembangan dari 3 bidang jalan jembatan Gedung karena basis datanya beda dan cara updatenya pun berbeda
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan dan memiliki android si Jakabangga, masih dalam pengembangan untuk bisa link ke provinsi seperti maturbup tapi lebih umum untuk pelaporan Database
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan aplikasi untuk monitoring-evaluasi, aplikasi untuk mengurus bina marga, sumber daya

	air, cipta, karya, penataan ruang dan bina program dalam mengkolaborasikan agar setiap kepala bidang dapat mengakses silang dan informasi seperti halnya ketentuan-ketentuan dalam hal cek zona tertentu misal zona kuning atau zona hijau
--	--

17	Inspektorat	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan audit, tidak seperti dulu. Lebih ke audit kinerja. Untuk mendukung hasil kinerja untuk mendukung kinerja, pewadahan dan SDM terlatih di bidang IT support minimal dalam membantu voting audit dan hardware 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • SDM sudah banyak melek teknologi sampai studi banding ke Bandung 		
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • IT Support minimal satu orang sebagai tenaga ahli, dan maintance pada e-audit, e-voting 		
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan berbasis web, e-audit, dan ingin mengubah laporan ke bupati secara hardcopy • Audit kinerja baru di implementasi antar OPD dan kecamatan sedangkan untuk desa pembukuan masih manual pemahaman akuntansi yang masih kurang 		
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • SIMWAS (Pengawasan) inspektorat offline • Simwas propinsi • Simwas BPK • Pengaduan berbasis WEB 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Akses Penuh SIPDA (tata kelola keuangan)
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaksimalan pemahaman IT agar lebih efisien (IT Support) • jaringan internet berbasis intranet

18	Kec. Bobotsari	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Birokrasi terkendala terkadang harus menunggu tanda tangan camat, sedangkan camat harus melakukan dinas keluar agar birokrasi tidak berhenti • Permasalahan administrasi surat menyurat secara resmi, walaupun sudah di kirim secara virtual melalui media sosial. • Mengurus pernikahan dalam waktu 3 hari (dispensasi) surat rekomendasi melalui tanda tangan camat. 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • OPD Kecamatan bobotsari telah memiliki website dan email untuk tetapi tidak beroperasi optimal. • Memiliki Objek wisata Tuping • Produsen Batik canting khas Purbalingga • Wilayah strategis (kota dagang) dari utara (Pemalang) ke Selatan (Purbalingga) • Festival Desa. • Outsourcing bulu mata 		

Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • SDM tenaga ahli IT support • Mindset menerima bantuan walau secara ekonomi cukup karena terbiasa
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan pembuatan surat tanpa pemohon datang ke kantor IUMK tanpa pemohon datang ke kantor kecamatan, kemudian setelah surat selesai permohonan akan diberi kabar • Pengiriman surat dari kecamatan ke desa menggunakan email
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan pembuatan surat IUMK tanpa pemohon datang ke kantor kecamatan, kemudian setelah surat selesai permohonan akan di beri kabar. • Pengiriman surat dari kecamatan ke desa menggunakan email

19	Bagian Kesejahteraan Rakyat	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan akses ke masyarakat bagian kestra • Semua masih manual 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • SDM (OK) • Anggaran 		
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Ingin mengonlinekan semua 		

Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM HIBAH
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • MADIN PURBALINGGA (Memonitoring keberadaan madin). Madinpurbalingga.id
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Kestra mobile app • Less paper • Pengen ada platform penampung aspirasi. • <i>Smart City</i> segera di masyarakat. Smart sesungguhnya.

20	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan SDM 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Bag. Adbang memiliki tugas dan fungsi sebagian tugas pokok Asisten Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan dan merencanakan teknis operasional dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan yang ada 		
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan SDM yang ada 		
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kami membangun SIMBANGDA untuk mengetahui laporan belanja langsung APBD yang semula manual kami input dari laporan yang dikirim oleh OPD 		

	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan yang dihadapi masih ada OPD yang belum lapor melalui SIMBANGDA sehingga capaian kinerja masih rendah
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> Simbangda (Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah) merupakan Sistem Informasi manajemen berupa aplikasi pelaporan secara online untuk memantau perkembangan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien dan efektif.
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan menu simbangda

21	Bagian Hukum Setda	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya personel Kurangnya SDM yang menguasai IT Kurang maksimal pada pelayanan permasalahan hukum 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> SDM mempunyai kualitas yang bagus Sarana dan prasarana yang mendukung TI 		
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan personel yang menguasai IT Memaksimalkan pelayanan permasalahan hukum kepada masyarakat 		
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> Konsultasi dan menambah pengetahuan terkait pengelolaan pelayanan permasalahan hukum kepada masyarakat secara langsung dengan klinik konsultasi bantuan hukum dan berbasis website 		

	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat jaringan dan dokumentasi hukum dengan penguatan jdiH dan sistem perpustakaan
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> Website Library sistem (sudah lama)
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> Library system terkait pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Integrasi website JDIH ke jaringan BPHN SOP terintegrasi tentang hukum (Tracking posisi dokumen)

22	Bagian Humas	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian OPD terhadap SOTK karena bagian baru yang dibentuk 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Manusia sebanyak 15 orang Tersedianya jumlah anggaran Sarpras yang ada 		
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman terhadap tugas bagian humas dan protokol sesuai dengan peraturan yang ada Melaksanakan koordinasi dengan OPD lain dalam rangka menjalankan tugasnya 		
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> 		
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> 		

Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas kehumasan bagi ASN bagian humpro khususnya terkait IT
-----------	--

23	Bagian Ortala	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada aplikasi E-SAKIP • Belum ada tata naskah dinas elektronik • Belum ada aplikasi E ANJAB • Pengukuran IKM Manual 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan SDM terhadap TI sudah baik 		
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi E Sakip • Aplikasi E ANJAB • Tata naskah Dinas Elektronik • Survei Kepuasan Masyarakat Terintegrasi 		
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengintegrasian dengan mengadopsi E SAKIP • Penggunaan Excel Untuk Penghitungan ANJAB & ENJAB 		
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada 		
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • E SAKIP • E ANJAB • TNDE 		

24	Bagian Pemerintahan Setda	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • ANGGARAN • SDM • SAPRAS 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan penyusunan LPPD dan LKPJ Bupati secara on line • Penyusunan Data Base Kepala Desa dan Perangkat Desa dan dapat diakses secara on line • Pelayanan Paten di Kecamatan yang terintegrasi dengan OPD teknis yaitu Dinpendukcapil, DPMPTSP, Satpol PP, dan Dinas Teknis lainnya • Pelaksanaan Pilkades yang dilakukan secara on line dengan menggunakan KTP-el (bukan menyoblos) • Sistem informasi kerjasama yang telah dan akan dilaksanakan Pemda dengan Pihak Lain 		
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Kerjasama • Aplikasi Database Kepala Desa Dan Perangkat Desa • Aplikasi Paten Yang Terintegrasi • Aplikasi E-LPPD Dan E-LKPJ Bupati • Pilkades On Line dengan KTP-El 		
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Ada 		
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • TIDAK ADA 		

Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Kerjasama • Aplikasi Paten Yang Terintegrasi • Aplikasi E-LPPD Dan E-LKPJ Bupati • Aplikasi Data Base Kepala Desa Dan Perangkat Desa
-----------	--

25	Bagian Pengadaan	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak punya data yang terintegrasi tentang pengadaan • Sistem masih ribet 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai kewenangan dalam pengadaan 		
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi SIMDA, SIRUP, SPSE 		
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti yang ada 		
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • SDM masih kurang • SIMDA • SIRUP (Pengumuman pengadan) • SPSE • SIMBANGDA (Monev) 		
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • SIRUP (Sistem informasi rencana umum pengadaan) sendiri. • Sistem pengadaan langsung langsung. 		

26	Bagian Perekonomian	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan SDM yang memadai • Fasilitas yang belum memadai 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia 13 orang • Tersedianya jumlah anggaran • Saprass yang ada 		
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Mencukupi kebutuhan dari SDM tersebut sehingga pekerjaan akan dapat diselesaikan secara baik 		
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi yang dilakukan secara up to date terhadap perkembangan jaman yang sudah berbasis era digital tapi tetap berpegang pada koridor kita sebagai orang timur • Cerdas dalam menggunakan atau memfilter teknologi yang semakin baik khususnya kita sebagai ASN 		
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • 		
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Prioritas utama lebih dapat meningkatkan kinerja serta layanan kepada publik sehingga akan terjadi hubungan yang baik dengan masyarakat khususnya 		

27	BAPELITBANGDA	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Baru ada litbang sehingga belum stabil • Belum ada jabatan fungsional (missal peneliti) • Masih hanya fasilitator (Harusnya ada inisiasi) • Adanya permintaan tanpa memperhatikan kebutuhan • SDM kopetensi sudah dianggap mampu • Rata2 jenjang Pendidikan tinggi 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi litbang (belum ada jabatan fungsional tertentu) 		
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Diawali dari desa dan kecamatan • Ada dana desa, ADD, dll • DPU PR peer • Penajaman di tingkat Kabupaten • Penyusunan RKPD • Evaluasi RPJM • Dievaluasi tiap tahun • Rata-rata undangan 9 hari 		
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Lomba krenova Kreasi inovasi masyarakat (tingkat Kabupaten yang nantinya diangkat ke provinsi) 		
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • SIMRAL (sistem informasi pengangan dan pelaporan) • SIPD (Sistem Informasi Profil Daerah) • SIMBANKEU (Sisfo bantuan keuangan) • KRISNA (usulan dana alokasi) 		
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • 		

28	DINKES	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Tiap puskesmas harus selalu diingatkan dalam pelaporan • Belum adanya SPGDT yang berbasis android • Data info belum real time (kamar) • Info ketersediaan darah • Server • Tracker udah di ambulans tapi belum dimanfaatkan 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • SPGDT • SDM • SIMPUS (Sistem Informasi puskesmas) • Diarahkan digital • Gedung dan prasarana bagus • Sinyal Internet 100mb • SDM berkualitas 		
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • SPGDT • Aplikasi surat izin praktek (terintegrasi) 		
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Masih manual orang 3 shift 		
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • SIMPUS (Sistem informasi Puskesmas) • SEKSI ONLINE • KOMDAT (Dari seksi ke perencanaan ke dinkes provinsi) • APLIKASI HONOR 		
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • SPGDT MOBILE 		

29	DINSOS DALDUK KB P3A	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan administrasi perkantoran belum optimal • Kualitas disiplin aparatur pemerintah belum optimal • Kualitas dan kuantitas sistem pelaporan belum optimal • Pemberdayaan PMKS belum optimal • Kualitas dan kuantitas pelayanan dan rehabilitasi penyakit sosial PMKS • Pembinaan anak terlantar belum optimal • Pembinaan para penyandang cacat dan trauma belum optimal • Pemberdayaan kelembagaan kesos belum optimal • Pencegahan dan penanggulangan bencana (alam dan social) belum optimal • Pertumbuhan penduduk cukup tinggi yaitu sebesar 1,06% (2014) • Kepesertaan KB belum optimal (76,22%) • Tingginya angka drop out KB (30%) • Masih tingginya pasangan usia subur yang ingin ber-KB dan tidak terpenuhi (12,5%) • Rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga. Keluarga sejahtera (55,01%) keluarga pra sejahtera (24,9%) 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Program unggulan <ul style="list-style-type: none"> ○ Kampung KB ○ Penanganan PMKS ○ Kabupaten Layak Anak
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Terdampingnya keluarga penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) kementerian sosial RI • Peningkatan jumlah peserta KB aktif (CFR) • Peningkatan Presentase TFR • Peningkatan jumlah akseptor MKJP • Peningkatan presentase kelahiran perempuan • Jumlah penanganan kasus terkait pelayanan KB/ tidak terlayani karena alasan khusus • Penurunan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan • Tersusunnya profile gender Kabupaten Purbalingga • Presentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • SKTM (1 hari jadi saat itu juga) • Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) • Pelaksanaan pendataan keluarga guna mengetahui kondisi tingkat kesejahteraan keluarga yang sebenarnya

	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengembangan cakupan dan kualitas kelompok UPPKS guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam peningkatan ekonomi produktif • Pembentukan kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) • Penyampaian advokasi melalui gerak mobil unit penerangan (MUPEN) KB dengan cara pemutaran film diselingi penyampaian pesan kepada masyarakat • Pembentukan kelompok pembinaan pusat informasi dan konseling remaja PIK-R • Program kampung KB dengan sasaran rukun warga tertinggal • Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak • Pembentukan predikat Kabupaten / kota layak anak
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • Website OPD • Pelaporan online • SIGA
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Akses kependudukan online

30	DKPP	21 November 2018	
-----------	-------------	-------------------------	--

Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Personel • Anggaran • Tiap anggota masih belum tahu tugas fungsi
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya pangan lokal untuk diolah • Potensi pemanfaatan pekarangan untuk tanaman pangan • Potensi perairan untuk produksi perikanan • Wifi, internet, komputer
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan konsumsi ikan
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan surat (dikopi) di meja. • Menanam tanaman antar anggota.
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • Smart fish (kordinasi antar pihak pihak tentang ikan)
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Akses data antar SKPD (terpusat) • Rapat tidak harus datang bisa online • Ingin <i>Smart City</i> mempermudah komunikasi antar OPD.

31	Kecamatan Purbalingga	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ada tindak pencurian • Kurangnya tempat kuliner • Adanya antrian pengurusan Kependudukan, KK. • SDM masih kurang • Pemahaman IT masih minim 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor kecamatan belum di lewati kendaraan.
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Kerajinan batok kelapa • Kuliner (Soto misdar, Soto So, Soto klamud) • Badok center • Sungai klawing
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan pegawai
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • One service one day • Lari sonten • Inovasi Batu akik
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • Sosmed Kecamatan
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengurusan KTP • Sistem pengurusan KK

32	KESBANGPOL	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan SDM 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • SDM (Setiap tahun membentuk kader) 		
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan permasalahan penjadwalan 		
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • SARAH SEHAN (Mengarahkan masyarakat, sosialisasi) 		

Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • Sosial media
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada website • Izin penelitian online • Izin pendirian rumah ibadah • Izin pendirian LSM

33	RSKBD	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah Izin (RSIA atau RSU tipe D) • Masih belum bisa bayar non tunai 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Gedungnya Baru • Pelayanan berkualitas • Dokter spesialis kebidanan dan kandungan 		
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • visitasi perizinan 		
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi kekurangan untuk kelengkapan visitasi. Contoh: ruangan • Melengkapi SDM • Melengkapi administrasi 		
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • Antrian SMS • Pencarian kamar pasien 		
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi android pendaftaran • Aplikasi pembayaran lewat bank • Aplikasi informasi biaya di android 		

34	RSUD	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Antrian sampai membludak (bisa sampai 800) • Udah ada pendaftaran online (penggunanya hanya 10%) • SDM smuanya belum terbiasa 		
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • SDM ada 4 orang IT • SIMRS sudah online semua sampai pembayaran (rawat inap) • Sudah non tunai • Koneksi internet • Komputer memadai 		
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Antrian pendaftaran 		
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran Online • Ingin bisa lihat RM terintegrasi (1 NIK 1 Rekamedis) 		
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran Online android • Aplikasi android cek ruangan 		
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Ingin aplikasi pendaftaran berbasis Nik bukan RM • Jadwal Informasi dokter realtime 		

35	SATPOL PP	21 November 2018	
Permasalahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya sumber data yang terintegrasi dalam database dari masing-masing bidang • Personil minim 		

Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas SDM • Program seperti: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Pemetaan daerah rawan tibus tranmas ◦ Pelayanan pemadam kebakaran • Internet ok
Prioritas utama	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pemetaan permasalahan tribum tranmas dan data lainnya berbasis SIG • Pemenuhan personil
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perawan Makan Manggis (Peta Rawan Keamanan Ketertiban Menggunakan Informasi Geospasial) atau disebut juga peta Tribum Tranmas • Pelayanan Simpatik Satpol PP
Inovasi berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> • Satu Data Purbalingga, email dan website • Media social (FB, Instagram)
Keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan Penyebaran PKL • Pemetaan jumlah perumahan • Pemetaan bangunan / Gedung / sekolah berlantai 2 atau lebih • Pemetaan daerah rawan kebakaran

Dokumentasi Kegiatan Survei

Gambar	Keterangan
	<p>Survei kepada OPD Dinas Perhubungan</p>
	<p>Survei OPD</p>

	<p>Survei OPD</p>
	<p>Foto bersama setelah survei berakhir</p>

Lampiran B: Laporan Pelaksanaan Focus Group Discussion

Lokasi Kegiatan: Waroeng Joglo Purbalingga, jl. Kanoman no 3-5 Purbalingga

Daftar Acara

Waktu	Acara
09.00 – 10.00	Paparan kemajuan hasil penyusunan masterplan
10.00 – 11.00	Diskusi dan tanya jawab
11.00 – 12.00	Penutupan dan ramah-tamah

Peserta Acara

Peserta	Afiliasi
I Made Ariya Sanjaya	PT Kazee Digital Indonesia
Irfan Maliki	
Pujo Laksono	
Bp. Sridhadi	Dinkominfo Kab Purbalingga
Ibu Baryati	
Bp. M. Subhan	
Bp. Sigit	

Paparan Hasil Penyusunan

Paparan hasil kemajuan penyusunan masterplan *Smart City* Kabupaten Purbalingga dilaksanakan oleh Bp. Irfan Maliki dan Bp. Ariya Sanjaya dari PT Kazee Digital Indonesia. Untuk Kabupaten Purbalingga memperoleh nilai

sebesar 47,8. Nilai tertinggi termasuk untuk pemerintahan, nilai terendah termasuk untuk SDM dan tatakelola.

Masukan dan Hasil Diskusi

Adapun beberapa hasil diskusi yang diperoleh dari pelaksanaan FGD ini adalah sebagai berikut:

1. Agar direncanakan target capaian program *Smart City* untuk Kabupaten Purbalingga dengan nilai sebesar 70 hingga lima tahun ke depan.
2. Pencapaian target nilai *Smart City* tersebut diturunkan ke dalam beberapa langkah untuk diwujudkan dalam kurun lima tahun.
3. Presentasi akhir kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2019.

Dokumentasi FGD

Gambar	Keterangan
	<p>Pemaparan oleh PT Kazee</p>

	<p>Tim Pemapar dari PT Kazee</p>
	<p>Audiensi oleh Dinas Kominfo Kabupaten Purba- lingga</p>
	<p>Penutupan oleh Kepala Dinas Kominfo, Bp. Sridhadi</p>

Lampiran C: Laporan Paparan Kemajuan Penyusunan Masterplan

Lokasi Pelaksanaan

Kantor Bupati Purbalingga, jl. Onje no 18, Purbalingga

Daftar Acara

Waktu	Acara
13.00 – 14.00	Paparan kemajuan hasil penyusunan masterplan
14.00 – 15.00	Diskusi dan tanya jawab
15.00 – 16.00	Penutupan dan ramah-tamah

Peserta Acara

Peserta	Afiliasi
Dyah Hayuning Pratiwi	Plt. Bupati Purbalingga
I Made Ariya Sanjaya	PT Kazee Digital Indonesia
Irfan Maliki	
Pujo Laksono	
Bp. Sridhadi	Dinkominfo Kab Purbalingga
Ibu Baryati	
Bp. M. Subhan	
Bp. Sigit	

Paparan Hasil Penyusunan

Paparan hasil kemajuan penyusunan masterplan *Smart City* Kabupaten Purbalingga dilaksanakan oleh Bp. Irfan Maliki dan Bp. Ariya Sanjaya dari PT Kazee Digital Indonesia. Paparan berisi langkah-langkah untuk mewujudkan

konsep Smart City, metode penilaian, dan hasil penilaian. Untuk Kabupaten Purbalingga memperoleh hasil penilaian sebesar 47,4 (tingkat scattered) berdasarkan kondisi eksisting dan potensi yang dimiliki Kabupaten Purbalingga. Diperlukan masukan untuk konsep dan visi *Smart City* Purbalingga.

Masukan dan Hasil Diskusi

Plt. Bupati: Arah dari *Smart City* Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi Kabupaten Purbalingga. Fokus utama pada efisiensi pada segala hal, utamanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Arah ke depan *Smart City* agar dapat membantu pemerintah dalam efisiensi pekerjaan, salah satunya adalah keberadaan Command Center untuk memantau permasalahan yang dihadapi Kabupaten. Integrasi data antar OPD juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan kinerja Pemkab. Menuju Kabupaten Purbalingga mandiri dan berdaya saing dengan Smart City.

Plt. Bupati: Nilai SDM yang masih rendah perlu ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya *Smart City* Kabupaten dengan optimal. Salah satu target utamanya misalnya tahun 2019 untuk sosialisasi paperless government. Perlu ada gambaran dari paparan Kazee, dan ini belum diperoleh. Perlu lebih detail dalam hal tujuan dan langkah-langkah untuk mewujudkan program Smart City, termasuk program tahun per tahun.

Kazee: kunjungan pertama ini untuk mendapatkan masukan dalam hal finalisasi roadmap. Dengan mendapatkan feedback, maka penyempurnaan laporan akhir dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Beberapa langkah yang perlu diambil termasuk pembentukan dewan *Smart City* untuk menentukan arahan dan mengawasi pelaksanaan implementasi Smart City. Tahapan dan langkah strategi implementasi termasuk lima tahap utama: penetapan visi,

penguatan SDM dan kebijakan, penguatan teknologi dan infrastruktur, program unggulan, dan perluasan dampak dan manfaat.

Plt. Bupati: Infrastruktur akses internet bagi masyarakat perlu ditingkatkan, salah satu di antaranya dengan meningkatkan jumlah access point di tempat umum. Pada dasarnya peningkatan infrastruktur teknologi (skor 18,5) perlu ditingkatkan secara pesat. Perlu langkah-langkah apa saja pada tahun pertama?

Kazee: Pendataan aplikasi, server, dan jaringan untuk memahami kebutuhan integrasi dari semua OPD. Setelah ada data kebutuhan, nanti bisa diimplementasikan infrastruktur secara bertahap.

Plt. Bupati: Mulai dari OPD yang penting dan siap. Salah satu permasalahannya adalah keberadaan jaringan FO tapi belum ada aplikasi yang terintegrasi. Perlu masukan aplikasi apa saja yang perlu diintegrasikan dahulu. Salah satu permintaan adalah untuk melihat data kemiskinan dan data kesehatan dari masing-masing OPD yang memiliki data tersebut. Untuk referensi dapat meninjau Satu Data Bandung sebagai bentuk nyata integrasi data dari berbagai OPD yang berbeda meskipun aplikasi dan basis data berbeda wujud.

Dinkominfo: Listrik dan jaringan dan server perlu mendapatkan prioritas untuk menjaga kualitas layanan. Belum ada genset. Untuk pengadaan 2019 terbentur pada anggaran yang terbatas. Tahun lalu sempat diadakan oleh bagian umum tetapi pengimplementasian akhirnya untuk seluruh Setda.

Kazee: Mohon dapat dikaji mengenai migrasi server menuju server dinkominfo propinsi dan kementerian. Aplikasi sekunder dapat dititipkan di server luar. Program SDM dapat diusulkan dengan program magang, bekerja sama dengan instansi pendidikan dari kampus atau SMK. Masalahnya

mahasiswa magang umumnya tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Karena itu perlu ada checklist untuk persyaratan mahasiswa magang. Untuk wifi: pihak ketiga siap membantu apabila Pemkab lebih proaktif, misalkan dalam menyusun proposal kerja sama. Termasuk proposal perpanjangan apabila waktu CSR sudah habis. Pada pengolahan data dan informasi, maka diperlukan sistem penindaklanjutan sistem pelaporan masyarakat dan dokumentasi untuk visualisasi dan pelaporan.

Plt. Bupati: Ingin seperti Banyuwangi, di setiap desa perangkatnya sudah melek IT. Integrasi layanan desa menuju pusat, sehingga penduduk tidak perlu ke pusat Kabupaten untuk mengurus surat-surat.

Kazee: apabila potensi masing-masing desa sudah diidentifikasi, maka kebutuhan masing-masing desa dapat dikenali dan saling melengkapi, dengan demikian meningkatkan kemandirian desa-desa di Purbalingga.

Plt. Bupati: Sudah ada program pemuda unggulan di desa untuk mendukung inovasi di masing-masing desa. OPD perlu menindaklanjuti agar pertumbuhan desa dapat dipercepat.

Kazee: Embrio CEO desa perlu ditindaklanjuti untuk mempercepat pertumbuhan desa berbasis wirausaha, dengan arahan *Smart City* task force. Dana tidak perlu semua berasal dari Kominfo.

Plt. Bupati: Target dalam lima tahun perlu direncanakan hingga skor 65-70. Waspada dengan perkembangan jaman dan perubahan teknologi. Mengacu pada Banyuwangi sebagai referensi. Program unggulan ke arah pengembangan UMKM dan Pariwisata. Misalnya Desa Digital Dagan dan Karanganyar, Desa Batik Karangbanjar, Desa Wisata (ada sekitar 15). Akses dari bandara akan beroperasi tahun 2019. Arah keseluruhan adalah

peningkatan ekonomi, meningkatkan kemandirian dan daya saing.
“Purbalingga Mandiri dan Berdaya Saing”.

Dokumentasi Paparan

Gambar	Keterangan
	Pembukaan oleh Kadin- kominfo
	Paparan dari PT Kazee

	<p>Paparan oleh Kazee</p>
	<p>Tanggapan oleh Plt Bupati Purbalingga</p>



Tanggapan
oleh Kazee

Lampiran D: Jumlah SIM Di Kabupaten Purbalingga

No	Aplikasi	OPD
1	Sistem Pendataan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	SIMDA	Bakeuda
3	SIMDA ASET	Bakeuda
4	SIPKD	Bakeuda
5	SIMBADA	Bakeuda
6	SIMGAJI	Bakeuda
7	SISMIOP	Bakeuda
8	SIMPATDA	Bakeuda
5	SIM-NUPTK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	BIOS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	BOS KITA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	SOP Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Profil Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	SIM Dapondik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Emis dan Trims	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Aplikasi Laboratorium Bahasa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Sistem Informasi Pembelajaran	SMP N 3 Karangreja
13	Aplikasi Biosystem Ver. 3.8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Aplikasi Software Pembelajaran	SMP N 4 Kemangkon

17	Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan
18	Sistem Informasi Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Goeteng Tarunadibrata
19	Sistem Informasi Kepegawaian	RSUD Goeteng Tarunadibrata
20	Sistem Informasi Manajemen Apotik	RSUD Goeteng Tarunadibrata
21	Sistem Surat Elektronik	Dinkominfo
22	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Dinpendukcapil
23	Program Aplikasi Informasi	Dinpendukcapil
24	Sistem Penyusunan Data UMKM	Dinperindag
25	Sistem Informasi Perizinan	DPMPTSP
26	SIMWAS (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan)	Inspektorat
27	SIPTL (Pengelolaan Pemantauan Pelaporan TLRHP BPK-RI)	Inspektorat
28	SIMHP	Inspektorat
29	Smartmap	Bakeuda
30	e-Kepegawaian	BKD
31	SAPK	BKD
32	Simbangda	Bagian Pembangunan
33	Otomasi Layanan Perpustakaan	Dinas Arpus
34	Silapar Buku	Dinas Arpus
35	Sidomas	Dinas Arpus
36	Simarga	Dinas Arpus
37	Sisdabudpar	Dinporarpar
38	Simral	Bappelitbangda
39	e-Presensi	Dinkominfo
40	e-Akun	Dinkominfo
41	Sistem Informasi Desa	Dinkominfo

41	SIMYANMAS	Kelurahan
42	Siskeudes	Dinpermasdes
43	SIMHP	Dinperindag
44	SI-JAKA BANGGA	DPU - PR
45	BPHTB Online	Bakeuda
46	E-SPPT	Bakeuda
47	SIMPUS	Dinkes
48	Laporan Online V.1.1	Dinkes
49	Komdat V.1.1	Dinkes
50	APP KEU	Dinkes
51	Perizinan Online	Dinkes
52	E-Kasir	Dinkop UKM
53	Online Single Submission	DPMPTSP
54	Sicantik Cloud	DPMPTSP
55	Aplikasi Inslite V3	Dinas Arpus

Contoh

KONTENPERBUP

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGEMBANGAN MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN
PURBALINGGA

Menimbang :

Mengingat :

Dst...

BAB I KETENTUAN UMUM

Membahas tentang konteks dari purbalingga kota cerdas (objek, satuan kerja, pemerintah, stakeholder , dan lain sebagainya)

**BAB II ARAHAN STRATEGIS SMART CITY KABUPATEN
PURBALINGGA**

Membahas tentang arahan strategis pemerintah kabupaten purbalingga terkait implementasi smart city.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Membahas tentang tujuan dibuatnya masterplan pengembangan smart city kabupaten purbalingga

BAB IV RUANG LINGKUP

Membahas hal-hal yang dilakukan dan tidak dilakukan dalam pengembangan masterplan smartcity kabupaten purbalingga

BAB V ORGANISASI TATAKELOLA SMART CITY KABUPATEN PURBALINGGA

Membahas perencanaan, penyelenggaraan, organsasi, kebijakan dan operasional dalam melakukam implementasi smart city kabupaten Purbalingga

BAB VI PROGRAM DAN LAYANAN SMART CITY KABUPATEN PURBALINGGA

Membahas program dan layanan yang akan disiapkan dalam rangka implementasi smart city sesuai dengan komponen pengembangan smart city.

BAB VII PEMANGKU KEPENTINGAN

Membahas peran dan keterlibatan stakeholder dalam pengembangan smart city Kabupaten Purbalingga

BAB VIII MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN PURBALINGGA

Membahas rencana implemetasi smart city di Kabupaten purbalingga sesuai dengan masterplan yang dikembangkan diantaranya terkait smart economy, smart living, dan seterusnya

BAB IX OPERASIONAL DAN PEMBIAYAAN

Membahas pembiayaan implementasi smart city dari mulai dari perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan . pembiayaan dapa meliputi dana APBN, APBD provinsi, APBD Kab/Kota , CSR, atau sumber daya lain yang sah dan tidak mengikat

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Membahas hal-hal lain yang belum diatur dalam perwal

BAB XI PENUTUP

Penutup

PENETAPAN

Contoh:

DRAFT DEWAN DAN PELAKSANA SMART CITY

Dewan Smart City dan Pelaksana Smart City merupakan bagian dari Tatakelola Smart City. Secara garis besar memiliki spesifikasi sebagai berikut :

1. kepemimpinan
2. Struktur organisasi
3. Proses untuk memastikan layanan Smart City berjalan secara berkelanjutan dan selaras dengan dengan tujuan kota.

Komponen dari dewan dan pelaksan Smart City secara umum melibatkan pemerintah daerah dan perwakilan dari masyarakat baik Akademisi, komunitas, dan industri. Struktur organisasi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah.

A. DEWAN SMART CITY

Dewan smart city secara umum memiliki tugas untuk memberikan pengawasan dan memantau implementasi program-program smart city.

Ketua : Bupati

Anggota :

1. Pimpinan OPD Sektor Terkait
2. Perwakilan kota
 - a. Tokoh masyarakat sektor terkait

- b. Sektor usaha/Industri
- c. Akademisi

B. PELAKSANA SMART CITY

Tim Pelaksana Smart City secara umum bertugas untuk melakukan implementasi program Smart City yang telah disiapkan dari mulai rencana induk hingga proses evaluasi.

Pembina : Bupati

Ketua : Setda

Wakil Ketua :

Anggota :

1. Pimpinan OPD Sektor Terkait
2. Tim Teknis Di OPD
3. Tenaga Ahli

Kelompok Kerja (sesuai bidang terkait) :

- a. Smart Economy
 - Koordinator
 - Anggota
- b. Smart Living
 - Koordinator
 - Anggota
- c. Smart Mobility
 - Koordinator
 - Anggota

- d. Smart Environment
 - Koordinator
 - Anggota
- e. Smart Government
 - Koordinator
 - Anggota
- f. Smart Technology and Infrastrucutre
 - Koordinator
 - Anggota
- g. Smart People
 - Koordinator
 - Anggota
- h. Smart Governance
 - Koordinator
 - Anggota

Referensi lain yang dapat jadi acuan diantaranya adalah kota bandung dan kota Cirebon



Jl. Jurang No 31
Kota Bandung,
Jawa Barat 40161

+62 811-9891-417
+62 22 82602511

support@kazee.id

www.kazee.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Smart City adalah strategi untuk memajukan potensi, pelaksanaan pembangunan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat suatu daerah pemerintahan (dalam hal ini kota maupun kabupaten) dengan pendayagunaan data dan teknologi informasi, penyusunan kebijakan yang optimal, dan dukungan SDM di lingkungan pemerintah daerah. Dalam mencapai terwujudnya strategi Smart City ini diperlukan arahan dan kajian sesuai dengan kondisi terkini dari daerah pemerintahan yang bersangkutan, karena pengimplementasian teknologi namun tidak memiliki nilai tepat-guna tidak akan dapat mampu meningkatkan kualitas pemerintahan secara optimal.

Dengan meningkatnya manfaat yang diberikan dan tingkat pendayagunaan dari teknologi informasi yang sudah merasuk di dalam kehidupan sehari-hari baik di tingkat masyarakat, organisasional, maupun pemerintahan, maka adalah sebuah langkah yang tepat apabila Kabupaten Purbalingga hendak mengadopsi strategi Smart City untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Melalui Kajian Pengembangan Masterplan Purbalingga Smart City ini, dilaksanakan survei kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, penilaian peringkat Smart City dari Kabupaten Purbalingga, dan kemudian disusun daftar kebutuhan program untuk diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyongsong Purbalingga Smart City. Sebagai langkah akhir dari dokumen kajian ini, diberikan pentahapan di dalam lima tahun implementasi sebagai bagian dari roadmap Smart City Kabupaten Purbalingga, sesuai dengan prioritas program dan arahan kebijakan dan pembangunan dari Kabupaten Purbalingga.

Tim penyusun kajian ini hendak berterima kasih kepada Ibu Dyah Hayuning Pratiwi sebagai Plt Kabupaten Purbalingga untuk komitmen yang diberikan untuk memajukan Kabupaten Purbalingga, serta kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga yang telah mengusulkan dilaksanakan program ini dan memberikan

pendampingan selama program kajian dilaksanakan. Tidak lupa tim penyusun kajian berterima kasih kepada segenap dukungan yang telah diberikan OPD Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh tim kajian untuk menyusun laporan dan rekomendasi akhir.

Sebagai penutup, tim penyusun kajian berharap hasil kegiatan Kajian Pengembangan Masterplan Purbalingga Smart City ini dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan Kabupaten Purbalingga. Kami menyadari bahwa hasil kajian ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami berharap hasil kajian ini dapat diimplementasikan dengan penyempurnaan yang diperlukan sesuai dengan kondisi terakhir dari perkembangan teknologi dan juga arahan pembangunan Kabupaten Purbalingga.

Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tim Penyusun Kajian

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR TABEL	IV
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Jadwal Pelaksanaan.....	4
2. METODOLOGI	6
3. TINJAUAN PUSTAKA	9
3.1. <i>Smart City</i>	9
3.2. Definisi dan Komponen <i>Smart City</i>	11
3.3. Model <i>Smart city</i>	13
3.4. Model Kota Cerdas	16
3.5. Stakeholder <i>Smart city</i>	19
3.6. Tingkat Kematangan	20
3.7. Analisis Prioritas	24
4. TINJAUAN KABUPATEN PURBALINGGA	26
4.1. Kondisi Umum Wilayah.....	26
4.2. Arahan Strategis Pemerintahan	28
4.3. Visi & Misi	30
4.4. Sasaran Dan Program Kerja	36
4.5. Indikator Kinerja Utama	37
4.5.1. Pendidikan	37
4.5.2. Kesehatan.....	37
4.5.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	38
4.5.4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	38
4.5.5. Pembangunan Ekonomi	38
4.5.6. Kepemudaan dan Olah Raga	38

5. PENTAHAPAN LANGKAH MENUJU SMART CITY PURBALINGGA	39
5.1. Tahap Pertama: Visi dan Rencana Kerja	40
5.2. Tahap Kedua: Penguatan SDM dan Kebijakan.....	41
5.3. Tahap Ketiga: Pemantapan Teknologi dan Infrastruktur.....	41
5.4. Tahap Keempat: Penentuan Program Unggulan.....	42
5.5. Tahap Kelima: Perluasan Dampak dan Manfaat.....	42
6. PENGEMBANGAN MASTER PLAN	43
6.1. Strategic Alignment	43
6.1.1. Pemetaan permasalahan, Isu Strategis dan Capaian RPJMD, Komponen Pengembangan <i>Smart City</i>	43
6.1.2. Pemetaan permasalahan, isu strategis dan komponen Smart City	48
6.2. Analisis GAP.....	58
6.2.1. Smart Economy.....	58
6.2.2. Smart Living	61
6.2.3. Smart Mobility	63
6.2.4. Smart Environment	64
6.2.5. Smart Government.....	64
6.2.6. Smart Technology Infrastructure	65
6.2.7. Smart People	65
6.2.8. Smart Governance	66
6.3. Analisis Prioritas	66
6.4. Pengembangan Master Plan.....	71
7. PENUTUP	80
7.1. Kesimpulan.....	80
7.2. Saran	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1. Diagram Perkiraan Populasi Penduduk Kota di berbagai Provinsi di Indonesia (Hayu Parasati, 2014).....	1
Gambar 1-2. Karakteristik Solusi Cerdas (SCCIC ITB, 2014).....	2
Gambar 2-1. Metodologi pengembangan Purbalingga <i>Smart City</i>	6
Gambar 3-1. Terminology <i>Smart City</i> (Manvile 2012, Dameri, 2013)	10
Gambar 3-2. Model <i>Smart City</i> (Giffinger, 2007)	14
Gambar 3-3. IBM Smarter City Concept.....	15
Gambar 3-4. Garuda <i>Smart City</i> Model (http://sccic.id/main/research/gscm)	17
Gambar 3-5. Dimensi <i>Smart City</i> City Asia (BSC, 2017)	18
Gambar 3-6. Para pemangku kepentingan <i>Smart City</i>	20
Gambar 3-7.Level Kematangan GSCM.....	21
Gambar 3-8 McFarlan's Grid.....	25
Gambar 5-1. Alur Tahapan Realisasi Smart City.....	39

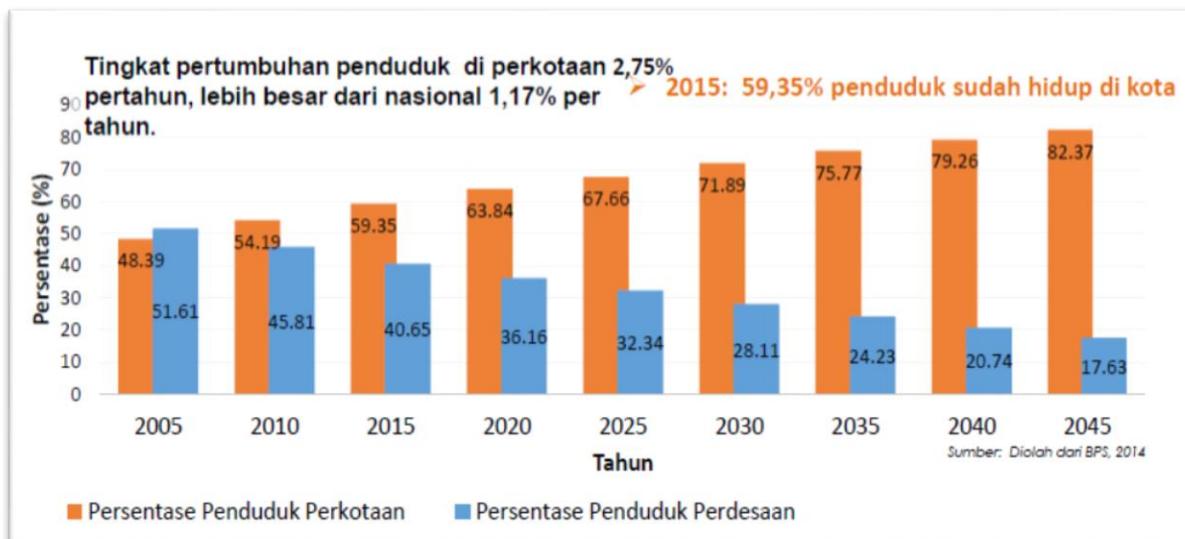
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Uraian kegiatan pengembangan Kabupaten Purbalingga <i>Smart City</i>	4
Tabel 2. Terminologi <i>Smart City</i> (Manville, 2012)	10
Tabel 3. Beberapa definisi <i>Smart City</i>	12
Tabel 4 Matrik Indikator Kematangan GSCM	21
Tabel 5. Pemetaan Visi dan Misi, Tujuan terhadap Sasaran dan Komponen <i>Smart City</i>	48
Tabel 6. Pemetaan Sasaran terhadap Permasalahan dan Isu Strategis	52
Tabel 7. Inisiatif Tahap 1 untuk <i>Smart City</i> Purbalingga	72
Tabel 8. Inisiatif Tahap 2 untuk <i>Smart City</i> Purbalingga	72
Tabel 9. Inisiatif Tahap 3 untuk <i>Smart City</i> Purbalingga	74
Tabel 10. Inisiatif Tahap 4 untuk <i>Smart City</i> Purbalingga	78
Tabel 11. Inisiatif Tahap 5 untuk <i>Smart City</i> Purbalingga	79

1. Pendahuluan

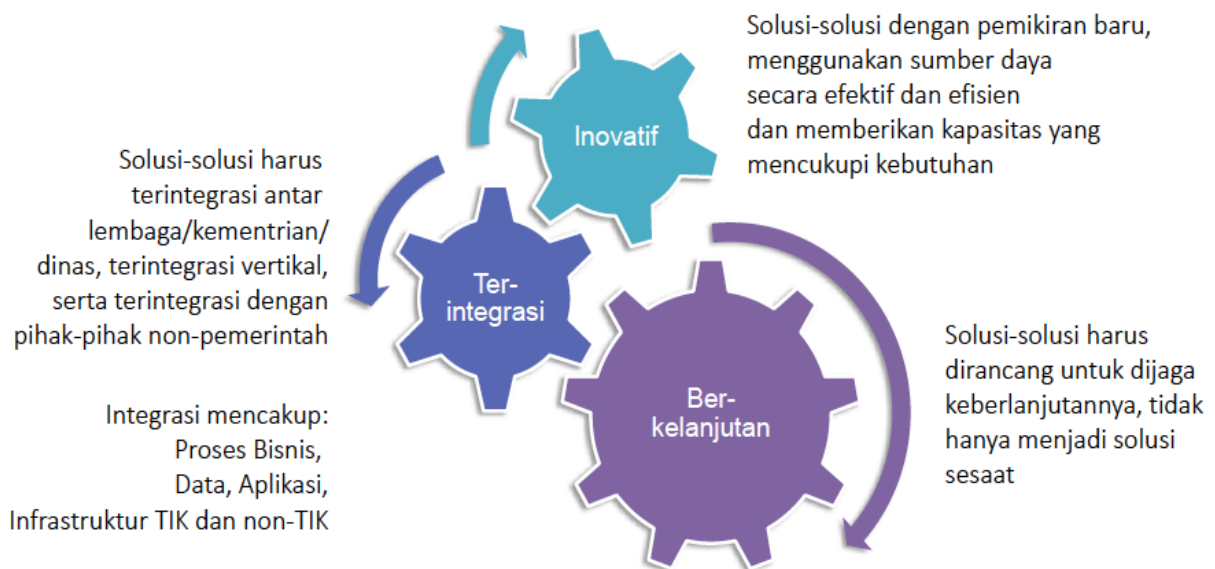
1.1. Latar belakang

Pertambahan penduduk telah menjadi isu seluruh belahan dunia, khususnya untuk daerah perkotaan dan area penyangganya. Jumlah penduduk yang terus meningkat memiliki dampak negatif yang dapat memicu berbagai permasalahan, seperti permasalahan pengangguran, kemiskinan, penurunan kualitas pelayanan publik, berkurangnya ketersediaan lahan pemukiman, kemacetan di jalan raya, membengkaknya tingkat konsumsi energi, penumpukan sampah, peningkatan angka kriminalitas, dan masalah-masalah sosial lainnya. Permasalahan ini jelas berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat yang semakin menurun. Hal serupa terjadi di Indonesia, di mana Gambar 1-1 memperlihatkan bagaimana pertumbuhan penduduk Indonesia terus bertambah. Pemerintah dan stakeholder lainnya dituntut untuk bersikap secara kritis, efektif, dan efisien dalam menyikapi fenomena ini agar permasalahan yang muncul tidak terus meluas. Salah satu konsep yang saat ini sedang berkembang di dunia dalam menangani permasalahan kota adalah konsep *Smart City*.



Gambar 1-1. Diagram Perkiraan Populasi Penduduk Kota di berbagai Provinsi di Indonesia (Hayu Parasati, 2014)

Smart City merupakan kota yang mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk tercapainya kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan dengan dukungan teknologi, tata kelola dan sumber daya manusia yang baik. Tidak hanya dalam mengelola sumber daya, *Smart City* mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi kota serta memaksimalkan potensi untuk memaksimalkan pelayanan terhadap warganya. Melalui solusi cerdas yang memiliki karakter inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan, konsep *Smart City* tidak hanya dapat diterapkan pada area perkotaan namun juga dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan atau potensi di pedesaan (*smart village*), Kabupaten (*Smart City*), hingga tingkat provinsi (*Smart Province*).



Gambar 1-2. Karakteristik Solusi Cerdas (SCCIC ITB, 2014)

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang di utara, Kabupaten Banjarnegara di timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di barat. Industri, pariwisata dan kuliner menjadi potensi utama dalam pengembangan Kabupaten Purbalingga dalam melakukan pengembangan daerah. Beberapa isu penting yang dihadapi oleh Kabupaten Purbalingga termasuk masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pembangunan manusia, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur, dan isu-isu tersebut menjadi menjadi fokus pemerintah dalam pengembangan Kabupaten Purbalingga saat ini. Isu-isu ini secara signifikan dapat

diselesaikan melalui konsep-konsep *Smart City* yang berbasis pembangunan yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Konsep *Smart City* yang bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan kualitas hidup ini juga selaras dengan visi pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu “Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berahlak Mulia”. Selain itu, implementasi Konsep *Smart City* juga sejalan dengan misi pemerintah secara umum diantaranya adalah mewujudkan pemerintahan yang profesional (*good gevernance*, mendorong kehidupan masyarakat yang religius, mengupayakan kebutuhan pokok, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kawasan yang sehat, dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan pemaparan di atas, konsep *Smart City* dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Namun untuk mencapai ini diperlukan persiapan dan acuan yang baik. Langkah awal yang perlu diambil dalam mewujudkan implementasi konsep *Smart City* untuk Kabupaten Purbalingga ini adalah perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga dapat dijadikan sebagai panduan makro dalam penentuan kebijakan dan strategi daerah pada tingkat yang ditetapkan. Setelah itu, strategi tersebut disesuaikan dengan arah pengembangan dan kebijakan perencanaan pada tingkat yang lebih luas. Berdasarkan pemikiran demikian, diperlukan sebuah dokumen perencanaan atau roadmap berupa **“Kajian Pengembangan Masterplan Purbalingga *Smart City*”**.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan masterplan *Smart City* Kabupaten Purbalingga dengan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan *awareness*/ kesadaran mengenai konsep *Smart City* kepada seluruh *stakeholder* Kabupaten Purbalingga
2. Memetakan kondisi eksisting implementasi Purbalingga *Smart City*

3. Identifikasi permasalahan dan keunikan potensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Purbalingga
4. Pengembangan Rencana Induk Pengembangan Purbalingga *Smart City*

1.3. Ruang Lingkup

Secara umum rincian pekerjaan yang dilakukan dalam membangun masterplan *Smart City* Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data sekunder dari instansi atau lembaga terkait yang berhubungan dengan pengembangan Kabupaten Purbalingga *Smart city*.
2. Pengumpulan data primer melalui interview dan FGD. *Interview* dilakukan untuk mendapatkan data kualitatif terkait infrastruktur fisik dan non fisik dalam pengembangan Purbalingga *Smart city*.
3. Identifikasi permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga
4. Menyusun roadmap dan model implementasi Purbalingga *Smart City*

1.4. Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilakukan selama 30 hari dengan rincian tercantum pada Tabel 1.

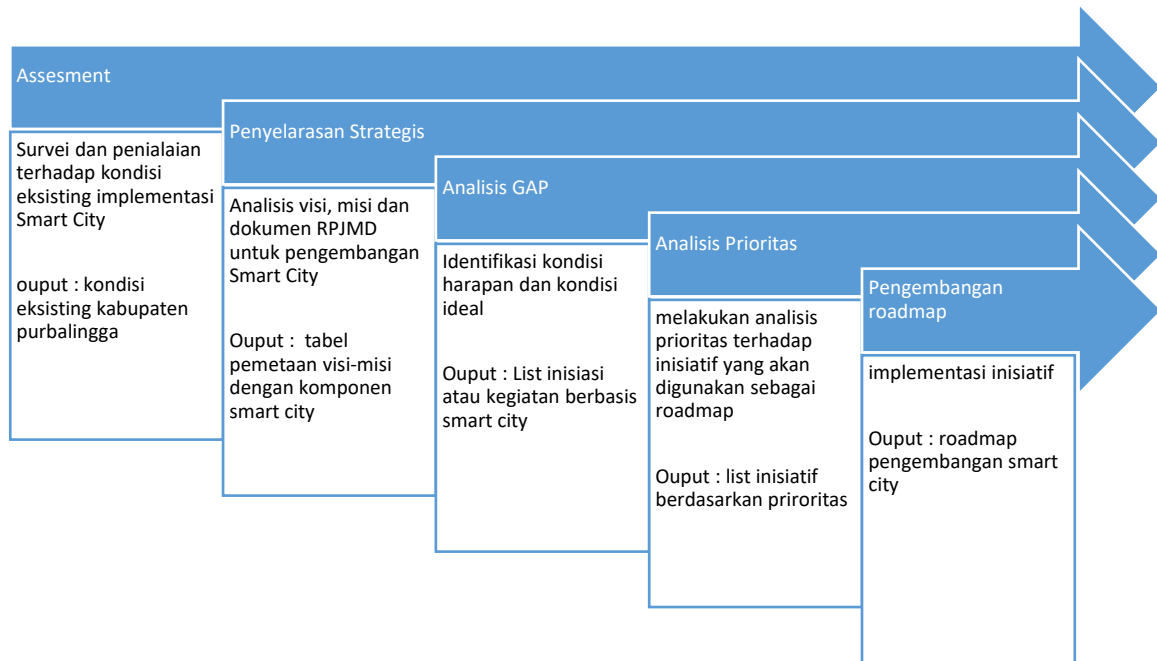
Tabel 1. Uraian kegiatan pengembangan Kabupaten Purbalingga *Smart City*

No	Uraian Kegiatan	November - Desember				
		Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Minggu 5
1	Persiapan					
2	FGD, Survei dan Assesment kondisi Kabupaten Purbalingga					
3	Strategic alignment untuk menyelaraskan arahan <i>Smart City</i>					

No	Uraian Kegiatan	November - Desember				
		Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Minggu 5
	agar sesuai dengan visi-misi daerah					
4	Analisis Gap					
5	Analisis Portofolio untuk memilih inisiasi utama dalam membangun master plan					
6	Desain roadmap/ masterplan					
7	Sosialisasi dan Pelaporan					

2. Metodologi

Secara umum metode yang dikembangkan untuk pengembangan Purbalingga *Smart City* dapat dilihat pada Gambar 2-1.



Gambar 2-1. Metodologi pengembangan Purbalingga *Smart City*

Adapun beberapa tahapan di dalam metodologi pengembangan Purbalingga *Smart City* ini adalah sebagai berikut:

1. *Assesment* / Penilaian

Tahap awal dalam metodologi ini adalah melakukan *assesment* atau penilaian terhadap kondisi eksiting pelayanan *Smart City* Kabupaten Purbalingga. Penilaian dilakukan berdasarkan model *Smart City* yang dikembangkan oleh Giffinger (2007) dan GSCM (2015). Secara umum akan diidentifikasi level kematangan dan posisi Kabupaten Purbalingga dalam implementasi *Smart City*. *Assesment* ini akan meliputi:

- Identifikasi permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Purbalingga
- Identifikasi kondisi tatakelola, teknologi dan infrastruktur serta kondisi sumberdaya manusia Kabupaten Purbalingga

- c. Identifikasi layanan *Smart City* di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Untuk masing-masing layanan ini akan diidentifikasi secara terpisah sesuai dengan kluster masing-masing,
2. Setelah *assessment* selesai dilakukan maka dapat dilakukan *Strategic Alignment* atau penyelarasan strategi. Penyelarasan strategi ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap visi-misi Kabupaten dan RPJMD pemerintah. Tahapan ini dilakukan agar roadmap yang dihasilkan benar-benar menyeluruh dan mencakup kebutuhan baik dari pimpinan daerah maupun kebutuhan dari masing-masing unit (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintahan. Penyelarasan strategis untuk mengetahui arahan dan tuntutan dari pimpinan Pemda Purbalingga dan juga dapat diperoleh dari Rencana Jangka Panjang Pemda Purbalingga. Apabila Pemda Purbalingga sudah memiliki Sistem Manajemen Kinerja yang berisi ukuran kinerja dan target pencapaian maka dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan *Smart City* untuk mendukung pencapaian target tersebut. Selain itu dilakukan juga penyelarasan fungsional dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing unit (SOPD) di lingkungan Pemda Purbalingga terhadap layanan *Smart City*.
3. Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*)
Melakukan analisis kesenjangan implementasi *Smart City* yang ingin diwujudkan dengan kondisi saat ini, sehingga dihasilkan inisiatif-inisiatif yang perlu dilakukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
4. Analisis Prioritas
Analisis Prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan dua parameter yaitu:
 - Usaha yang perlu diberikan untuk melakukan sebuah inisiatif
 - Manfaat yang akan didapatkan apabila inisiatif tersebut dilakukan dengan kata lain tahapan ini melakukan analisis dampak dan usaha terhadap inisiatif yang akan dikembangkan.
5. Analisis Portofolio
Analisis portofolio dilakukan dengan menelaah masing-masing inisiatif berdasarkan seberapa penting inisiatif tersebut untuk kebutuhan sekarang dan

masa yang akan datang. Berdasarkan Mc Farland, pembagian dilakukan ke dalam 4 (empat) kelompok yaitu :

- (1) Kelompok operasional utama (*key operational*)
- (2) Kelompok pendukung (*support*)
- (3) Kelompok potensi tinggi (*high potential*)
- (4) Kelompok strategis (*strategic*)

6. Desain Roadmap

Setelah inisiatif-inisiatif berhasil didefinisikan selanjutnya diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan maka tahapan berikutnya adalah penyusunan roadmap (peta jalan) *Smart City* Kabupaten Purbalingga. Sebelum menyusun roadmap ini perlu dilakukan analisis terhadap inisiatif yang telah diurutkan berdasarkan beberapa pertimbangan di bawah ini:

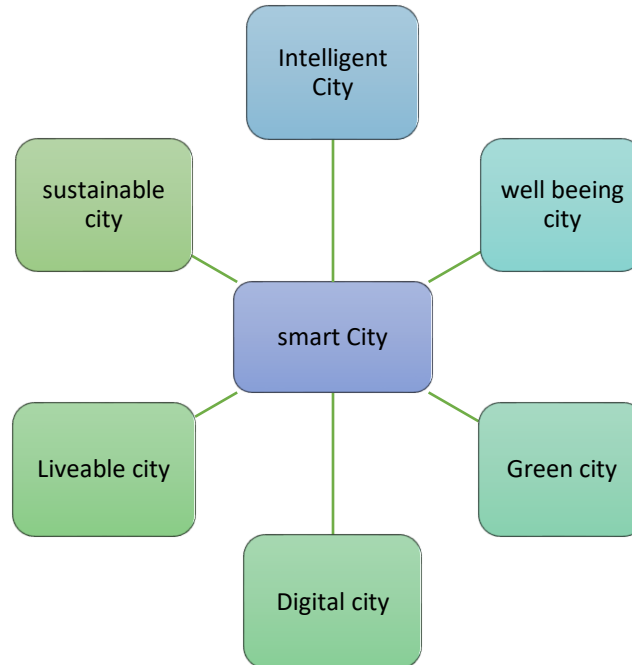
- a. Analisis Presedensi
- b. Analisis Kesiapan
- c. Distribusi dan kesiapan sumber daya

3. Tinjauan Pustaka

3.1. *Smart City*

Smart City merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi semenjak mulai muncul pada tahun 1990-an. Keberadaannya terus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar dalam menghadapi permasalahan kota. Zhu, dkk (2002) mengutip pernyataan Gruber bahwa *Smart City* biasa digunakan untuk merepresentasikan kemampuan sebuah kota dalam menyediakan layanan terhadap individu atau masyarakat untuk bereksplorasi dalam dunia maya dengan kecepatan lingkungan dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan tentang kota tersebut. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang maksimal diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan (Schoorman, 2012).

Dalam perjalanannya *Smart City* memiliki beberapa terminologi. Konsep *Smart City* berkembang dari mulai *cyber city*, *digital city*, *intelligent* dan *Smart City* (Schafer dkk, 2011). Dameri (2013), mengutip Carugliu dan Qi menyampaikan istilah yang berbeda didefinisikan untuk konsep yang hampir sama. *Intelligent city*, *digital city*, *sustainable city*, *techno city*, *well being city*. Konsep-konsep tersebut sama sekali tidak berkontradiksi, didalamnya justru terdapat beberapa aspek yang sama-sama mengarah pada konsep *Smart City*. Istilah-istilah tersebut pada dasarnya sama, hanya yang populer adalah *Smart City* (Manville dkk, 2013).



Gambar 3-1. Terminology *Smart City* (Manvile 2012, Dameri, 2013)

Terminologi di atas merupakan prinsip-prinsip yang berkembang dalam konteks *Smart City*. Lebih detail Tabel 2 memperlihatkan beberapa definisi terkait terminology *Smart City*.

Tabel 2. Terminologi *Smart City* (Manville, 2012)

Intelligent City	Adalah kota yang memiliki kompetensi dalam memproduksi pengetahuan dan menggunakannya untuk membangun <i>capital intelligent</i> untuk mengembangkan kota.
Digital City	Adalah kota yang saling terkoneksi. Menggunakan TIK untuk melakukan pemrosesan data dalam menghasilkan informasi.
Sustainable city	Kota yang menggunakan teknologi untuk mereduksi emmisi CO ² , memproduksi energi yang efisien untuk tercapainya kota yang hijau.

Wellbeing city	Kota yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Membuat kota yang atraktif untuk kehidupan sosial dan bisnis.
Technocity	Kota yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi infrastruktur dan layanan kota dengan berfokus pada ruang terbuka publik, mobilitas dan transportasi publik.
Green City	Kota yang dibangun dengan tidak mengorbankan asetnya, melainkan terus memupuk sumber daya alam, lingkungan, dan kualitas prasarana kota untuk menjawab isu perubahan iklim melalui tindakan mitigasi dan adaptasi.

3.2. Definisi dan Komponen *Smart City*

Secara umum terkait *Smart City*, belum ada benar-benar jelas mendefinisikan *Smart City*. Menurut Schafer (2011) tidak kurang dari 100 definisi tentang *Smart City*. Sebuah kota disebut *smart* ketika aset manusia dan sosial saling berinteraksi dengan infrastruktur dan teknologi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi kota dengan lingkungan yang layak huni. Sementara, Smartcom dikutip oleh Manvrine menyatakan *Smart City* menggabungkan berbagai teknologi untuk menciptakan lingkungan yang ramah, dan memberikan masyarakat dengan hidup yang lebih layak (Manvrine dkk, 2013).

Nada serupa terkait definisi *Smart City* yang masih belum benar-benar terstandarisasi pun dibahas oleh Dameri (2013) dan Manvrine (2013). Secara khusus lebih detail disebutkan bahwa *Smart City* merupakan isu penyelesaian permasalahan dan layanan kota melalui maksimalisasi TIK menurut Manvrine. Sementara menurut Renata Dameri disebutkan bahwa *Smart City* adalah suatu area geografis, di mana TIK, logistik, produksi energi, pengelolaan kota dan lain sebagainya saling bersinergi dalam memberikan benefit bagi masyarakat. Tabel 3 memperlihatkan beberapa definisi yang digunakan sebagai referensi dalam pengembangan *Smart City*.

Tabel 3. Beberapa definisi *Smart City*

Peneliti	Definisi
Dameri (2012)	<i>Smart City</i> adalah wilayah dengan geografis yang terdefinisi dengan baik, di mana teknologi tinggi seperti TIK, logistik, produksi energi, dan sebagainya, saling berinteraksi untuk menciptakan manfaat bagi warga negara dalam peningkatan kesejahteraan.
Dall'O (2016)	<i>Smart City</i> adalah kota yang dibangun di berbasis pengembangan manusia. Kepandaian sebuah kota mengacu pada kemampuan kota untuk memenuhi kebutuhan warga.
Suhono (2014)	<i>Smart City</i> adalah kota yang dapat mengelola semua sumberdaya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan. Pengelolaan tersebut semata-mata untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota.
Topeta D	Sebuah kota "menggabungkan teknologi TIK dan Web 2.0 dengan perencanaan organisasi, desain dan perencanaan lainnya untuk dematerialisasi dan mempercepat proses birokrasi dan membantu untuk mengidentifikasi sesuatu hal yang baru, dan membuat solusi yang inovatif, agar bisa berkembang dan kelayakan hidup.
Forrester	<i>Smart City</i> merupakan pendalaman pentingnya penggunaan teknologi <i>Smart Computing</i> untuk membuat komponen layanan infrastruktur dan kota yang meliputi administrasi kota, pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, real estat, transportasi, dan utilitas - lebih cerdas, saling berhubungan, dan efisien".
Mathew	<i>Smart City</i> adalah hasil dari strategi pengetahuan dan strategi kreatif yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sosio-ekonomi, ekologis, logistik dan persaingan kota. <i>Smart City</i> semacam itu didasarkan pada campuran modal manusia yang menjanjikan (misalnya tenaga kerja terampil), modal infrastruktur (misalnya fasilitas komunikasi

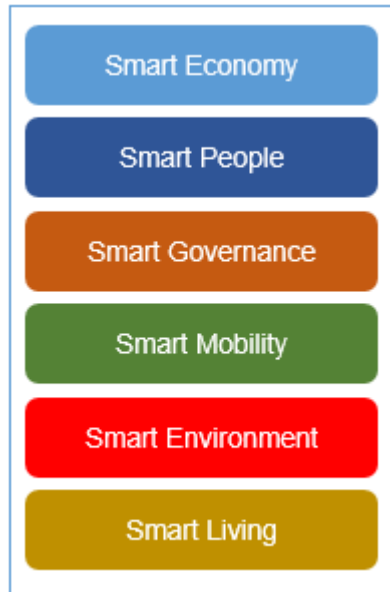
Peneliti	Definisi
	berteknologi tinggi), dan modal sosial (misalnya hubungan jaringan yang intens dan terbuka) dan modal kewirausahaan.
Carugliu & Nijkamp	<i>Smart City</i> adalah kota yang masyarakatnya mampu mengelola sumber daya dengan efisien, dalam arti “mampu memaksimalkan investasi sumberdaya manusia, transportasi, dan infrastruktur teknologi informasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan hidup”.
Cohen Boyed	Sebuah pendekatan yang luas, terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi pengoperasian sebuah kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi daerahnya. Cohen lebih jauh mendefinisikan <i>Smart City</i> dengan pembobotan aspek lingkungan menjadi: <i>Smart City</i> menggunakan TIK secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan - semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan.

3.3. Model *Smart city*

Pengembangan *Smart City* seperti telah disampaikan bagian sebelumnya begitu pesat, baik oleh perusahaan profit, non profit dan kalangan pendidikan. Konsep yang handal dari *Smart City* menurut Van Landegem (2012) adalah terbentuknya *smart Government*, *Smart People*, *Smart Environment*, *Smart Economy*. Sementara Schafer dkk memetakan bahwa parameter *Smart City* terdiri dari 3 hal yaitu inovasi ekonomi, inovasi infra struktur dan tatakelola.

Giffinger (2007), melakukan pemeringkatan *Smart City* melalui konsep yang dikembangkan dengan 6 komponen utama. Sebagai komponen penilaian, di mana masing-masing komponen terdiri dari beberapa indikator. Target utama dari konsep ini

adalah menghasilkan kota yang nyaman, memiliki kemudahan akses terhadap berbagai layanan dan memiliki kelayakan untuk ditinggali dari sudut pandang sosial dan lingkungan dengan komponen *smart economy*, *people*, *governance*, *mobility*, *environment* dan *living*.



Gambar 3-2. Model *Smart City* (Giffinger, 2007)

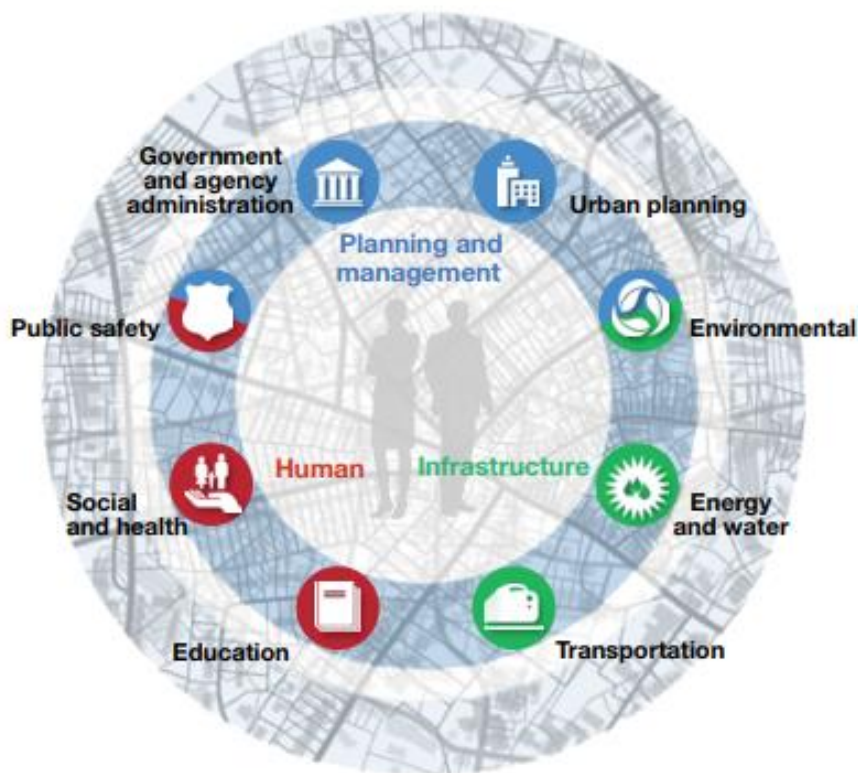
Melalui 6 komponen yang ditampilkan pada Gambar 3-2, Giffinger melakukan pengukuran terhadap kota-kota yang ada di Eropa. Model inipun telah menjadi umum dalam pengembangan *Smart City* Eropa yang berdasar pada pengembangan Eropa 2020. Model ini pun diusung oleh asosiasi IEEE yang menyatakan bahwa sebuah kota pintar mampu menyatukan teknologi, pemerintah, dan masyarakat untuk memungkinkan karakteristik sebagai berikut:

- a) Ekonomi cerdas (*smart economy*)
- b) Mobilitas cerdas (*smart mobility*)
- c) Lingkungan cerdas (*smart environment*)
- d) Orang cerdas (*smart people*)
- e) Hidup cerdas (*smart living*)
- f) Pemerintahan cerdas (*smart governance*)

IBM melalui konsep *smarter solution* mengembangkan sebuah model yang meningkatkan layanan kota melalui penguatan pada sektor manusia, infrastruktur dan perencanaan yang baik. Secara umum masing-masing area ini memiliki *key service area* yang menjadi indikator peningkatan layanan kota. beberapa di antaranya adalah:

- a. *Government and agency administration*
- b. *Urban planning*
- c. *Environment*
- d. *Energy and water*
- e. *Transportation*
- f. *Education*
- g. *Social and health*
- h. *Public safety*

Secara umum ke 8 area layanan ini merupakan bagian dari manusia, infrastruktur dan perencanaan. Gambar 3-3 memperlihatkan keterkaitan seluruh *key service area*.

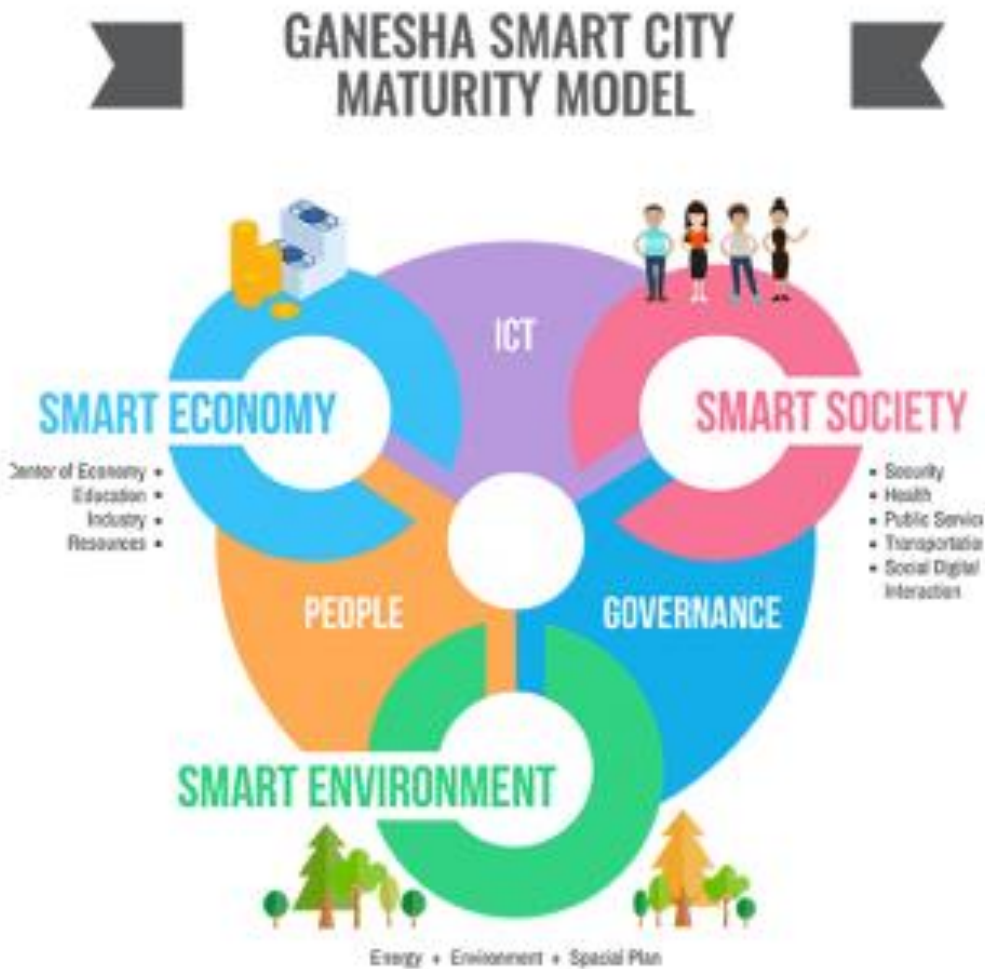


Gambar 3-3. IBM Smarter City Concept

3.4. Model Kota Cerdas

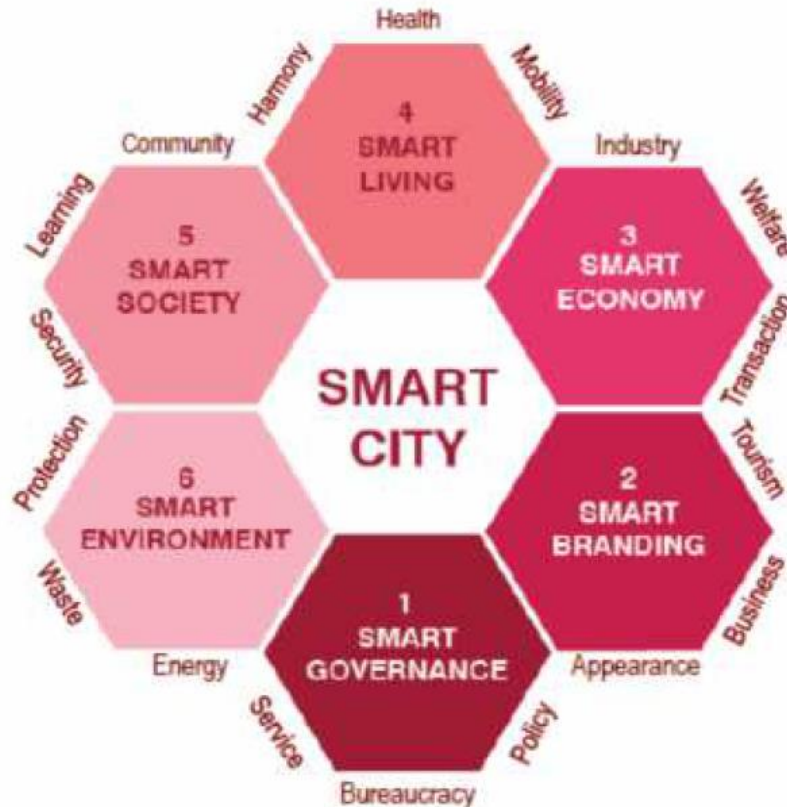
Boyd Cohen lebih menjelaskan terkait pengembangan model dan indikator pengembangan *Smart City*. *Smart City* adalah sebuah pendekatan yang luas, terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi pengoperasian sebuah kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi daerahnya. Cohen lebih jauh mendefinisikan *Smart City* dengan pembobotan aspek lingkungan menjadi: *Smart City* menggunakan TIK secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan - semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan.

Di Indonesia sendiri beberapa model muncul sebagai acuan pengembangan *Smart City*. Garuda *Smart City* Model (GSCM) dikembangkan oleh ITB pada tahun 2014. *Smart City* dalam konsep GSCM kota cerdas adalah kota yang mampu mengelola sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk terciptanya masyarakat yang aman, nyaman dan berkelanjutan. Model GSCM mendukung kota melalui penguatan manusia, tata kelola dan teknologi yang menopang 3 komponen utama yaitu Ekonomi, Lingkungan dan sosial. Masing-masing komponen memiliki domain seperti terlihat pada Gambar 3-4.



Gambar 3-4. Garuda *Smart City* Model (<http://sccic.id/main/research/gscm>)

Model berikutnya adalah model yang dikembangkan oleh *City Asia*. Model ini hampir mirip dengan apa yang dikembangkan oleh Uni Eropa dan IEEE. Dengan 6 komponen utama yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society* dan *Smart Environment* seperti ditunjukkan pada Gambar 3-5.



Gambar 3-5. Dimensi *Smart City* City Asia (BSC, 2017)

Model ini dikembangkan berdasarkan 6 dimensi yaitu:

a. *Smart Governance*

Berfokus untuk mewujudkan tatakelola dan pemerintahan yang efektif, efisien dan komunikatif dalam meningkatkan kinerja birokrasi.

b. *Smart Branding*

Berfokus pada branding inovasi dalam memasarkan potensi daerah seperti pariwisata, bisnis, dan wajah kota.

c. *Smart Economy*

Berfokus pada pencapaian ekonomi daerah yang memenuhi tantangan pasar, adaptif terhadap perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. *Smart Living*

Berfokus pada penjaminan kelayakan taraf hidup masyarakat melalui kualitas kesehatan dan mode transportasi.

e. *Smart Society*

Berfokus pada pewujudan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis.

f. Smart Environment

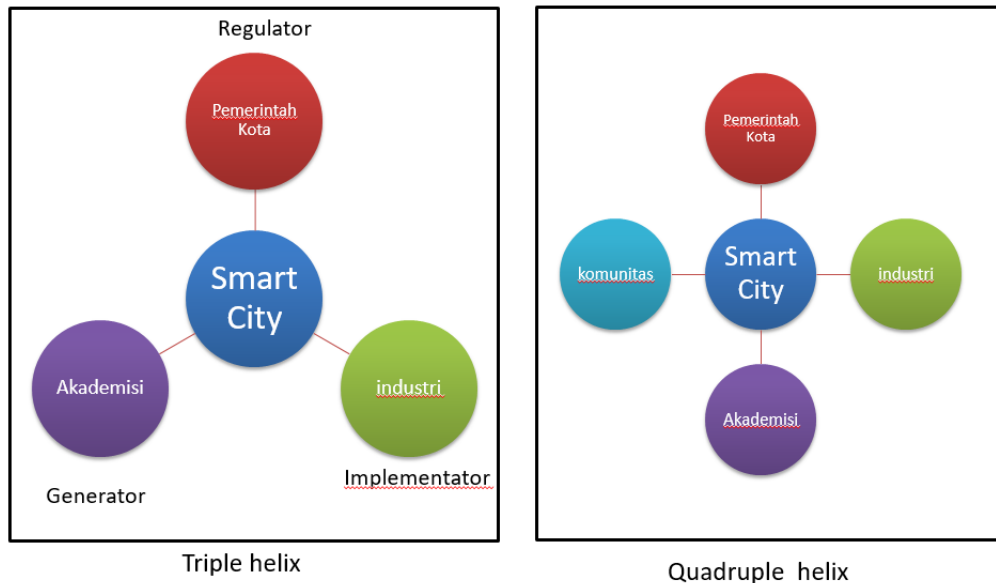
Berfokus pada pengelolaan lingkungan yang pintar dan berkelanjutan.

Model-model ini pada umumnya digunakan sebagai acuan pengembangan *Smart City* oleh berbagai kota yang ada diseluruh dunia. Dalam konteks pengembangan *Smart City* Kabupaten Purbalingga akan digunakan konsep yang dikembangkan Uni Eropa dan konsep yang telah dikembangkan oleh ITB.

3.5. Stakeholder *Smart city*

Stakeholder merupakan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan *Smart City*. Secara umum menurut Afonso (2009) stakeholder dapat *triple helix* maupun *quadruple helix* yang terlibat. Gambar 3-6 memperlihatkan keterlibatan stakeholder dalam pengembangan *Smart City*.

Dalam penelitian lain dasar untuk model *Triple Helix* kota cerdas ini ditetapkan oleh Leydesdorff dan Deakin (2011) di koran mereka. Model *Triple Helix* dari kota cerdas memberi kesempatan untuk mempelajari basis pengetahuan masyarakat dalam hal dukungan masyarakat sipil terhadap pengembangan sistem inovasi dan budaya mereka. Dalam skema ini, kota-kota dianggap padat dalam jaringan di antara setidaknya tiga dinamika yang relevan: yaitu, dalam modal intelektual universitas, industri penciptaan kekayaan dan pemerintahan partisipatif sistem demokrasi yang membentuk peraturan hukum. Efek dari interaksi ini pada gilirannya dipahami untuk menghasilkan ruang di mana basis informasi sistem komunikasi dimanfaatkan untuk merancang gagasan kota cerdas dan memanfaatkan peluang perkembangan Internet di masa depan menawarkan untuk tidak hanya menghasilkan modal intelektual tetapi juga menciptakan kekayaan

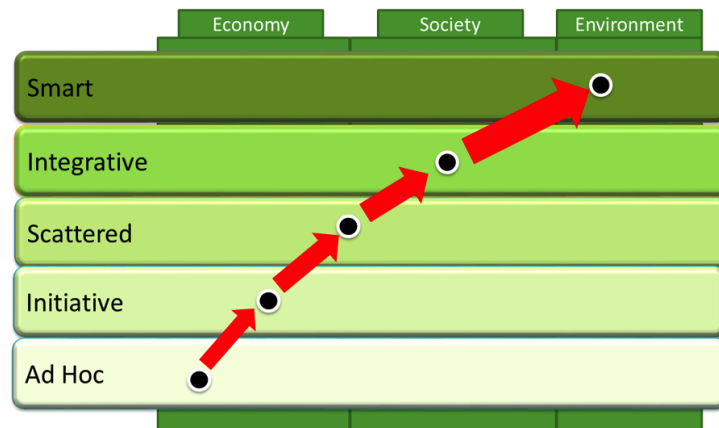


Gambar 3-6. Para pemangku kepentingan *Smart City*

Secara umum peran dari stakeholder *Smart City* dalam konteks *triple helix* maupun *quadruple helix* memiliki peran tersendiri. Dalam konteks stakeholder di atas pengembangan *Smart City* akan melibatkan (1) Pemerintah sebagai penyedia regulasi untuk pengembangan *Smart City*, (2) Akademisi sebagai generator atau konseptor, penggerak mengembangkan riset-riset terkait pengembangan *Smart City*, serta (3) Industri yang dapat secara langsung atau sebagai partner melakukan implementasi inisiasi-inisiasi cerdas yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kota dan memaksimalkan potensi kota. Stakeholder ini dapat terus berkembang dengan keberadaan (4) komunitas yang dapat berperan sebagai generator maupun implementator gerakan *Smart City*.

3.6. Tingkat Kematangan

Sebuah level kematangan dipetakan dalam tingkatan khusus dengan masing-masing mensyaratkan suatu kondisi melalui indikator dalam beberapa tahap. Tingkat kematangan berdasarkan GSCM terdiri dari *ad hoc*, *initiative*, *scattered*, *integrative*, dan *smart*. Lebih jelas terlihat pada gambar 3-7.



Gambar 3-7.Level Kematangan GSCM

Level kematangan ditetapkan melalui berdasar masing-masing pemungkin dan masing-masing karakteristik yang diukur. Rincian tingkat kematangan tersebut dapat ditetapkan pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4 Matrik Indikator Kematangan GSCM

Tingkat	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart environment</i>
Ad hoc	<p>Pertumbuhan ekonomi sangat rendah</p> <p>Dukungan layanan TIK sebaian besar masih bertumpu pada proses manual</p> <p>Sebagian besar layanan tidak didukung dengan rencana pengembangan dan pengelolaan yang baik</p> <p>Masyarakat tidak memiliki kemampuan dan akses terhadap TIK</p>	<p>Kehidupan sosialisasi yang tidak layak.</p> <p>Keamanan dan kenyamanan yang tidak dapat ditoleransi.</p> <p>Dukungan layanan TIK sebaian besar masih bertumpu pada proses manual</p> <p>Sebagian besar layanan tidak didukung dengan rencana pengelolaan yang baik</p> <p>Masyarakat tidak memiliki kemampuan dan akses terhadap TIK</p>	<p>Lingkungan yang tidak layak huni (<i>intolerable</i>)</p> <p>Dukungan layanan TIK sebagian besar masih bertumpu pada proses manual</p> <p>Sebagian besar layanan tidak didukung dengan rencana pengelolaan yang baik</p> <p>Masyarakat tidak memiliki kemampuan dan akses terhadap TIK</p>

Tingkat	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart environment</i>
Initiative	<p>Pertumbuhan ekonomi rendah</p> <p>Dukungan TIK sudah mulai diperhitungkan, meskipun secara parsial</p> <p>Mulai terdapat rencana pengelolaan tapi implementasi/penerapan belum maksimal</p> <p>Masyarakat kurang memiliki kemampuan dan akses terhadap TIK</p>	<p>Kehidupan sosial tidak layak.</p> <p>Keamanan dan kenyamanan yang tidak diinginkan.</p> <p>Dukungan TIK sudah mulai diperhitungkan, meskipun secara parsial</p> <p>Mulai terdapat rencana pengelolaan tapi implementasi/penerapan belum maksimal</p> <p>Masyarakat kurang memiliki kemampuan dan akses terhadap TIK</p>	<p>Lingkungan yang tidak layak huni</p> <p>(<i>undesireable</i>)</p> <p>Dukungan TIK sudah mulai diperhitungkan, meskipun secara parsial</p> <p>Mulai terdapat rencana pengelolaan tapi implementasi/penerapan belum maksimal</p> <p>Masyarakat kurang memiliki kemampuan dan akses terhadap TIK</p>
Scattered	<p>Pertumbuhan ekonomi sedang</p> <p>Dukungan layanan TIK mulai besar tapi aplikasi dan data masih tersebar</p> <p>Rencana pengelolaan seluruhnya diimplementasikan namun belum didukung operasional yang baik</p> <p>Masyarakat cukup memiliki kemampuan dan akses terhadap TIK</p>	<p>Kehidupan sosial kurang layak. Permasalahan <i>uncomfortable</i></p> <p>Dukungan layanan TIK mulai besar tapi aplikasi dan data masih tersebar</p> <p>Rencana pengelolaan seluruhnya diimplementasikan namun belum didukung operasional yang baik</p> <p>Masyarakat cukup memiliki kemampuan dan akses terhadap TIK</p>	<p>Lingkungan yang kurang layak huni</p> <p>(<i>uncomfortable</i>)</p> <p>Dukungan layanan TIK mulai besar tapi aplikasi dan data masih tersebar</p> <p>Rencana pengelolaan seluruhnya diimplementasikan namun belum didukung operasional yang baik</p> <p>Masyarakat cukup memiliki kemampuan dan akses terhadap TIK</p>

Tingkat	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart environment</i>
<i>Integrative</i>	<p>Pertumbuhan ekonomi tinggi</p> <p>Dukungan layanan TIK mulai memperlihatkan kolaborasi antar sistem Tatakelola dengan rencana dan pengembangan serta operasional dan pengawasan yang mulai menyeluruh</p> <p>Masyarakat memiliki kemampuan dan akses yang baik dalam penggunaan TIK</p>	<p>Kehidupan sosial cukup layak aman dan nyaman , permasalahan <i>tolerable</i></p> <p>Dukungan layanan TIK mulai memperlihatkan kolaborasi antar sistem Tatakelola dengan rencana dan pengembangan serta operasional dan pengawasan yang mulai menyeluruh</p> <p>Masyarakat memiliki kemampuan dan akses yang baik dalam penggunaan TIK</p>	<p>Lingkungan yang cukup layak huni dengan permasalahan lingkungan <i>tolerable</i></p> <p>Dukungan layanan TIK mulai memperlihatkan kolaborasi antar sistem Tatakelola dengan rencana dan pengembangan serta operasional dan pengawasan yang mulai menyeluruh</p> <p>Masyarakat memiliki kemampuan dan akses yang baik dalam penggunaan TIK</p>
<i>Smart</i>	<p>Pertumbuhan ekonomi sangat tinggi</p> <p>Dukungan layanan, infrastruktur dan tatakelola yang menghasilkan layanan terintegrasi yang diakses secara <i>ubiquotus</i></p> <p>Tatakelola yang baik dengan rencana, pengembangan, operasional dan</p>	<p>Kehidupan sosial layak aman dan nyaman , permasalahan <i>acceptable</i></p> <p>Dukungan layanan, infrastruktur dan tatakelola yang menghasilkan layanan terintegrasi yang diakses secara <i>ubiquotus</i></p> <p>Tatakelola yang baik dengan rencana,</p>	<p>Lingkungan yang cukup layak huni dengan permasalahan lingkungan <i>Acceptable</i></p> <p>Dukungan layanan, infrastruktur dan tatakelola yang menghasilkan layanan terintegrasi yang diakses secara <i>ubiquotus</i></p> <p>Tatakelola yang baik dengan rencana,</p>

Tingkat	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart environment</i>
	pengawasan secara menyeluruh Masyarakat memiliki kemampuan dan akses yang sangat baik dalam penggunaan TIK	pengembangan, operasional dan pengawasan secara menyeluruh Masyarakat memiliki kemampuan dan akses yang sangat baik dalam penggunaan TIK	pengembangan, operasional dan pengawasan secara menyeluruh Masyarakat memiliki kemampuan dan akses yang sangat baik dalam penggunaan TIK

3.7. Analisis Prioritas

Analisis prioritas dilakukan untuk memilih inisiatif yang digunakan untuk tercapainya target *Smart City*. Dalam konteks ini metode McFarland merupakan salah satu metode yang banyak digunakan dalam melakukan analisis terhadap suatu sistem operasional suatu organisasi. Konsep ini terdiri dari 4 kuadran yang mendefinisikan tingkat kepentingan suatu strategi dalam organisasi. Kuadran tersebut di antaranya adalah :

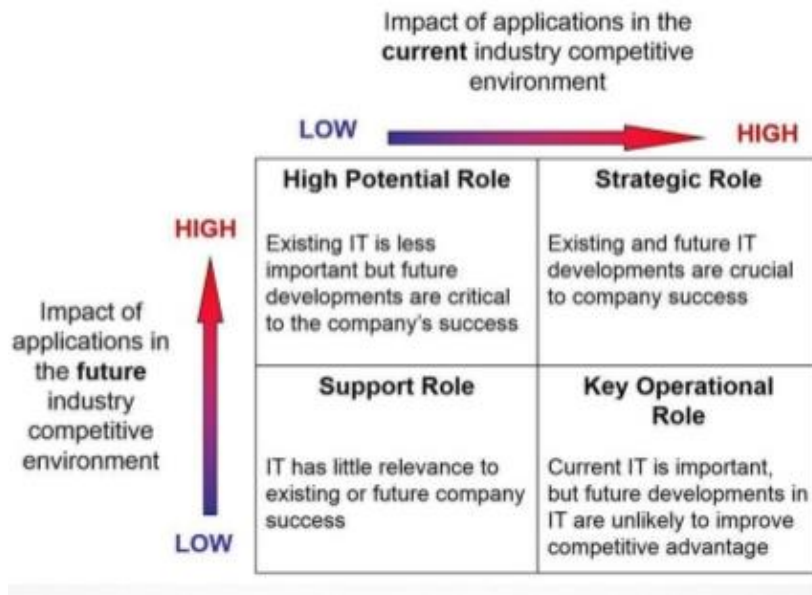
a. Kuadran 1 merupakan kuadran *Support*.

Pada Kuadran ini setiap inisiatif adalah aktivitas yang mendukung terhadap aktifitas utama pemerintah kota. Keberadaannya saat ini masih belum memberikan pengaruh yang besar. Keberadaan aktifitas ini mendukung kinerja kota namun dengan tidak adanya sistem ini atau gagalnya sistem ini bisnis atau layanan kota masih tetap berjalan.

b. Kuadran 2 merupakan kuadran *Operational*.

Pada kuadran ini inisiatif yang dikembangkan memberikan kemudahan pada pelayanan kota. Keberadaan layanan sangat memberikan pengaruh pada lancarnya layanan kota.

McFarlan's Grid



Gambar 3-8 McFarlan's Grid

c. Kuadran 3 merupakan kuadran *High Potential*.

Kuadran ini menunjukkan bahwa inisiatif merupakan *competitive Value* untuk pelayanan kota. Inisiasi ini berpotensi besar dalam kesuksesan dalam melakukan pelayanan di area pelayanan kota. Integrasi sangat dipentingkan untuk kuadran ini

d. Kuadran 4 merupakan kuadran *Strategic*.

Kuadran ini menempatkan sebagai kuadran yang paling berpengaruh dan merupakan *core* bisnis dari layanan kota. Inisiatif yang muncul sangat membantu dalam menjalankan operasional kota.

4. Tinjauan Kabupaten Purbalingga

4.1. Kondisi Umum Wilayah

Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas 77.764,122 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa, 15 kelurahan, 886 dusun, 1.530 RW, dan 5.058 RT. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Banyumas.

Di Kabupaten Purbalingga terdapat 5 Kawasan rawan bencana alam, meliputi kawasan rawan bencana banjir; kawasan rawan bencana tanah longsor; kawasan rawan bencana kekeringan; kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet; dan kawasan rawan bencana angin topan. Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 12.245 hektar, kawasan rawan bencana tanah longsor memiliki luas kurang lebih 16.510 hektar, kawasan rawan bencana kekeringan memiliki luas kurang lebih 29.044 hektar, kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet seluas kurang lebih 8.015 hektar, dan kawasan rawan bencana angin topan seluas kurang lebih 41.532 hektar.

Penduduk Kabupaten Purbalingga hasil proyeksi BPS tahun 2015 berjumlah 898.376 jiwa yang terdiri dari 443.915 laki-laki dan 454.461 perempuan, atau tumbuh sebesar 0,48 persen dari tahun sebelumnya. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun laju penduduk Kabupaten Purbalingga mengalami perlambatan pertumbuhan dari 1,36 persen pada tahun 2010 turun secara bertahap menjadi 1,14 persen tahun 2011; 1,11 persen tahun 2012; 1,10 persen tahun 2013; 1,06 persen pada tahun 2014 dan 0,48 persen tahun 2015.

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 sebesar 1.150 jiwa/km², tertinggi di Kecamatan Purbalingga sebesar 3.963 jiwa/km², selanjutnya Padamara 2.436 jiwa/km², dan Kecamatan Kalimanah sebesar 2.434 jiwa/km². Sementara itu kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Karangjambu 571 jiwa/km², selanjutnya Kecamatan Karangreja 839 jiwa/km². Sex ratio atau rasio jenis kelamin rasio jenis kelamin Kabupaten Purbalingga tahun 2014 tercatat sebesar 97,65 yang artinya diantara 100 penduduk perempuan terdapat kurang lebih 98 penduduk laki-laki atau dengan kata lain penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi; pada saat ini menggunakan tahun dasar 2010. Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) di mana aktivitas ekonomi dibagi atas 9 sektor lapangan usaha, sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009, yang membagi aktivitas ekonomi menjadi 17 kategori. Capaian PDRB di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2011-2015. Kenaikan tersebut terjadi baik kepada capaian PDRB ADHB dan ADHK atas Dasar Tahun 2010.

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan

PDRB Kabupaten Purbalingga. Walaupun demikian kategori Pertanian masih memegang peranan yang cukup besar di Kabupaten Purbalingga, tercatat hingga 2015 peranannya masih bertengger di 29,80 persen. Peranan terbesar selanjutnya diisi oleh kategori C yaitu Industri Pengolahan yang berada pada kisaran 25,72 persen. Peranan terendah terjadi pada kategori D, Pengadaan Listrik dan Gas tahun 2015 hanya memberikan peran sebesar 0,04 persen.

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran tingkat perubahan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dihitung menggunakan rumusan pertumbuhan PDRB ADHK atas dasar tahun 2010. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga sebesar 5,67 persen kemudian naik menjadi 5,67% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 5,79 persen, namun pada tahun 2013 menurun menjadi 5,61 persen, dan pada tahun 2014 naik lagi menjadi sebesar 5,86 persen, dan tahun 2015 pertumbuhan adalah 5,39 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 berada pada peringkat ke-3 diantara Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga sudah diatas capaian Jawa Tengah sebesar 5,42 persen.

Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa potensi daerah, utamanya dalam bidang perindustrian dan juga wisata. Dalam hal industri, Kabupaten Purbalingga memiliki reputasi sebagai produsen knalpot dan juga bulu mata sintetis kualitas dunia. Dalam bidang pariwisata, Purbalingga memiliki beberapa lokasi wisata yang ternama, yakni air terjun Owabong, taman bunga Kutabawa, Goa Lawa, Kebun Stroberi Pratin, dan Alun-alun Purbalingga.

4.2. Arahlan Strategis Pemerintahan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan beberapa permasalahan utama di dalam RPJMD untuk diselesaikan dalam tahun 2016-2021. Adapun beberapa

permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan: peningkatan rumah layak huni, jamban yang layak, pemenuhan kebutuhan pangan.
2. Pendidikan: peningkatan HLS, RLS, APK, sarana-prasarana pendidikan, kualitas dan ketersediaan SDM tenaga pendidik, pemerataan akses pendidikan.
3. Kesehatan: Peningkatan IPM, UHH, cakupan puskesmas untuk layanan persalinan, akses sanitasi, program desa Open Defecation Free, penanganan AIDS.
4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan, prasarana irigasi, produk hukum terkait penataan bangunan dan lingkungan, pelaksanaan sertifikasi laik fungsi gedung.
5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana wilayah dan prasarana pemukiman, pengurangan kawasan kumuh, akses terhadap sanitasi dan air bersih, penangan persampahan, dan pemenuhan kebutuhan listrik.
6. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat: Meningkatkan partisipasi politik rakyat, pembangunan karakter dan pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan kesetiakawanan sosial dan semangat patriotisme dan nasionalisme, peningkatan kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara.
7. Sosial: pemerataan kesejahteraan sosial, penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemberdayaan sosial.
8. Tenaga kerja: peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemfasilitasan penempatan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi buruh, penurunan angka pengangguran
9. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: pengarusutamaan gender, kebijakan khusus terkait pemenuhan hak-hak anak, upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Pertanian: Menyediakan lahan yang memadai untuk memperlancar proses pembangunan, pemetaan aset.

11. Lingkungan Hidup: Mengendalikan komponen ekosistem, menjaga daur hidrologi, pengendalian penggunaan lahan.
12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Meningkatkan efektivitas fungsi lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan di lingkungan desa.
13. Pengendalian Penduduk dan KB: Meningkatkan kepesertaan KB, mengurangi pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesejahteraan keluarga.
14. Perhubungan: Peningkatan kapasitas prasarana jalan dan kualitas angkutan darat, pengembangan sistem transportasi yang efektif dan efisien, menambah kebutuhan terminal penumpang.
15. Komunikasi dan Informatika: Meningkatkan jumlah website yang dimiliki SKPD, meningkatkan intensitas update informasi, meningkatkan jumlah layanan publik online.
16. Pembangunan Ekonomi: peningkatan PDRB, meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, meningkatkan kepariwisataan, peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat, peningkatan kualitas manajemen koperasi, peningkatan iklim investasi.
17. Kepemudaan dan Olah raga: Peningkatan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olah raga, meningkatkan prestasi di bidang kepemudaan dan olah raga, meningkatkan sosialisasi bahaya narkoba.
18. Kebudayaan: Meningkatkan kebijakan dan program untuk apresiasi seni budaya, meningkatkan intensitas kajian, fasilitasi, pementasan, serta pengiriman duta seni, pelestarian cagar budaya.
19. Perpustakaan: Peningkatan jumlah dan sarana-prasarana untuk perpustakaan.

4.3. Visi & Misi

Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 adalah “PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

- A. Misi 1: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat

Meningkatnya kesadaran politik rakyat sejalan dengan proses demokratisasi sebagai implikasi dari reformasi di segala aspek kehidupan mengakibatkan semakin menguatnya tuntutan masyarakat untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin menuntut terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan Misi ke-1 adalah: Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah.

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-1 meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, unsur penunjang urusan pemerintahan Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan, dan dinas-dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Statistik, Kearsipan, dan Urusan Persandian.

- B. Misi 2: Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.

Salah satu prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah terwujudnya lingkungan sosial yang aman, damai, dan tertib. Di sisi lain meningkatnya kesadaran politik masyarakat di tengah euforia demokrasi pasca reformasi harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengembangkan etika politik sehingga terhindar dari praktek demokrasi yang anarkis dan sebaliknya akan dapat diwujudkan kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat. Sedangkan pembangunan bidang hukum dan HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan *good and clean governance*.

Perbedaan pemahaman terhadap keragaman agama dan budaya; perbedaan kondisi sosial-ekonomi; masalah kemiskinan dan kepadatan penduduk; berbagai permasalahan sosial lain seperti merebaknya peredaran miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, dan premanisme; serta kecenderungan meningkatnya kriminalitas, merupakan faktor-faktor potensial untuk timbulnya gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Tujuan Misi ke-2 adalah: Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Rasa Aman Dalam Masyarakat, dengan Sasaran : 1. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan perundangan termasuk peraturan daerah dan peraturan bupati 2. Menurunnya resiko bencana. 3. Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-2 meliputi dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Ketenteraman, Ketertian Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

C. Misi 3 : Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan Dan Papan Secara Layak

Salah satu prasyarat penanggulangan kemiskinan adalah dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama. Penanggulangan kemiskinan dipusatkan pada prioritas perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, air bersih, lingkungan hidup, sumber daya alam, rasa aman, dan berpartisipasi dengan memperhitungkan kemajuan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang semakin berkualitas, berakhlak mulia, beretika, serta memiliki jatidiri dan semangat nasionalisme.

Kebijakan dan program baik langsung maupun tidak langsung harus berdampak terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, sehingga kebijakan yang ada dapat mewujudkan pencegahan pewarisan kemiskinan dan advokasi keluarga miskin , pencegahan munculnya keluarga miskin baru, pengentasan keluarga miskin, dan pengembangan lingkungan yang kondusif bagi penanggulangan kemiskinan.

Tujuan Misi ke-3 adalah : 1. Meningkatnya ketahanan pangan, dengan Sasaran meningkatnya Status Pangan Masyarakat. 2. Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni, dengan Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat.

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-3 meliputi dinas yang melaksanakan Urusan Pangan dan sub urusan Perumahan.

D. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

Kualitas manusia dan kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan. Kualitas manusia dapat diukur dari aspek-aspek yang bersifat lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Kualitas manusia yang dicita-citakan di samping diukur dari beberapa hal tersebut, juga diukur dari kepribadian/jatidiri dan kecintaan terhadap kebudayaan dan tanah air serta tertanamnya semangat nasionalisme. Sedangkan kualitas kehidupan manusia diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar serta tersedianya secara memadai berbagai prasarana dan sarana guna terwujudnya kehidupan yang berkualitas.

Tujuan Misi ke-4 adalah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan Sasaran : 1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 3. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. 4. Meningkatnya kesejahteraan keluarga. 5. Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS, korban bencana dan kelompok masyarakat rentan lainnya. 6. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 7. Meningkatnya budaya gemar membaca. 8. Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar Budaya (BCG) serta Prestasi Seni. 9. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga.

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-4 meliputi dinas yang melaksanakan Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, serta Urusan Perpustakaan.

- E. Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

Pembangunan ekonomi menduduki posisi yang sangat strategis karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai hasil dari pembangunan ekonomi akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan semakin meningkatkan aktifitasnya dalam bidang ekonomi.

Upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata.

Tujuan Misi ke-5 adalah Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan Sasaran : 1. Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. 2. Meningkatnya daya saing pariwisata. 3. Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri. 4. Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial. 5. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi Usaha Kecil dan Mikro (KUKM). 6. Meningkatnya produksi dan nilai tambah Sektor Pertanian. 7. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan. 8. Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau.

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-5 meliputi dinas yang melaksanakan Urusan Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Penanaman Modal, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Urusan Transmigrasi.

F. Misi ke-6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai. Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana yang meliputi prasarana jalan, jembatan, irigasi dan pengairan, perumahan dan permukiman, prasarana persampahan, pemerintahan, perhubungan, serta berbagai prasarana wilayah lainnya.

Tujuan Misi ke-6 adalah : 1. Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman, Produktif dan Berkelanjutan, dengan Sasaran : a. Meningkatnya Akses dan Konektivitas Wilayah. b. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumberdaya Air yang Memadai. c. Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang d. Meningkatnya Bangunan Gedung Laik Fungsi e. Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas jasa konstruksi. 2. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman, dengan Sasaran : a. Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman. b. Meningkatnya Akses Aman Air Minum yang Berkelanjutan. c. Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik / RT. d. Meningkatnya Akses Pelayanan Persampahan e. Meningkatnya Layanan Sistem Drainase Perkotaan 3. Terwujudnya Tertib Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah, dengan sasaran Meningkatnya Kepastian Status Dan Pemanfaatan Tanah. 4. Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Orang Dan Barang, dengan sasaran Meningkatnya Manajemen, Kapasitas dan Kualitas Angkutan Jalan dan Udara. 5. Meningkatkan Kualitas dan Keterbukaan Informasi Publik, dengan sasaran Meningkatnya Implementasi e-Government dan Keterbukaan Informasi Publik. 6. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Desa, dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa.

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-6 meliputi dinas yang melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Urusan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Urusan Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

G. Misi ke-7 : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Eksplorasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktifitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti pencemaran air dan udara, timbulnya berbagai penyakit, merosotnya hasil tangkapan ikan sungai, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna khas/langka, munculnya lahan rusak termasuk deforestasi, terjadinya banjir dan tanah longsor, sulitnya mendapatkan air pada musim kemarau, berpindahnya aliran sungai, dan sebagainya.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai salah satu sumberdaya yang potensial juga belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun mendatang. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Untuk mengantisipasi berbagai hal tersebut di atas dibutuhkan kebijakan besar yang bersifat kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan Misi ke-7 adalah Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati, dengan sasaran Terkendalinya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-7 meliputi dinas yang melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4.4. Sasaran Dan Program Kerja

Sesuai RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021, sebagai ukuran terwujudnya Kabupaten Purbalingga yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlak mulia, pembangunan Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik,
2. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat Purbalingga,
3. Terwujudnya Purbalingga yang aman, damai, dan demokratis berdasarkan hukum,
4. Terwujudnya masyarakat Purbalingga yang bermoral, beretika, berbudaya, dan memiliki jati diri,
5. Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

4.5. Indikator Kinerja Utama

4.5.1. Pendidikan

Indikator kinerja utama pembangunan pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Berdasarkan data tahun 2015, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Purbalingga sebesar 11,78 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 6,85 tahun. Berdasarkan strata pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar di Kabupaten Purbalingga sudah cukup baik yaitu sebesar 109 sedangkan APK SMP/Sederajat sebesar 100, dan APK Sekolah Menengah/Sederajat baru sebesar 52,47.

4.5.2. Kesehatan

Kinerja pembangunan kesehatan menjadi penentu utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator utama untuk menilai kinerja pembangunan manusia. Pada tahun 2015, IPM Kabupaten Purbalingga sebesar 67.02 dan menduduki peringkat ke 26 di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu komponen IPM adalah Usia Harapan Hidup (UHH). Usia Harapan Hidup masyarakat Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 72,80 tahun. Relatif rendahnya UHH Kabupaten Purbalingga antara lain karena beberapa indikator kinerja pembangunan kesehatan masih relatif rendah. Angka morbiditas di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 16,5 persen, Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan sebesar 132 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH), sedangkan Angka Kematian Bayi sebesar 10,12 per 1000 KH.

4.5.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator keberhasilan pengarusutamaan gender antara lain adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2014, IPG Kabupaten Purbalingga sebesar 90,12 (menempati urutan ke 24 di Provinsi Jawa Tengah). Sedangkan IDG Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 sebesar 71,03 (menempati urutan ke 11 di Provinsi Jawa Tengah).

4.5.4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tingkat kemajuan desa mencerminkan efektivitas fungsi lembaga pemerintahan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 0,6394.

4.5.5. Pembangunan Ekonomi

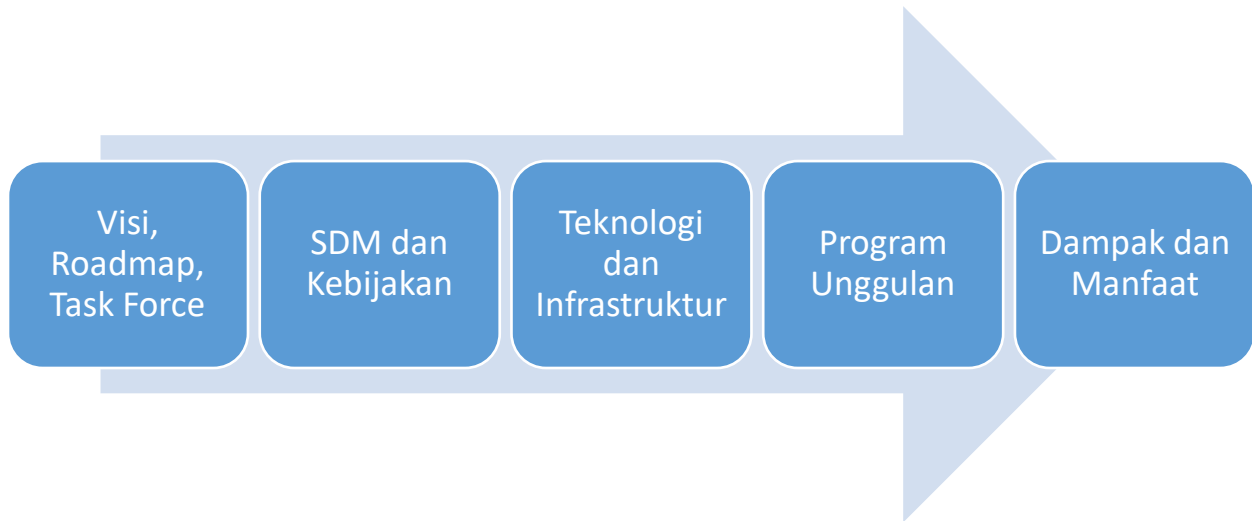
Pada tahun 2014 PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 15,95 juta, masih jauh lebih rendah dibanding PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 27,61 juta, dan PDB per kapita Nasional sebesar Rp. 41, 81 juta.

4.5.6. Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam tahun 2015, fasilitasi kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebanyak 6 (enam) kegiatan, sedangkan fasilitasi kegiatan olahraga sebanyak 26 kegiatan. Adapun prestasi olahraga Kabupaten Purbalingga di tingkat regional sebanyak 6 (enam) kejuaraan dan di tingkat nasional sebanyak 1 (satu) kejuaraan.

5. Pentahapan Langkah Menuju *Smart City* Purbalingga

Berikut ini merupakan tahapan realisasi *Smart City* Kabupaten Purbalingga



Gambar 5-1. Alur Tahapan Realisasi Smart City

Dalam mewujudkan *Smart City* Purbalingga, maka langkah-langkah yang perlu diambil oleh pengambil tindakan di kalangan pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat diturunkan ke dalam lima langkah utama sebagai berikut:

1. Penyusunan visi, misi, rencana, dan strategi perwujudan *Smart City* Purbalingga,
2. Penguatan SDM dan penyusunan kebijakan pendukung,
3. Pemantapan teknologi dan infrastruktur,
4. Penentuan program unggulan,
5. Perluasan dampak dan manfaat.

Meskipun pada dasarnya kelima tahapan tersebut secara logika bersifat sekuensial dan berurutan, namun pada pelaksanaannya keempat tahapan setelah tahapan pertama tersebut dapat dilaksanakan secara paralel, dengan syarat bahwa beberapa langkah pendahulu untuk kesuksesan langkah pada tingkat lanjutannya telah dilaksanakan terlebih dahulu. Langkah pertama yakni penyusunan visi dan rencana kerja merupakan syarat wajib yang harus diselesaikan sebelum menjalankan langkah-langkah selanjutnya, karena pada langkah pertama ini ditetapkan tujuan pelaksanaan konsep

Smart City dan strategi pencapaiannya. Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing langkah tersebut diberikan melalui sub pembahasan berikut.

5.1. Tahap Pertama: Visi dan Rencana Kerja

Pada tahap pertama ini perlu disusun beberapa dokumen dan tujuan utama yang akan menjadi arahan utama di dalam mewujudkan tercapainya Purbalingga *Smart City*. Adapun beberapa langkah utama yang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum menjalankan strategi pencapaian *Smart City* di Purbalingga adalah:

1. Visi kebijakan *Smart City* untuk daerah, yang mencakup:
 - Tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan konsep *Smart City* untuk Purbalingga, termasuk tingkatan yang diharapkan dari masing-masing aspek *Smart City* untuk Kabupaten Purbalingga.
 - Fokus utama dalam realisasi konsep *Smart City* Purbalingga, di mana ini dapat disesuaikan dengan strategi pembangunan Purbalingga yang tercantum dalam RPJMD, namun difokuskan pada beberapa aspek tertentu yang dapat menjadi ciri khas dan keunggulan Kabupaten Purbalingga.
 - Strategi dan pendekatan, yang memberikan gambaran secara umum tentang bagaimana mencapai tujuan utama dari realisasi Purbalingga *Smart City*.
2. Roadmap *Smart City* Purbalingga, yang mencakup:
 - Penyusunan rencana realisasi visi kebijakan *Smart City* secara mendetail dalam tahap demi tahap, dalam jangka waktu pelaksanaan tertentu.
3. *Smart City* Task Force/ Tim Pelaksana Kerja:
 - Tim perencana, pelaksana, dan pengawas implementasi kebijakan *Smart City* sesuai roadmap yang telah ditetapkan.
 - Dapat tersusun dari perwakilan OPD dan/atau stakeholder terkait, termasuk akademisi maupun pihak swasta yang dapat berkontribusi dalam pembangunan *Smart City* Purbalingga.

5.2. Tahap Kedua: Penguatan SDM dan Kebijakan

Persiapan SDM untuk *Smart City*, mencakup strategi dan pelaksanaan di dalam:

1. Penguatan mindset, etos kerja, dan penetapan standar pelayanan dalam semua aspek kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. Penyesuaian jumlah SDM, tupoksi, hak dan kewajiban terhadap kebutuhan operasional secara optimal dari Kabupaten Purbalingga *Smart City*.
3. Penguatan keahlian dan keterampilan dalam pelayanan *Smart City*, utamanya bagi SDM yang secara langsung bersentuhan dengan perangkat TIK yang vital di dalam pelayanan masyarakat berorientasi *Smart City*.
4. Persiapan kebijakan untuk *Smart City* dalam bentuk perundangan maupun peraturan daerah untuk menjaga pelaksanaan program *Smart City* agar tetap berada di dalam koridor hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
5. Penetapan roadmap dan prosedur dalam kerangka peraturan pemerintah, dengan demikian program Purbalingga *Smart City* ini sejalan dengan arahan program *Smart City* maupun *Smart City* dari pemerintah pusat.
6. Konsultasi dengan kementerian terkait (Pedesaan, Dalam Negeri, Kominfo) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam pelaksanaan program-program *Smart City* Purbalingga.

5.3. Tahap Ketiga: Pemantapan Teknologi dan Infrastruktur

Dengan posisi teknologi dan infrastruktur yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan konsep *Smart City* Kabupaten Purbalingga, maka pemantapan teknologi dan infrastruktur TIK di Kabupaten Purbalingga perlu untuk dilakukan secara bertahap mulai dari tahun pertama pelaksanaan program *Smart City*. Adapun pengembangan dan implementasinya dapat dilakukan secara bertahap, namun dalam setiap tahapannya perlu ada suatu layanan baru yang dapat direalisasikan. Adapun beberapa langkah di dalam tahapan ini termasuk:

- Pemerataan teknologi dan perkuatan infrastruktur pendukung untuk mendukung pelayanan secara cepat, tepat, dan terukur. Infrastruktur yang dimaksud termasuk perlengkapan komputer maupun TIK terkait, hingga jaringan komunikasi yang

menghubungkan kantor-kantor layanan pemerintah utama di seluruh Kabupaten Purbalingga.

- Implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan masyarakat untuk mencapai visi *Smart City* sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, utamanya dalam meningkatkan ketepatan dan kecepatan di dalam pelayanan.

5.4. Tahap Keempat: Penentuan Program Unggulan

Dalam tahapan ini, Kabupaten Purbalingga yang telah didukung oleh infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum masing-masing SKPD dapat menentukan satu atau beberapa program unggulan yang sejalan dengan potensi kedaerahan. Adanya program unggulan ini dapat menjadi *pilot project* atau *success story* yang dapat membuka pintu gerbang bagi program-program khusus berwawasan *Smart City* lainnya di Kabupaten Purbalingga. Adapun beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- Menentukan program utama untuk ditingkatkan dan disempurnakan, sesuai dengan visi, potensi, dan keistimewaan daerah.
- Optimasi dan peningkatan dukungan dari teknologi dan infastruktur *Smart City* yang telah disempurnakan dari tahapan-tahapan sebelumnya untuk mewujudkan program unggulan.

5.5. Tahap Kelima: Perluasan Dampak dan Manfaat

Tahap kelima dilaksanakan apabila Kabupaten Purbalingga telah memiliki satu atau beberapa program unggulan yang berjalan dengan baik dan dianggap sukses. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk berkontribusi kepada masyarakat Indonesia yang lebih luas dengan mendukung meluasnya program-program berorientasi *Smart City* di Indonesia. Adapun beberapa langkah yang dapat diwujudkan dalam tahapan ini adalah:

1. Memberikan inspirasi dan motivasi kepada daerah lain yang berkembang dengan konsep *Smart City*.
2. Berbagi kiat/ *success story* untuk implementasi *Smart City*.

3. Membagikan program unggulan untuk direplikasikan di daerah lain utamanya yang memiliki potensi atau karakteristik yang serupa dengan Kabupaten Purbalingga.
4. Membangun cluster *Smart City* dengan daerah-daerah sekeliling untuk memperkuat keistimewaan/ potensi daerah.

6. Pengembangan Master Plan

6.1. Strategic Alignment

Tahapan ini merupakan proses penyelarasan antara permasalahan, potensi dan rencana pengembangan *Smart City* Kabupaten Purbalingga.

6.1.1. Pemetaan permasalahan, Isu Strategis dan Capaian RPJMD, Komponen Pengembangan *Smart City*

Berikut ini merupakan pemetaan permasalahan, isu strategis dan capaian RPJMD serta komponen-komponen dalam pengembangan *Smart City*.

- a. Isu strategis Kabupaten Purbalingga berdasar RPJMD

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Purbalingga dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kemiskinan

- a. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Purbalingga sebesar 176.040 atau 19,75 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga.
- b. Sebagian menempati rumah yang tidak layak huni sebanyak 27.533 rumah
- c. Tingkat konsumsi pangan masyarakat masih di bawah standar pola pangan harapan sebesar 87,90.

2. Pendidikan

- a. Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 11,78 tahun sedangkan rata-rata lama sekolah sebesar 6,85 tahun
- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar sebesar 109, sedangkan APK SMP/ sederajat sebesar 100, dan APK SMA/ sederajat 52,47.
- c. Dibutuhkan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan baik dari sisi kapasitas maupun kualitasnya antara lain berupa ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang guru, kamar mandi dan WC, meubelair, alat peraga dan sebagainya.

- d. Pemerataan akses layanan pendidikan khususnya bagi keluarga miskin
3. Kesehatan
- a. Usia harapan hidup (UHH) sebesar 72,80 tahun
 - b. Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan sebesar 132 per 100.000, (cukup tinggi), sedangkan angka kematian bayi sebesar 10,12 per 1000 KH
 - c. Puskesmas banyak yang belum terakreditasi, rumah sakit belum terakreditasi
 - d. Relatif rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana sanitasi
 - e. budaya buang air besar di tempat terbuka
 - f. Prevalensi HIV-AIDS cukup tinggi
4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan
 - b. perlu peningkatan prasarana irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian
 - c. perlu adanya produk hukum terkait penataan bangunan dan lingkungan serta peningkatan pelaksanaan sertifikasi laik fungsi gedung
5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana wilayah dan prasarana permukiman.
 - b. Masyarakat belum memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih.
 - c. Penanganan persampahan belum optimal
 - d. Sebagian masyarakat belum menikmati fasilitas listrik
6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu
 - b. Penurunan kesetiakawanan sosial
 - c. Penurunan semangat gotong royong
 - d. Penurunan kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan Negara
7. Sosial
- a. Bantuan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih terbatas.
8. Tenaga Kerja

- a. Pengurangan angka pengangguran
 - b. Peningkatan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja
- 9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Peningkatan pengarusutamaan gender
 - b. Peningkatan IPG dan IDG
 - c. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 10. Pertanian
 - a. Pembebasan lahan
 - b. Pemetaan aset tanah sehingga belum bersertifikat
- 11. Lingkungan Hidup
 - a. Pengurangan tanah kering/tegalan
 - b. Pengurangan sawah
- 12. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM)
- 13. Pengendalian Penduduk dan KB
 - a. Pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi
 - b. Peningkatan kepesertaan KB aktif
 - c. Peningkatan jumlah keluarga sejahtera
- 14. Perhubungan
 - a. Peningkatan kapasitas dan kualitas angkutan darat
 - b. Pengembangan sistem transportasi yang efektif dan efisien
 - c. Peningkatan jumlah terminal
- 15. Komunikasi dan Informatika
 - a. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi
- 16. Pembangunan Ekonomi
 - a. Pendapatan perkapita masyarakat relatif rendah
 - b. peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat yang meliputi sektor pertanian dalam arti luas, industri rakyat, dan sebagainya
 - c. peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana perdagangan terutama melalui revitalisasi pasar-pasar tradisional

- d. pengembangan kehidupan berkoperasi dan peningkatan kualitas manajemen koperasi
- e. peningkatan iklim investasi

17. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Fasilitas kegiatan kepemudaan dan olahraga masih perlu untuk ditingkatkan
- b. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba

18. Kebudayaan

- a. peningkatan apresiasi terhadap seni budaya khususnya yang bersifat tradisional.
- b. Intensitas kegiatan kajian, fasilitasi, pementasan serta pengiriman duta seni maupun pembinaan organisasi dan kelompok kesenian ditingkatkan
- c. kekayaan warisan sejarah berupa benda-benda cagar budaya yang sangat banyak di Kabupaten Purbalingga perlu terus dipelihara

19. Perpustakaan

- a. Budaya membaca masih rendah

Berikut ini merupakan isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD untuk diselesaikan selama 5 tahun kedepan.

1. Kemiskinan

- a. Pengurangan angka kemiskinan
- b. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

2. Pembangunan Manusia

- a. Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) dengan upaya peningkatan tarap kesehatan
- b. Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS)
- c. Peningkatan rata-rata Lama Sekolah (RLS)
- d. Peningkatan kemampuan daya beli dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan meningkatkan pendapatan.
- e. Peningkatan apresiasi terhadap seni budaya daerah dalam memperkuat karakter dan jati diri bangsa

3. Pembangunan Ekonomi

- a. Pengembangan serta peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian, perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri kecil dan industri rumah tangga serta koperasi
- b. Pengembangan potensi kepariwisataan Kabupaten Purbalingga terutama potensi alam untuk didayagunakan secara optimal

4. Infrastruktur

- a. Pengembangan pangkalan TNI Angkatan Udara Wirasabaya menjadi Bandar Udara
- b. Peningkatan kapasitas dan kualitas bendung dan saluran irigasi
- c. Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana perkotaan serta penataan kawasan perkotaan
- d. Optimalisasi pengelolaan sampah

5. Wawasan Kebangsaan dan Kehidupan beragama

- a. Peningkatan semangat nasionalisme dan patriotisme
- b. Upaya pengembangan dan penanaman nilai-nilai moral yang positif
- c. Dorongan untuk hidup beragama dengan lebih baik

6. Lingkungan Hidup

- a. Mitigasi/pengurangan emisi gas rumah kaca disektor transportasi, peningkatan tutupan lahan, pertanian rendah emisi, dan pengelolaan limbah.
- b. Pencegahan dan pengendalian kerusakan fungsi lingkungan hidup serta rehabilitasi terhadap lingkungan yang telah mengalami kerusakan

7. Tata kelola Pemerintahan

- a. Peningkatan aparatur pemerintah daerah yang profesional
- b. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah

6.1.2. Pemetaan permasalahan, isu strategis dan komponen Smart City

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang didasarkan pada RPJMD, maka dapat dipetakan terhadap komponen *Smart City* sebagai berikut:

Tabel 5. Pemetaan Visi dan Misi, Tujuan terhadap Sasaran dan Komponen *Smart City*

Misi	Tujuan	Sasaran	Komponen <i>Smart city</i>
1	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah	Smart Government
2	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Rasa Aman Dalam Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan perundangan termasuk peraturan daerah dan peraturan bupati	Smart Living
		Menurunnya resiko bencana	
		Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan	
3	Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatnya Status Pangan Masyarakat	Smart Living
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat.	
4	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	
		Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	

Misi	Tujuan	Sasaran	Komponen <i>Smart city</i>
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga	
		Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS, korban bencana dan kelompok masyarakat rentan lainnya	
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
		Meningkatnya budaya gemar membaca	
		Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar Budaya (BCG) serta Prestasi Seni	
		Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga.	
5	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat,	Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.	Smart Economy
		Meningkatnya daya saing pariwisata	
		Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri	
		Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial	
		Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi Usaha Kecil dan Mikro (KUKM)	
		Meningkatnya produksi dan nilai tambah Sektor Pertanian	

Misi	Tujuan	Sasaran	Komponen Smart city
		Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan	
		Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau.	
6	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman, Produktif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Akses dan Konektivitas Wilayah	Smart Mobility
		Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumberdaya Air yang Memadai.	Smart Environment
		Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		Meningkatnya Bangunan Gedung Laik Fungsi	
		Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas jasa konstruksi	
7	Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	
		Meningkatnya Akses Aman Air Minum yang Berkelanjutan	
		Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik / RT	
		Meningkatnya Akses Pelayanan Persampahan	
		Meningkatnya Layanan Sistem Drainase Perkotaan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Komponen <i>Smart city</i>
	Terwujudnya Tertib Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya Kepastian Status Dan Pemanfaatan Tanah	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Orang Dan Barang	Meningkatnya Manajemen, Kapasitas dan Kualitas Angkutan Jalan dan Udara	Smart Mobility
	Meningkatkan Kualitas dan Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Implementasi e-Government dan Keterbukaan Informasi Publik	Smart Government
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Desa	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa.	Smart Govenrment
	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati	Terkendalinya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.	Smart Environment

Tabel 6. Pemetaan Sasaran terhadap Permasalahan dan Isu Strategis

Komponen <i>Smart city</i>	Sasaran	Tujuan	Permasalahan dan Isu Strategis
Smart Economy	Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat,	Pembangunan Ekonomi, Kemiskinan, Ketenaga kerjaan
Smart Economy	Meningkatnya daya saing pariwisata	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat,	
Smart Economy	Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat,	
Smart Economy	Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat,	
Smart Economy	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi Usaha Kecil dan Mikro (KUKM)	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat,	
Smart Economy	Meningkatnya produksi dan nilai tambah Sektor Pertanian	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat,	

Komponen <i>Smart city</i>	Sasaran	Tujuan	Permasalahan dan Isu Strategis
Smart Economy	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat,	
Smart Economy	Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat,	
Smart Environment	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumberdaya Air yang Memadai.	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman, Produktif dan Berkelanjutan	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Perumahan dan /kawasan
Smart Environment	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman, Produktif dan Berkelanjutan	
Smart Environment	Meningkatnya Bangunan Gedung Laik Fungsi	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan	

Komponen <i>Smart city</i>	Sasaran	Tujuan	Permasalahan dan Isu Strategis
		Ruang yang Aman, Produktif dan Berkelanjutan	
Smart Environment	Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas jasa konstruksi	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman, Produktif dan Berkelanjutan	
Smart Environment	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman	
Smart Environment	Meningkatnya Akses Aman Air Minum yang Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman	
Smart Environment	Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik / RT. d. Meningkatkan Akses Pelayanan Persampahan	Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman	
Smart Environment	Meningkatnya Layanan Sistem Drainase Perkotaan	Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman	
Smart Environment	Meningkatnya Kepastian Status Dan Pemanfaatan Tanah	Terwujudnya Tertib Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah	

Komponen <i>Smart city</i>	Sasaran	Tujuan	Permasalahan dan Isu Strategis
Smart Environment	Terkendalinya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati	
Smart Govenrment	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Desa	Peningkatan pelayanan publik, keterbukaan informasi publik
Smart Government	Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	
Smart Government	Meningkatnya implementasi e-Government dan Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatkan Kualitas dan Keterbukaan Informasi Publik	
Smart Living	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan perundangan termasuk peraturan daerah dan peraturan bupati	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Rasa Aman Dalam Masyarakat	Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, perumahan dan pemukiman,
Smart Living	Menurunnya resiko bencana	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Rasa Aman Dalam Masyarakat	ketentraman dan ketertiban umum, Perpustakaan

Komponen <i>Smart city</i>	Sasaran	Tujuan	Permasalahan dan Isu Strategis
Smart Living	Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Rasa Aman Dalam Masyarakat	
Smart Living	Sasaran meningkatnya Status Pangan Masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan	
Smart Living	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat.	Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni	
Smart Living	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
Smart Living	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
Smart Living	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
Smart Living	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
Smart Living	Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS, korban bencana dan kelompok masyarakat rentan lainnya	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	

Komponen <i>Smart city</i>	Sasaran	Tujuan	Permasalahan dan Isu Strategis
Smart Living	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
Smart Living	Meningkatnya budaya gemar membaca	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
Smart Living	Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar Budaya (BCG) serta Prestasi Seni	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
Smart Living	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
Smart Mobility	Meningkatnya Akses dan Konektivitas Wilayah	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman, Produktif dan Berkelanjutan	Perhubungan
Smart Mobility	Meningkatnya Manajemen, Kapasitas dan Kualitas Angkutan Jalan dan Udara	Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Orang Dan Barang	

6.2. Analisis GAP

Analisis GAP dilakukan untuk mengetahui kekosongan atau jarak untuk memenuhi kondisi ideal *Smart City*. GAP ini akan diisi oleh inisiatif –inisiatif yang diperlukan oleh pemerintah Kabupaten untuk tercapainya Kabupaten yang cerdas sesuai dengan arahan pemerintah dan pengembangan *Smart City*. GAP tersebut akan dicapai dengan mengidentifikasi komponen *Smart City* yang sudah diidentifikasi sebelumnya.

6.2.1. Smart Economy

Smart Economy dalam konteks pengembangan Kabupaten Purbalingga akan terwujud jika kebutuhan pokok masyarakat terjamin, peningkatan dan pemerataan ekonomi melalui perluasan lapangan kerja, investasi di pusat kegiatan industri dan pariwisata, serta pengelolaan sumberdaya daerah yang dimiliki.

6.2.1.1. Pusat ekonomi

Pusat ekonomi dalam konsep ini adalah pasar yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi, penanaman modal, ketenagakerjaan, pertanian dan perhutanan serta sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten. Kondisi ideal dari pusat ekonomi ini seluruh kegiatan dapat dimonitor dan dipantau keberadaannya. Permasalahan yang muncul dari kondisi pusat ekonomi adalah akses, fasilitas dan pemantauan terhadap pusat ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. GAP yang muncul berdasarkan kebutuhan kondisi ideal dapat dipenuhi dengan melakukan beberapa inisiasi sebagai berikut :

1. Kajian pembangunan dan pengembangan pasar beserta kebutuhan fasilitas di beberapa titik sesuai dengan area.
2. Pemantauan kondisi pasar melalui sistem informasi pengelolaan pasar yang digunakan untuk memantau dan harga yang bersumber dari pasar tradisional maupun modern.
3. Implementasi e-commerce untuk membantu meningkatkan pendapatan
4. Sistem Pengelola PAD yang dilakukan untuk melakukan proses penarikan dan pencatatan retribusi dari pasar dan pusat bisnis lainnya (e-retribusi)
5. Aplikasi pelaporan sistem keuangan daerah untuk informasi eksekutif.

6. Sistem informasi potensi daerah. Sistem ini dikembangkan secara online untuk menarik para investor terkait sumberdaya yang dapat menjadi potensi daerah untuk dikembangkan
7. Pengembangan database dan pemantauan penduduk miskin
8. Program pengembangan rumah layak huni untuk penduduk miskin sehingga tepat sasaran. Berintegrasi dengan sistem pencatatan dan pemantauan warga miskin
9. Sistem pencatatan dan pemantauan warga miskin
10. Sistem pemantauan ketenagakerjaan. Sistem yang dibuat untuk melakukan identifikasi lapangan kerja, pencari kerja serta distribusi para pencari kerja.

6.2.1.2. Industri

Permasalahan utama dalam industri adalah sumberdaya manusia, keilmuan dan teknologi, perijinan, pengelolaan dan permodalan yang masih sukar untuk diakses oleh masyarakat khususnya untuk UKM. Idealnya area industri ini dapat diidentifikasi dan diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi, akses dan fasilitas perijinan untuk mendirikan usaha. Berdasarkan permasalahan yang muncul di samping inisiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, beberapa inisiasi berikut dapat dikembangkan :

1. Penguatan SDM sebagai pelaku industri melalui pelatihan sesuai bidang industri yang dijalani (logam, makanan, dan lain sebagainya)
2. Sistem informasi penyediaan modal sebagai sistem yang melakukan pencatatan dan informasi ketersediaan modal untuk pengelolaan industri khususnya industri kecil
3. Identifikasi dan digitalisasi pemetaan data pelaku industri dan area industri untuk memudahkan konsumen mendapatkan hasil produksi.
4. Sistem perijinan online berbasis satu pintu untuk kemudahan dalam mendirikan industri khususnya industri kecil (IUMK)
5. Pengembangan area industri dan area pemasaran khusus yang digunakan untuk memasarkan produk daerah.
6. Pengembangan sistem pemasaran online terpadu yang digunakan produsen dalam rangka memasarkan produk.

7. Program promosi rutin yang dikelola pemerintah untuk seluruh industri
8. E-commerce untuk industri

6.2.1.3. Pariwisata

Permasalahan yang muncul dari pariwisata adalah akses dan infrastruktur terhadap potensi wisata yang dimiliki dan dikelola oleh para pemangku kepentingan area wisata. Kondisi ideal dari kondisi pariwisata daerah adalah peningkatan kunjungan wisatawan. Hal ini dapat dilakukan jika akses dan fasilitas ke area wisata bisa disediakan oleh seluruh stakeholder. Beberapa inisiasi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi wisata Kabupaten Purbalingga di antaranya adalah :

1. Identifikasi dan digitalisasi potensi wisata Kabupaten Purbalingga (e-tourism berbasis SIG). Sistem ini dikembangkan untuk menginventarisir dan memperkenalkan potensi wisata yang dimiliki daerah untuk selanjutnya dipromosikan
2. Trip planner Kabupaten Purbalingga sebagai pelengkap sistem sebelumnya.
3. Pembangunan fasilitas di area wisata (hotel, toilet umum, papan penunjuk jalan, free wifi, dan sebagainya)
4. Penyediaan infrastruktur ke area wisata (jalan, transportasi umum untuk mempermudah akses menuju area wisata)
5. Pengkajian dan pengembangan desa wisata
6. Pengembangan konten digital Kabupaten Purbalingga untuk promosi media sosial, media masa elektronik dan konvensional serta disertai aktivasi media sosial.

6.2.1.4. Sumberdaya

Pengelolaan dan identifikasi sumberdaya menjadi permasalahan. Pertanian, kehutanan, budaya dan partisipasi pemuda yang masih menjadi potensi yang harus terus digali. Beberapa inisiasi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi sumberdaya di antaranya adalah :

1. Identifikasi dan digitalisasi potensi sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah baik pertanian, perikanan, peternakan, sumberdaya alam maupun budaya.

2. Sistem informasi pertanian, peternakan dan perikanan untuk memantau produksi dan distribusi hasil.
3. Sistem informasi ketersediaan dan pengawasan stok pertanian
4. Rencana induk distribusi pangan untuk menjaga kecukupan pangan daerah
5. Aplikasi penyuluhan berisikan bibit, musim, hama dan lain sebagainya.
6. Penguatan SDM berbasis daring
7. Penambahan kualitas dan kuantitas SDM untuk hasil pertanian
8. Pengembangan website pertanian dan peternakan
9. Desa mandiri benih

6.2.2. Smart Living

Smart Living memiliki tujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan kemudahan kepada warga untuk mendapatkan berbagai fasilitas layanan daerah seperti keamanan, pendidikan, kesehatan dan pengelolaan yang baik terhadap PMKS.

6.2.2.1. Keamanan dan Bencana

Keamanan dan bencana merupakan salah satu komponen penting dalam konteks smart living. Kondisi ideal yang diharapkan adalah keamanan dalam melakukan aktifitas sehari-hari baik dari kejahatan maupun bencana. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai inisiasi yang dapat dilakukan pemerintah dan stakeholder lain.

1. Sosialisasi dan inisiasi keamanan lingkungan berbasis masyarakat
2. Panic Button untuk keamanan berbasis aplikasi per area
3. *Emergency call center* yang merupakan layanan 24 jam berbasis Telpon/Aplikasi untuk merespon berbagai kejadian seperti kejahatan dan kebencanaan
4. EWS (*early warning system*) berbasis sensor untuk mendeteksi permasalahan keamanan semenjak dini
5. Penambahan personil khususnya untuk mitigasi bencana
6. Sistem pencatatan dan pemantauan PMKS secara digital (sistem dapat berintegrasi dengan sistem penduduk miskin)

6.2.2.2. Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan warga menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup, menurunkan kemiskinan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ideal yang diharapkan adalah seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah. Kualitas layanan, jumlah guru kelas dan fasilitas pembelajaran menjadi parameter peningkatan kualitas pendidikan. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pengembangan kualitas pendidikan diantaranya adalah :

1. Penambahan jumlah guru agar sesuai dengan rasio siswa dan jumlah kelas atau rombongan belajar
2. Peningkatan angka partisipasi sekolah menjadi 12 tahun
3. Peningkatan kualitas guru melalui program pelatihan dengan target sertifikasi guru
4. Peningkatan kualitas sekolah melalui akreditasi
5. Digitalisasi data pokok sekolah (siswa, guru, mata pelajaran dan pembelajaran)
6. Sistem pemantauan fasilitas sekolah
7. Pengembangan manajemen konten pendidikan untuk pemerataan materi disetiap sekolah (berbasis online)
8. Legalisasi untuk GTT melalui SK Bupati
9. Pengembangan PPDB online
10. Inisiasi UNBK dan pelaporan online

6.2.2.3. Kesehatan

Ketersediaan layanan kesehatan yang memadai adalah objektif kesehatan dalam konsep smart living. Kemudahan dan akses yang cukup untuk mendapatkan layanan dokter dan rumah sakit, kondisi kesehatan masyarakat dan penyebaran penyakit yang berhasil ditekan menjadi beberapa faktor yang menjadi parameter. Inisiasi yang diperlukan untuk memenuhi GAP yang muncul di antaranya, melalui berbagai inisiasi berikut :

1. Penambahan tenaga kesehatan khususnya dokter dan perawat
2. Integrasi data kesehatan dengan layanan kependudukan lain (KTP dan BPJS)
3. Info kesehatan berbasis online sebagai lahan sosialisasi pentingnya kesehatan lingkungan, minimalisir penyakit menular dan lain sebagainya

4. Sistem informasi terintegrasi untuk kesehatan (rumah sakit, puskesmas, poli dan dinas kesehatan)
5. Sistem interaksi online. Sistem online untuk komunikasi dokter, pasien dan stakeholder lain untuk kemudahan dan menjembatani keterbatasan dokter.
6. Sistem pengawasan ibu, bayi dan anak. Sistem ini melakukan pencatatan terhadap ibu hamil dan bayi yang dilahirkan untuk mengendalikan tingkat kematian ibu hamil dan bayi yang baru dilahirkan.

6.2.3. Smart Mobility

Smart Mobility pada dasarnya merupakan layanan yang memungkinkan agar warga memiliki kemudahan dalam melakukan pergerakan di daerah, kemudahan dalam bertransportasi dari satu titik ke titik yang lain. Tidak hanya untuk warga tapi juga untuk pendatang. Kesenjangan yang muncul untuk memenuhi kondisi ideal ini diantaranya adalah :

1. Pengembangan *Traveler Information System*. Aplikasi digunakan sebagai informasi transportasi Kabupaten Purbalingga
2. Sistem pemantauan jalan jembatan untuk pendataan dan monitoring jalan serta jembatan yang dimiliki Pemerintah Daerah
3. *Emergency management system* yang dikembangkan untuk manajemen kecelakaan di jalan raya
4. Sistem monitoring kelayakan kendaraan
5. Sistem perijinan trayek terintegrasi dengan kelayakan kendaraan
6. Kajian untuk penerapan ATCS dan ATMS untuk melakukan pengawasan terhadap permasalahan transportasi.
7. Penguatan dan penambahan ahli bidang transportasi darat dan ahli keselamatan
8. Penguatan *low enforcement* untuk penegak hukum di jalan raya
9. Penguatan fasilitas untuk keamanan dan kenyamanan kendaraan umum
10. Pengembangan *smart parking* untuk implementasi di pasar dan beberapa kantor dinas.
11. Sistem informasi manajemen asset OPD

6.2.4. Smart Environment

Lingkungan yang layak huni, bebas dari polusi dan sesuai dengan rencana tata ruang dan penghematan energi merupakan objektif dari smart environment, permasalahan lingkungan relatif minim terjadi di Kabupaten Purbalingga. Untuk meminimalisir resiko beberapa inisiasi dapat dilakukan di antaranya adalah:

1. Inisiasi pemasangan sensor untuk polusi
2. Sistem Pengelolaan dan pengangkutan sampah berbasis aplikasi
3. Inisiasi pengembangan TPS berbasis 3R
4. Sosialisasi penghematan energi
5. Pengembangan GRID untuk pengelolaan dan *control energy*
6. Implementasi *smart lighting* untuk jalan utama
7. Sistem pemantauan dan pengendalian pembangunan
8. Sistem perijinan online
9. Sistem pengawasan tata ruang untuk memastikan kesesuaian peruntukan suatu wilayah berbasis SIG (database pemfaatan tanah, sebaran RLTH, kawan kumuh, limbah, dll)
10. Sistem monitoring bina marga, sumberdaya air, cipta dan karya.
11. Pemantauan dan pengendalian ruang terbuka hijau sebesar 30%

6.2.5. Smart Government

Layanan yang cepat dan akurat menjadi objektif dari smart government. Setiap layanan memiliki informasi yang jelas terkait domain layanan yang disediakan oleh pemerintah. Beberapa area yang menjadi pelayanan public di antaranya adalah kependudukan dan perijinan.

1. Validasi dan digitalisasi data sebagai Inisiasi awal program *one data /Single sign on* (SSO) dan integrasi data kependudukan dengan OPD lain (kesehatan, pendidikan, pertanian)
2. Sistem informasi online pelayanan public beserta call centre. Layanan ini merupakan aplikasi berbasis online yang memberikan seluruh informasi layanan (kependudukan, kesehatan, perijinan, dan lain sebagainya) beserta layanan informasi yang dapat diakses 24 jam

3. Sosialisasi rutin dan terukur terkait layanan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
4. Sistem pelaporan berbasis web atau android yang langsung melakukan pelaporan hardcopy ke Bupati
5. Sistem permohonan layanan kependudukan
6. Pengembangan sistem administrasi desa (desa Digital)
7. Sistem informasi 1 pintu untuk mempermudah pelayanan dan perijinan
8. Sistem informasi integrasi SKPD dan desa
9. E-office untuk komunikasi dan filling antar OPD dan Kecamatan
10. Penguatan aparatur desa melalui pendidikan formal/non formal
11. Pelatihan daring untuk aparatur
12. Aplikasi kepegawaian yang terintegrasi
13. Penguatan infrastruktur untuk pelayanan publik
14. Penambahan SDM untuk pelayanan

6.2.6. Smart Technology Infrastructure

Teknologi khususnya teknologi informasi dan infrastruktur merupakan enabler yang menjadi pengungkit untuk terbentuknya konsep *Smart City*. Secara umum untuk Kabupaten Purbalingga masih dikatakan minim. Oleh karena itu beberapa inisiasi yang dapat dimaksimalkan untuk memperbaiki infrastruktur TI di antaranya adalah :

1. Pengembangan Data center terpadu
2. Integrasi data eksisting yang dimiliki oleh OPD
3. Optimasi jangkauan LAN dan WAN mencakup seluruh OPD
4. Pengembangan Operation Room dan Platform *Smart City* untuk integrasi data dan layanan
5. Penyediaan Wifi di ruang public

6.2.7. Smart People

Kualitas dan kuantitas menjadi parameter dari tercapainya smart people. Jumlah yang memadai dalam mengelola kota dengan kemampuan yang baik dalam menangani permasalahan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh kota. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM :

1. Kajian pemetaan kebutuhan SDM untuk pengembangan daerah khususnya berbasis *Smart City*
2. Penambahan jumlah personil untuk tiap OPD
 - Armada Kecamatan
 - Team ahli desa dan TIK desa
 - SDM Global desa
3. Penguatan kapasitas SDM OPD melalui pendidikan formal atau non formal
4. Penguatan kemampuan personil khususnya pengelola TIK (*troubleshooting*)
5. Pelatihan berbasis Daring untuk OPD
6. Program perubahan mindset masyarakat

6.2.8. Smart Governance

Tatakelola atau governance merupakan bagian yang penting dalam pengembangan *Smart City*. Dalam tahapan ini Kabupaten Purbalingga masih melakukan proses inisiasi. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan inisiasi berikut

1. Pembentukan organisasi *Smart City*
 - Dewan *Smart City* Sebagai Pengawas
 - Tim pelaksana *Smart City*
2. Pengembangan kebijakan, prosedur dan standar pengembangan *Smart City*
3. Penguatan kapasitas SDM
4. Penguatan keterlibatan stakeholder *Smart City*

6.3. Analisis Prioritas

Berdasarkan analisis kesenjangan, inisiasi yang dapat dikembangkan sebagai pilihan utama akan dianalisis dengan menggunakan McFarlan Grid atau lebih dikenal dengan analisis prioritas. Melalui analisis prioritas ini setiap inisiasi akan diberi label berikut:

- a. *STRATEGIC* (S). Label *Strategic* berarti inisiasi ini sangat penting untuk dilakukan karena terkait layanan yang sangat diperlukan saat ini juga untuk disiapkan oleh pemerintah.

- b. *KEY OPERATIONAL* (K). Label *Key operational* ini memandang inisiasi penting untuk dilakukan tapi tidak urgen. Akan sangat dibutuhkan di masa yang akan datang.
- c. *HIGH POTENTIAL* (H)/ Label *High potential* diberikan kepada inisiasi yang penting namun masih jauh untuk dilaksanakan
- d. *SUPPORT* (U). Label *Support* ini diberikan kepada inisiasi yang bersifat tidak terlalu penting untuk layanan tapi cukup membantu jika dilakukan.

Label-label di atas akan diberikan kepada inisiasi dari beberapa kluster yang ada pada tabel dibawah. Tabel ini merupakan inisiasi yang muncul dari analisis GAP.

1. Tabel inisiasi *Smart Economy*

No	Inisiasi	Prioritas
1	Kajian pembangunan dan pengembangan pasar beserta kebutuhan fasilitas di beberapa titik sesuai dengan area.	K
2	Pemantauan kondisi pasar melalui sistem informasi pengelolaan pasar yang digunakan untuk memantau dan harga yang bersumber dari pasar tradisional maupun modern.	S
3	Implementasi e-commerce untuk membantu meningkatkan pendapatan	K
4	Sistem Pengelola PAD yang dilakukan untuk melakukan proses penarikan dan pencatatan retribusi dari pasar dan pusat bisnis lainnya (e-retribusi)	S
5	Aplikasi pelaporan sistem keuangan daerah untuk informasi eksekutif.	S
6	Sistem informasi potensi daerah. Sistem ini dikembangkan secara online untuk menarik para investor terkait sumberdaya yang dapat menjadi potensi daerah untuk dikembangkan	S
7	Pengembangan database dan pemantauan penduduk miskin	K
8	Program pengembangan rumah layak huni untuk penduduk miskin sehingga tepat sasaran. Berintegrasi dengan sistem pencatatan dan pemantauan warga miskin	S
9	Sistem pencatatan dan pemantauan warga miskin	K
10	Sistem pemantauan Ketenagakerjaan. Sistem yang dibuat untuk melakukan identifikasi lapangan kerja, pencari kerja serta distribusi para pencari kerja.	S
11	Penguatan SDM sebagai pelaku industri melalui pelatihan sesuai bidang industri yang dijalani (logam , makanan , dan lain sebagainya)	S
12	Sistem informasi penyediaan modal sebagai sistem yang melakukan pencatatan dan informasi ketersediaan modal untuk pengelolaan industri khususnya industri kecil	S
13	Identifikasi dan digitalisasi pemetaan data pelaku industri dan area industri untuk memudahkan konsumen mendapatkan hasil produksi.	K
14	Sistem perijinan online berbasis satu pintu untuk kemudahan dalam mendirikan industri khususnya industri kecil (IUMK)	S

No	Inisiasi	Prioritas
15	Pengembangan area industri dan area pemasaran khusus yang digunakan untuk memasarkan produk daerah.	H
16	Pengembangan sistem pemasaran online terpadu yang digunakan produsen dalam rangka memasarkan produk.	S
17	Program promosi rutin yang dikelola pemerintah untuk seluruh industri	S
18	E-commerce untuk industri	S
19	Identifikasi dan digitalisasi potensi wisata Kabupaten Purbalingga (e-tourism berbasis SIG). Sistem ini dikembangkan untuk menginventarisir dan memperkenalkan potensi wisata yang dimiliki daerah untuk selanjutnya dipromosikan	S
20	Trip planer Kabupaten purbalingga sebagai pelengkap sistem sebelumnya.	U
21	Pembangunan fasilitas diarea wisata (hotel , toilet umum, papan penunjuk jalan, free wifi, dan sebagainya)	K
22	Penyediaan infrastruktur ke area wisata (jalan, transportasi umum untuk mempermudah akses menuju area wisata)	K
23	Pengkajian dan pengembangan desa wisata	S
24	Pengembangan konten digital Kabupaten purbalingga untuk promosi media sosial, media masa elektronik dan konvensional serta di sertai aktivasi medsos.	S
25	Identifikasi dan digitalisasi potensi sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah baik pertanian, perikanan, peternakan, sumberdaya alam maupun budaya.	S
26	Sistem informasi pertanian, peternakan dan perikanan untuk memantau produksi dan distribusi hasil.	S
27	Sistem informasi ketersediaan dan pengawasan stok pertanian	K
28	Rencana induk distribusi pangan untuk menjaga kecukupan pangan daerah	U
29	Aplikasi penyuluhan berisikan bibit, musim, hama dan lain sebagainya.	K
30	Penguatan SDM berbasis daring	S
31	Penambahan kualitas dan kuantitas SDM untuk hasil pertanian	S
32	Pengembangan website pertanian dan peternakan	S
33	Desa mandiri benih	S

2. Tabel Inisiasi Smart Living

No	Inisiasi	Prioritas
1	Sosisialisasi dan inisiasi keamanan lingkungan berbasis masyarakat	S
2	Panic Button untuk keamanan berbasis aplikasi per area	K
3	Emergency call center yang merupakan layanan 24 jam berbasis Telpon/Apps untuk merespon berbagai kejadian seperti kejahatan dan kebencanaan	S
4	EWS (<i>early warning system</i>) berbasis sensor untuk mendeteksi permasalahan keamanan semenjak dini	S
5	Penambahan personil khususnya untuk mitigasi bencana	S
6	Sistem pencatatan dan pemantauan PMKS secara digital (sistem dapat berintegrasi dengan sistem penduduk miskin)	K
7	Penambahan jumlah guru agar sesuai dengan rasio siswa dan jumlah kelas atau rombongan belajar	S

No	Inisiasi	Prioritas
8	Peningkatan angka partisipasi sekolah menjadi 12 tahun	S
9	Peningkatan kualitas guru melalui program pelatihan dengan target sertifikasi guru	S
10	Peningkatan kualitas sekolah melalui akreditasi	S
11	Digitalisasi data pokok sekolah (siswa, guru, mata pelajaran dan pembelajaran)	S
12	Sistem pemantauan fasilitas sekolah	H
13	Pengembangan manajemen konten pendidikan untuk pemerataan materi disetiap sekolah (berbasis online)	K
14	Legalisasi untuk GTT melalui SK Bupati	S
15	Pengembangan PPDB online	S
16	Inisiasi UNBK dan pelaporan online	S
17	Penambahan tenaga kesehatan khususnya dokter dan perawat	S
18	Integrasi data kesehatan dengan layanan kependudukan lain (KTP dan BPJS)	H
19	Info kesehatan berbasis online sebagai lahan sosialisasi pentingnya kesehatan lingkungan, minimalis penyakit menular dan lain sebagainya	S
20	Sistem informasi terintegrasi untuk kesehatan (rumah sakit, puskesmas, poliklinik dan dinas kesehatan)	S
21	Sistem interaksi online. Sistem online untuk komunikasi dokter, pasien dan stakeholder lain untuk kemudahan dan menjembatani keterbatasan dokter.	K
22	Sistem pengawasan ibu, bayi dan anak. Sistem ini melakukan pencatatan terhadap ibu hamil dan bayi yang dilahirkan untuk mengendalikan tingkat kematian ibu hamil dan bayi yang baru dilahirkan.	S

3. Tabel Inisiasi Smart Mobility

No	Inisiasi	Prioritas
1	Pengembangan <i>Traveler Information System</i> . Aplikasi digunakan sebagai informasi transportasi Kabupaten Purbalingga	H
2	Sistem pemantauan jalan jembatan untuk pendataan dan monitoring jalan serta jembatan yang dimiliki pemerintah daerah	H
3	Emergency management system yang dikembangkan untuk manajemen kecelakaan di jalan raya	S
4	Sistem monitoring kelayakan kendaraan	H
5	Sistem perijinan trayek terintegrasi dengan kelayakan kendaraan	S
6	Kajian untuk penerapan ATCS dan ATMS untuk melakukan pengawasan terhadap permasalahan transportasi.	U
7	Penguatan dan penambahan ahli bidang transportasi darat dan ahli keselamatan	S
8	Penguatan low enforcement untuk penegak hukum di jalan raya	K
9	Penguatan fasilitas untuk keamanan dan kenyamanan kendaraan umum	K
10	Pengembangan smart parking untuk implementasi di pasar dan beberapa kantor dinas.	S
11	Sistem informasi manajemen asset OPD	S

4. Tabel Inisiasi Smart Environment

No	Inisiasi	Prioritas
1	Inisiasi pemasangan sensor untuk polusi	H
2	Sistem Pengelolaan dan pengangkutan sampah berbasis aplikasi	H
3	Inisiasi pengembangan TPS berbasis 3R	K
4	Sosialisasi penghematan energi	S
5	Pengembangan GRID untuk pengelolaan dan control energy	H
6	Implementasi smart lighting untuk jalan utama	U
7	Sistem pemantauan dan pengendalian pembangunan	S
8	Sistem perijinan online	S
9	Sistem pengawasan tata ruang untuk memastikan kesesuaian peruntukan suatu wilayah berbasis SIG (database pemafaatan tanah, sebaran RLTH, kawan kumuh, limbah, dll)	S
10	Sistem monitoring bina marga, sumberdaya air, cipta dan karya.	H
11	Pemantauan dan pengendalian ruang terbuka hijau sebesar 30%	S

5. Tabel Inisiasi Smart Government

No	Inisiasi	Prioritas
1	Validasi dan digitalisasi data sebagai Inisiasi awal program one data /Single sign on (SSO) dan integrasi data kependudukan dengan OPD lain (kesehatan, pendidikan, pertanian)	S
2	Sistem informasi online pelayanan publik beserta call centre. Layanan ini merupakan aplikasi berbasis online yang memberikan seluruh informasi layanan (kependudukan, kesehatan, perijinan , dan lain sebagainya) beserta layanan informasi yang dapat diakses 24 jam	S
3	Sosialisasi rutin dan terukur terkait layanan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.	S
4	Sistem pelaporan berbasis web atau android yang langsung melakukan pelaporan hardcopy ke Bupati	S
5	Sistem permohonan layanan kependudukan	H
6	Pengembangan sistem administrasi desa (desa Digital)	H
7	Sistem informasi 1 pintu untuk mempermudah pelayanan dan perijinan	S
8	Sistem informasi integrasi SKPD dan desa	H
9	E – office untuk komunikasi dan filing antar OPD dan Kecamatan	S
10	Penguatan aparatur desa melalui pendidikan formal/non formal	S
11	Pelatihan daring untuk aparatur	S
12	Aplikasi kepegawain yang terintegrasi	S
13	Penguatan infrastruktur untuk pelayanan publik	S
14	Penambahan SDM untuk pelayanan	S

6. Tabel Inisiasi Smart People

No	Inisiasi	Prioritas
1	Kajian pemetaan kebutuhan sdm untuk pengembangan daerah khususnya berbasis Smart City	S
2	Penambahan jumlah personil untuk tiap OPD	S
	Armada Kecamatan	S
	Team ahli desa dan TIK desa	S
3	Penguatan kapasitas SDM OPD melalui pendidikan formal atau non formal	S
4	Penguatan kemampuan personil khususnya pengelola TIK (troubleshooting)	S
5	Pelatihan berbasis Daring untuk OPD	S
6	Program perubahan mindset masyarakat	S

7. Tabel Inisiasi Smart Technolgy

No	Inisiasi	Prioritas
1	Pengembangan Data center terpadu	S
2	Integrasi data eksisting yang dimiliki oleh OPD	S
3	Optimasi jangkauan LAN dan WAN mencakup seluruh OPD	S
4	Pengembangan Operation Room dan Platform <i>Smart City</i> untuk integrasi data dan layanan	S
5	Penyediaan Wifi di ruang publik	S

8. Tabel Inisiasi Smart Governance

No	Inisiasi	Prioritas
1	Pembentukan organisasi Smart City	S
	a. Dewan <i>Smart City</i> Sebagai Pengawas	S
	b. Tim pelaksana Smart City	S
2	Pengembangan kebijakan, prosedur dan standar pengembangan Smart City	S
3	Penguatan kapasitas SDM	S
4	Penguatan keterlibatan stakeholder Smart City	S

6.4. Pengembangan Master Plan

Berdasarkan hasil analisis prioritas serta pentahapan, maka rencana aksi atau inisiasi menuju *Smart City* secara dapat direalisasikan sesuai masing-masing tahapan sesuai dengan tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Inisiatif Tahap 1 untuk *Smart City* Purbalingga

No	Inisiatif Tahap 1: Visi dan Rencana Kerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kajian pemetaan kebutuhan SDM untuk pengembangan daerah khususnya berbasis Smart City	X				
2	Pembentukan organisasi Smart City	X				
	a. Dewan <i>Smart City</i> Sebagai Pengawas	X				
	b. Tim pelaksana Smart City	X				
3	Legalisasi untuk Dewan <i>Smart City</i> <i>Smart City</i> melalui SK Bupati	X				
4	Pengembangan kebijakan, prosedur dan standar pengembangan Smart City	X				
5	Penguatan keterlibatan stakeholder Smart City	X				

Tabel 8. Inisiatif Tahap 2 untuk *Smart City* Purbalingga

No	Inisiatif Tahap 2: Penguatan SDM dan Kebijakan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Penguatan SDM berbasis daring	x	x	x	x	x
2	Penguatan kapasitas SDM	x	x	x	x	x
3	Penambahan jumlah personil untuk tiap OPD: armada kecamatan	x	X			
4	Penambahan jumlah personil untuk tiap OPD: team ahli desa dan TIK desa	X	X			

No	Inisiatif Tahap 2: Penguatan SDM dan Kebijakan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
5	Penguatan SDM melalui program magang	X	X	X	X	X
6	Penambahan kualitas dan kuantitas SDM untuk hasil pertanian			X		
7	Penguatan SDM sebagai pelaku industri melalui pelatihan sesuai bidang industri yang dijalani (pariwisata, kerajinan, logam, makanan, dan lain sebagainya)	X	X	X	X	X
8	Rencana induk distribusi pangan untuk menjaga kecukupan pangan daerah	X				
9	Sosialisasi dan inisiasi keamanan lingkungan berbasis masyarakat		X			
10	Penguatan kemampuan personil khususnya pengelolaan TIK (troubleshooting)	X				
11	Penambahan personil khususnya untuk mitigasi bencana		X			
12	Penambahan jumlah guru agar sesuai dengan rasio siswa dan jumlah kelas atau rombongan belajar	X	X	X	X	X
13	Peningkatan angka partisipasi sekolah menjadi 12 tahun	X	X	X	X	X
14	Peningkatan kualitas guru melalui program pelatihan dengan target sertifikasi guru	X	X	X	X	X
15	Peningkatan tenaga kesehatan khususnya dokter dan perawat	X	X	X	X	X
16	Penguatan dan penambahan ahli bidang transportasi darat dan ahli keselamatan				X	
17	Penguatan law enforcement untuk penegakan hukum di jalan raya			X		
18	Kajian untuk penerapan ATCS dan ATMS untuk melakukan pengawasan terhadap permasalahan transportasi.					X
19	Penguatan kapasitas SDM OPD melalui pendidikan formal atau nonformal	X				

No	Inisiatif Tahap 2: Penguatan SDM dan Kebijakan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
20	Penguatan aparatur desa melalui pendidikan formal atau nonformal		X			
21	Penambahan SDM untuk pelayanan publik	X				

Tabel 9. Inisiatif Tahap 3 untuk *Smart City* Purbalingga

No	Inisiatif Tahap 3: Pemantapan Teknologi dan Infrastruktur	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengembangan platform integrasi sistem informasi cerdas		X			
2	Penambahan dan penguatan infrastruktur jaringan listrik untuk mengatasi permasalahan server yang mati	X				
3	Pendataan status aplikasi dan server secara terpusat dan komprehensif	X				
4	Data center terpadu antara dinkominfo Kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat		X	X		
5	Kajian migrasi server	X				
6	Command center untuk koordinasi dan visualisasi data dan informasi, membantu pengambilan keputusan dengan cepat dan akurat		X	X		
7	Aplikasi pelaporan sistem keuangan daerah untuk informasi eksekutif		X			
8	Optimasi jangkauan LAN dan WAN mencakup seluruh OPD dengan menggunakan fiber optik	X	X			
9	Sistem informasi potensi daerah. Sistem ini dikembangkan secara online untuk menarik para investor terkait sumberdaya yang dapat menjadi potensi daerah untuk dikembangkan			X		

No	Inisiatif Tahap 3: Pemantapan Teknologi dan Infrastruktur	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
10	Pengembangan database dan pemantauan penduduk miskin			X		
11	Sistem pemantauan ketenagakerjaan. Sistem yang dibuat untuk melakukan identifikasi lapangan kerja, pencari kerja serta distribusi para pencari kerja.		X			
12	Sistem informasi penyediaan modal sebagai sistem yang melakukan pencatatan dan informasi ketersediaan modal untuk pengelolaan industri khususnya industri kecil			X		
13	Validasi dan digitalisasi data sebagai Inisiasi awal program one data /Single sign on (SSO) dan integrasi data kependudukan dengan opd lain (kesehatan, pendidikan, pertanian)	X				
14	Identifikasi dan digitalisasi pemetaan data pelaku industri dan area industri untuk memudahkan konsumen mendapatkan hasil produksi.		X			
15	Sistem informasi online pelayanan public beserta call centre. Layanan ini merupakan aplikasi berbasis onlie yang memberikan seluruh informasi layanan (kependudukan, kesehatan, perijinan , dan lain sebagainya) beserta layanan informasi yang dapat diakses 24 jam				X	
16	Sistem perijinan online berbasis satu pintu untuk kemudahan dalam mendirikan industri khususnya industri kecil (IUMK)		X			
17	Identifikasi dan digitalisasi potensi sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah baik pertanian, perikanan, peternakan, sumberdaya alam maupun budaya.		X			
18	Identifikasi dan digitalisasi potensi wisata Kabupaten Purbalingga (e-tourism berbasis SIG). Sistem ini dikembangkan untuk menginventarisir dan memperkenalkan potensi wisata yang di miliki daerah untuk selanjutnya dipromosikan		X			
19	Pembangunan fasilitas di area wisata (hotel, toilet umum, papan penunjuk jalan, free wifi, dsb)	X	X			
20	Penyediaan infrastruktur ke area wisata (jalan, transportasi umum untuk mempermudah akses menuju area wisata)	X				

No	Inisiatif Tahap 3: Pemantapan Teknologi dan Infrastruktur	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
21	Sistem informasi pertanian, peternakan dan perikanan untuk memantau produksi dan distribusi hasil.		X			
22	Sistem informasi ketersediaan dan pengawasan stok pertanian		X			
23	Sistem pencatatan dan pemantauan PMKS secara digital (sistem dapat berintegrasi dengan sistem penduduk miskin)			X		
24	Digitalisasi data pokok sekolah (siswa, guru, mata pelajaran dan pembelajaran)		X			
25	Sistem pemantauan fasilitas sekolah		X			
26	Pengembangan PPDB online	X				
27	Inisiasi UNBK dan pelaporan online	X				
28	Integrasi data kesehatan dengan layanan kependudukan lain (KTP dan BPJS)			X	X	X
29	Sistem informasi terintegrasi untuk kesehatan (rumah sakit, puskesmas, poli dan dinas kesehatan)			X	X	
30	Sistem pengawasan ibu, bayi dan anak. Sistem ini melakukan pencatatan terhadap ibu hamil dan bayi yang dilahirkan untuk mengendalikan tingkat kematian ibu hamil dan bayi yang baru dilahirkan.			X		
31	Sistem pemantauan jalan jembatan untuk pendataan dan monitoring jalan serta jembatan yang dimiliki pemerintah daerah			X		
32	Sistem monitoring kelayakan kendaraan		X			
33	Sistem perijinan trayek terintegrasi dengan kelayakan kendaraan		X			

No	Inisiatif Tahap 3: Pemantapan Teknologi dan Infrastruktur	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
34	Penguatan fasilitas untuk keamanan dan kenyamanan kendaraan umum		X			
35	Sistem informasi manajemen asset OPD	X				
36	Sistem permohonan layanan kependudukan	X				
37	Sistem pelaporan berbasis web atau android yang langsung melakukan pelaporan hardcopy ke Bupati	X				
38	Pengembangan sistem administrasi desa (desa Digital)	X				
39	Sistem informasi 1 pintu untuk mempermudah pelayanan dan perijinan		X			
40	Sistem informasi integrasi SKPD dan desa	X				
41	E-office untuk komunikasi dan filing antar opd dan kecamatan	X				
42	Aplikasi kepegawaian yang terintegrasi		X			
43	Penguatan infrastruktur untuk pelayanan publik	X	X			
44	Pengembangan Data center terpadu	X				
45	Penyediaan Wifi di ruang publik	X	X	X		

Tabel 10. Inisiatif Tahap 4 untuk *Smart City* Purbalingga

No	Inisiatif Tahap 4: Penentuan Program Unggulan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kajian pembangunan dan pengembangan pasar beserta kebutuhan fasilitas di beberapa titik sesuai dengan area.			X		
2	Pemantauan kondisi pasar melalui sistem informasi pengelolaan pasar yang digunakan untuk memantau dan harga yang bersumber dari pasar traditional maupun modern.			X		
3	Sistem Pengelola PAD yang dilakukan untuk melakukan proses penarikan dan pencatatan retribusi dari pasar dan pusat bisnis lainnya (e-retribusi)			X		
4	Pengembangan sistem pemasaran online terpadu yang digunakan produsen dalam rangka memasarkan produk.			X		
5	E-commerce untuk memajukan UMKM dan industri kecil				X	
6	Trip planner Kabupaten Purbalingga sebagai pelengkap sistem sebelumnya.					X
7	Peningkatan kualitas sekolah melalui akreditasi	X	X	X	X	X
8	Pengkajian dan pengembangan desa wisata	X				
9	Pengembangan konten digital Kabupaten Purbalingga untuk promosi media sosial, media masa elektronik dan konvensional serta di sertai aktivasi medsos.	X				
10	Pengembangan website pertanian dan peternakan		X			
11	Panic Button untuk keamanan berbasis aplikasi / area					X
12	Emergency call center yang merupakan layanan 24 jam berbasis Telepon/Aplikasi untuk merespon berbagai kejadian seperti kejahatan dan bencana					X
13	Emergency management system yang dikembangkan untuk manajemen kecelakaan di jalan raya					X

No	Inisiatif Tahap 4: Penentuan Program Unggulan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
14	EWS (<i>early warning system</i>) berbasis sensor untuk mendeteksi permasalahan keamanan semenjak dini					X
15	Pengembangan manajemen konten pendidikan untuk pemerataan materi disetiap sekolah (berbasis online)			X		
16	Pegembangan Traveler Information System. Aplikasi digunakan sebagai informasi transportasi Kabupaten purbalingga					X
17	Pengembangan smart parking untuk implementasi di pasar dan beberapa kantor dinas.				X	

Tabel 11. Inisiatif Tahap 5 untuk *Smart City* Purbalingga

No	Inisiatif Tahap 5: Perluasan Dampak dan Manfaat	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengembangan area industri dan area pemasaran khusus yang digunakan untuk memasarkan produk daerah.				X	
2	Program pengembangan rumah layak huni untuk penduduk miskin sehingga tepat sasaran, terintegrasi dengan sistem pencatatan dan pemantauan warga miskin				X	
3	Program promosi rutin yang dikelola pemerintah untuk seluruh industri				X	
4	Aplikasi penyuluhan berisikan bibit, musim, hama dan lain sebagainya.			X		
5	Info kesehatan berbasis online sebagai lahan sosialisasi pentingnya kesehatan lingkungan, minimalisir penyakit menular dan lain sebagainya			X		
6	Sistem interaksi online. Sistem online untuk komunikasi dokter, pasien dan stakeholder lain untuk kemudahan dan menjembatani keterbatasan dokter.				X	
7	Sosialisasi rutin dan terukur kepada masyarakat terkait layanan dan kebijakan berorientasi <i>Smart City</i> yang dimiliki oleh pemerintah daerah.	X	X	X	X	X

7. Penutup

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan Tujuan dari pengembangan masterplan Smart City, hasil kajian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

1. Peningkatan Awareness/ kesadaran terhadap implementasi *Smart City* dilakukan melalui FGD yang memaparkan definisi, konsep dan rencana pengembangan *Smart City* di Kabupaten purbalingga dengan melibatkan berbagai stakeholder yang terlibat untuk pengembangan *Smart City*.
2. Berdasarkan hasil penilaian implementasi *Smart City* saat ini Kabupaten Purbalingga berada pada level 3 (scattered) dengan nilai 48. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga memiliki *awareness* dalam pengembangan *Smart City*.
3. Permasalahan yang umum terjadi di Kabupaten Pubalingga di antaranya adalah permasalahan sumberdaya manusia yang hampir terjadi di setiap OPD, Infrastruktur dan teknologi informasi, dan potensi daerah yang masih belum dikelola dengan optimal.
4. Rencana induk pengembangan *Smart City* dipetakan ke dalam 5 tahap implementasi yang dilakukan dalam proses 5 tahun.
 - a. Tahap pertama implementasi akan melakukan penguatan visi dan misi Purbalingga *Smart City* melalui penyelarasan konsep *Smart City* dan RPJMD pemerintah Kabupaten Purbalingga, penguatan SDM, penetapan dan pembentukan organisasi *Smart City*, pengembangan prosedur dan keterlibatan stakeholder *Smart City* yang dilakukan ditahun pertama.
 - b. Tahap kedua memulai implementasi dengan penguatan lebih detail terhadap SDM pelaksana implementasi *Smart City* melalui penambahan personil, penguatan kapasitas dan kemampuan SDM. tahap penguatan SDM ini terus dilakukan setiap tahun, hal ini dilakukan karena kondisi dan kebijakan

penempatan SDM serta kondisi perkembangan teknologi yang terus berubah.

- c. Tahap 3 dilakukan dengan melakukan penguatan teknologi dan infrastruktur khususnya berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Berbagai inisiasi dikembangkan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Tahap 4 dilakukan dengan menentukan program unggulan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk layanan untuk mengelola permasalahan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- e. Tahap 5 Melakukan sosialisasi dan implementasi terhadap inisiasi yang dimiliki sehingga inisiasi yang dimiliki dapat memberikan manfaat yang jelas bagi pemerintah maupun masyarakat yang terlibat.

7.2. Saran

- 1. Dokumen ini dikembangkan sebagai arahan dalam pengembangan *Smart City* Kabupaten Purbalingga. Keberadaan dan implementasinya dapat direview setiap tahun atau dua tahun sekali untuk *feasibility* setiap inisiasi yang dilakukan.
- 2. Agar keberadaan masterplan ini dapat digunakan secara maksimal, diperlukan dukungan atau legalitas formal masterplan ini, hal ini dapat dilakukan dengan membuat Peraturan Bupati (Perbup) sambil menunggu dapat disusunnya Peraturan Daerah (Perda) terkait pelaksanaan Smart City.
- 3. Berjalannya implementasi *Smart City* akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat terutama level pimpinan di Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu sangat diperlukan keterlibatan dari level pemerintah, akademisi, industri, masyarakat dan komunitas.